



KBPL
Kantor Bahasa Provinsi Lampung

77

R

Laras Bahasa: Saya Ulun Lampung

Rubrik Laras Bahasa di *Lampung Post*

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA	
<p>PB</p> <p>Klasifikasi</p> <p>499.227 7</p> <p>LAR</p> <p>2</p>	<p>No. Induk: 207</p> <p>Tgl. : 28-1-2004</p> <p>Ttd. : _____</p>

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA

OK

0121/11

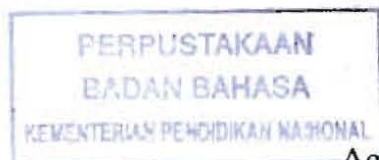
AL

PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

LARAS BAHASA: SAYA ULUN LAMPUNG

LARAS BAHASA: SAYA ULUN LAMPUNG

Rubrik Laras Bahasa di *Lampung Post*



Editor

Agus Sri Danardana



Pengumpul Data

Danang Harry Wibowo

Ratih Rahayu



Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Kantor Bahasa Provinsi Lampung
Lampung, Desember 2009

Laras Bahasa: Saya *Ulu*n Lampung
Rubrik Laras Bahasa di *Lampung Post*

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh
Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Desember 2009
Kantor Bahasa Provinsi Lampung
Jalan Beringin II Nomor 40
Kompleks Gubernuran, Telukbetung, Bandarlampung
Telepon (0721) 486408, 480705; Faksimile (0721) 486407
Pos-el (*E-Mail*): kbpl_2006@yahoo.com

Editor: Agus Sri Danardana
Desain Sampul dan Tata Letak: Danang Harry Wibowo

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499.277 7

LAR

I Laras Bahasa: Saya *Ulu*n Lampung, Rubrik Laras
Bahasa di *Lampung Post*/Danang Harry Wibowo
[et.al.] (ed)--Bandarlampung: Kantor Bahasa Provinsi
Lampung, 2009, xii, 186 hal.; 14,8 x 21 cm.

ISBN: 978-979-685-986-3

1. BAHASA INDONESIA-LARAS BAHASA

SAMBUTAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG

Sebagai instansi yang keberadaannya masih relatif baru (lima tahun), jika dilihat dari segi jumlah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung dapat dikatakan belum banyak berbuat dalam melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Dari tujuh jutaan penduduk Provinsi Lampung, baru sekitar seribu orang yang telah dibina melalui penyuluhan bahasa Indonesia. Sekitar seribu orang itu pun sebagian besar adalah guru dan pamong: 900-an. Sebagian kecil lainnya adalah kalangan pers: 30-an dan humas/protokol: 70-an dari berbagai instansi Pemprov Lampung.

Atas dasar itu, saya menyambut baik penerbitan buku ini. Buku yang berisi tanggapan, ide, atau gagasan atas realitas penggunaan bahasa Indonesia yang berkembang dalam masyarakat ini mudah-mudahan dapat menjadi sarana penyegaran, pencerahan, dan bahan pertimbangan bagi masyarakat luas dalam menggunakan bahasa.

Ucapan selamat dan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman penyusun: Danang Harry Wibowo dan Ratih Rahayu atas jerih payah mereka demi terbitnya buku ini serta tim penerbitan Kantor Bahasa Provinsi Lampung: As. Rakhmad Idris dan Tiurma Situmeang. Ucapan yang sa-

ma saya sampaikan pula kepada *Lampung Post* yang telah menjalin kerja sama dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam pengelolaan rubrik "Laras Bahasa". tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh: Oyos Saroso H.N., Ratih Rahayu, dan Hesma Eryani serta para penulis artikel dalam kumpulan ini.

Bandarlampung, Desember 2009

Drs. Muhammad Muis, M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Sambutan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung	vi
Daftar Isi	viii

Menyergah dan Tertatih-tatih

Oyos Saroso H.N.	1
-----------------------	---

Meubel atau Furniture

Ratih Rahayu	4
--------------------	---

Ribuan Massa

Adian Saputra	6
---------------------	---

Nuansa Magifikasi

Danang Harry Wibowo	9
---------------------------	---

Cheska

Adián Saputra	11
---------------------	----

Si Jomlo Bodong

Suheri	13
--------------	----

Selebriti

Mukhammad Isnaeni	16
-------------------------	----

Nonaktif

Adian Saputra	19
---------------------	----

Karan dan Latan

Oyos Saroso H.N.	21
-----------------------	----

O atau U, Manasuka?

Asarpin	24
---------------	----

Bahasa Indonesia Miskin?	
Yulfi Zawarnis	27
Resto dan Promo	
Adian Saputra	30
Wanita dan Perempuan	
Asarpin	33
Bahasa dan Nasionalisme	
Yulfi Zawarnis	36
Serangan Fajar	
Asarpin	39
Graha, Pondok, Regency...	
Yulfi Zawarnis	42
"Pesepak Bola Masuk Neraka"	
Adian Saputra	45
Selamat Idulfitri	
Agus Sri Danardana	47
Menconteng atau Mencentang	
Adian Saputra	50
Halo Coach	
Oyos Saroso H.N.	53
Menjunjung Bahasa Persatuan	
Agus Sri Danardana	56
Politik Bahasa dan Kita	
Oyos Saroso H.N.	59
Pesona Sastra	
Agus Sri Danardana	62
Katamso Wisata Kuliner	
Oyos Saroso H.N.	65
Kuntel karena Sekilit	
Adian Saputra	69
Logika Bahasa	
Agus Sri Danardana	72

Madani	
Oyos Saroso H.N.	76
Kuliner Sayur Asam	
Mukhammad Isnaeni	79
Nama(ku) Indonesia	
Juwendra Asdiansyah	82
Akika	
Dominggus M.U.D.	85
Polusi Bahasa SMS	
Mukhammad Isnaeni	87
Lunch di Twenty One	
Juwendra Asdiansyah	90
Bahasa Dolanan Anak-anak	
Adian Saputra	93
Ironi Bahasa Indonesia	
Juwendra Asdiansyah.....	96
Bukan Hari Valentine	
Yuliadi MR	99
Uluu Lampung	
Asarpin	102
Saya Uluu Lampung	
Udo Z. Karzi	105
Nalar Berbahasa	
Oyos Saroso H.N.....	108
Bukan Contreng dan Centrang?	
Yuliadi M.R.	111
Gaullah Biar Gak Katro!	
Danang Harry Wibowo	114
Bahasa Infotainment	
Habib Mawandhi	117
Lagi, Secara Gitu Loh!	
Oyos Saroso H.N.....	119

Apa arti Ngenet	
Agus Utomo	122
Mengaji atau Mengkaji?	
Fikri Ariyanto	124
Mengaji atau Mengkaji?	
Tanggapan atas Tulisan Fikri Ariyanto	
Hasnawati Nasution	126
Quick Count	
Adian Saputra	129
Bedebah!	
Juwendra Asdiansyah	132
Untuk Tuhan: Umat atau Hamba	
Diah Meutia Harum	135
Elektabilitas	
Oyos Saroso H.N.	137
Sebab Pengrajin tak Berarti Rajin	
F. Moses	140
Free tak Selamanya Bebas	
Danang Harry Wibowo	143
Absen tapi Hadir	
Diah Meutia Harum	146
Ekonomi Kata	
Asarpin	149
Internasional	
Yulfi Zawarnis	152
Pertarungan Bahasa Pilpres	
Yuliadi M.R.	155
Politik Bahasa: Golput dan Pedas	
Diah Meutia Harum	158
Ialah, Adalah, dan Merupakan	
Adian Saputra	161

Anomali	
Agus Sri Danardana	164
Mengkritisi atau Mengkritik	
Asarpin	167
Syirik dan Fitnah	
Fikri Ariyanto	170
Sekali Lagi: Mengaji dan Mengkaji	
Danang Harry Wibowo	173
Penulis	176

Ammonia

Ammonia is a colorless gas with a strong
pungent odor. It is highly soluble in water.

Ammonia is used in the manufacture of
fertilizers and explosives.

Ammonia is also used in the
treatment of certain diseases.

Ammonia is a weak base and
reacts with acids to form salts.

Ammonia

Ammonia is a colorless gas with a strong
pungent odor. It is highly soluble in water.

KATA PENGANTAR

Bahasa berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Belakangan ini, sebagai penutur bahasa Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia kerap abai pada bahasa negaranya. Padahal, jika boleh dikatakan sebagai penanggung jawab maju tidaknya suatu bahasa, masyarakat seharusnya menyadari bahwa bahasa Indonesia, selain menjadi jembatan komunikasi antarwilayah yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda antara satu dengan yang lain, merupakan salah satu simbol jati diri bangsa.

Penggunaan bahasa asing (terutama bahasa Inggris) yang mendominasi hampir semua ranah kehidupan bangsa membuat bahasa Indonesia seperti kehilangan pamor di negerinya sendiri. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak hanya cenderung mulai menomorduakan bahasa Indonesia, tetapi juga mulai mengabaikan kaidahnya.

Buku ini, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu, merupakan kelanjutan dari penerbitan buku *Laras Bahasa: Fobia Bahasa Indonesia*, *Rubrik Laras Bahasa di Lampung Post*. Buku ini tidak lagi hanya berisi tentang persoalan bahasa Indonesia, tetapi juga persoalan bahasa Lampung. Oleh sebab

itulah buku ini kami judul *Laras Bahasa: Saya Ulun Lampung*,
Rubrik Laras Bahasa di Lampung Post.

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang pernah dimuat oleh *Lampung Post* setiap Rabu dalam rubrik "Laras Bahasa". Artikel yang terkumpul sejak Mei 2008 hingga Agustus 2009, berjumlah 61 artikel: 30 artikel dimuat pada 2008 dan 31 artikel dimuat pada 2009. Dalam penerbitan ini, artikel-artikel itu (yang pada dasarnya merupakan tanggapan, ide, atau gagasan atas realitas penggunaan bahasa Indonesia yang berkembang dalam masyarakat) secara substansi tidak disunting. Penyuntingan yang dilakukan hanya pada penggunaan ejaan dan pengalimatan saja.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan bahasa serta dapat meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia.

Bandarlampung, Desember 2009

Tim Penyusun

MENYERGAH DAN TERTATIH-TATIH

Oyos Saroso H.N.

Para pejabat di Lampung banyak yang memiliki perilaku buruk. Mereka pemberang dan mudah marah. Kesimpulan itu segera bisa kita dapatkan kalau kita tiap hari rajin membaca koran. Di koran, hampir tiap hari ada pejabat publik atau narasumber yang menyergah dan berang.

Ketika pagar pembatas di Jalan Radin Intan Bandarlampung di dekat pusat perbelanjaan Ramayana, misalnya, sebuah koran lokal menulis: Senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi C Syarief Hidayat. Menurut dia, hingga kemarin neon boks yang digadang-gadang akan mempercantik wajah Bandarlampung hanya onggokan tiang tanpa realisasi. "Jangan tanggung-tanggung," sergah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Saya tidak begitu yakin apakah ketika diwawancarai Syarief Hidayat mengucapkan kalimat itu dengan nada marah (menyergah) atau tidak. Yang pasti, di sekujur berita itu yang muncul adalah nada kemarahan.

Menyergah dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) maupun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti 'mengejutkan dengan suara keras (membentak, menghantamkan kaki, dsb.)'. Dengan begitu, pemakaian kata *sergah* di atas tidak tepat.

Selain *sergah*, kata *berang* juga sering dipakai wartawan untuk menulis komentar seorang pejabat yang kesal terhadap sesuatu kebijakan atau keadaan. Pembaca tidak tahu persisnya ekspresi raut muka narasumber ketika menyergah dan berang. Namun, dari isi berita sebenarnya bisa diyakini narasumber yang disebut wartawan sebagai menyergah dan berang itu tidak marah-marah dengan nada suara tinggi. Mungkin narasumber menjawab pertanyaan sambil tersenyum atau tertawa terkekeh-kekeh.

Selain kata *sergah* biasanya dirangkai untuk sebuah kutipan langsung, ketidaktepatan juga sering terjadi pada pemakaian kata *kilah*, *tukas*, *kata*, dan *ujar*. Tanpa lebih jauh memahami apa arti kata-kata itu (dan malas membuka kamus), wartawan sering dengan seenaknya sendiri memper-tukarkan kata-kata *kilah*, *kata*, dan *ujar*.

Berkata sering dianggap selalu memiliki pengertian yang sama dengan *berujar* dan *berkilah* sehingga *katanya* sering disamakan dengan *ujarnya* dan *kilahnya*.

Sementara itu, kata *tukas* sering dianggap sama artinya dengan *cetus*. Untuk menulis keterangan bagaimana narasumber atau seseorang menjawab atau menanggapi dengan cepat wartawan sering memakai kata *tukasnya* atau *cetusnya*. Misalnya, "Saya akan segera perintahkan staf saya menyelesaikan kasus itu," tukasnya.

Untuk kasus kata *tukas*, agaknya banyak orang ter-pengaruh bahasa Minangkabau. Dalam bahasa Minangkabau, kata *tukas* berarti 'mengulangi lagi' (permintaan, jawaban, panggilan, dsb.). Sementara itu, menurut KUBI dan KBBI, kata *tukas* berarti 'menuduh tidak dengan alasan yang cukup'. Dalam pemakaian sehari-hari, kata *tukas* sering dipakai secara tidak tepa dan dianggap berarti 'menjawab dengan cepat'.

Pemakaian kata yang tidak tepat bukan saja akan menimbulkan keganjilan, melainkan maknanya juga akan menjadi bias bahkan menimbulkan salah tafsir dan terasa sumbang di telinga. Kesalahan pemakaian kata yang menimbulkan nada sumbang saat terdengar telinga adalah ketika penyiar televisi Fessy Alwi melaporkan acara pemakaman mantan Presiden Soeharto.

"Mbak Tutut berbicara tertatih-tatih," kata Fessy Alwi saat menyampaikan laporan langsung.

Orang bisa paham kalau anak kecil jalannya *tertatih-tatih*, kalau menangis *tersedu-sedu*. Kita juga tahu kalau orang yang bicara tersendat-sendat disebut bicara *terbata-bata*. Nah, ketika Mbak Tutut menyampaikan sambutan sambil menangis dan kalimat yang *terbata-bata*, tidak pas kalau disebut berbicara *tertatih-tatih*. Lebih pas kalau disebut Mbak Tutut memberikan sambutan dengan *terbata-bata*.

Kita bisa sepakat bahwa pilihan ragam bahasa jurnalistik berdasar pada kesadaran terbatasnya ruangan dan waktu. Salah satu sifat dasar jurnanisme menghendaki kemampuan komunikasi cepat dalam ruangan serta waktu yang terbatas. Itulah sebabnya jurnalis harus efisien bahasanya. Efisiensi bahasa maksudnya adalah agar lebih hemat ruang dan waktu, tetapi bahasanya tetap jelas.

Selain ekonomi kata, sangat disarankan seorang jurnalis (dan para editor) untuk ringan tangan membuka kamus. Ya, meskipun pintar dan hebat, jurnalis mudah tergelincir kata-kata sendiri kalau tidak tahu arti sebuah kata.

MEUBEL ATAU FURNITURE?

Ratih Rahayu

Tidak sengaja saya temukan sebuah kartu nama Toko Meubel Furniture. Sepintas tidak ada yang salah dengan nama toko itu. Nama toko itu terlihat keren dan cukup mempunyai daya jual.

Sangat jelas kalau toko itu tentu saja menjual barang-barang rumah tangga seperti lemari, meja, dan kursi. Lalu apa yang salah dengan nama toko di atas?

Sebagai seorang pemerhati bahasa, saya tergerak berkomentar bahwa toko tersebut telah melakukan pemborosan. Tentu saja bukan dalam hal keuangan, melainkan dalam penggunaan kata *meubel* dan *furniture* secara bersamaan.

Selain itu, kesalahan terjadi pula pada cara penulisannya. Selama ini masyarakat mungkin menyangka penulisan kata *meubel* dan *furniture* adalah yang benar sesuai dengan bahasa asalnya (bahasa Inggris).

Hal itu dapat dibuktikan dari iklan di surat kabar serta papan nama toko yang menjual lemari, kursi, dan meja yang ada di Bandarlampung. Tidak ada satu pun papan nama yang menuliskannya dengan benar. Semua menuliskannya dengan menambah huruf u (*meubel*) untuk kata *mebel* dan huruf e (*furniture*) untuk kata *furnitur*. Bahkan, ada pula yang menuliskannya dengan *meubeul*.

Mungkin hanya sedikit orang yang tahu bahwa kedua kata di atas sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata *mebel* dan *furnitur*. Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), *mebel* bersinonim dengan *furnitur* yang berarti 'perabot yang diperlukan, berguna atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya'.

Selain contoh kata di atas, dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari kita sering menemukan tulisan kata tertentu secara berbeda. Misalnya kata *optic* dan *optik* serta *electronic* dan *elektronik*. Kita tentu bertanya tulisan mana yang baku di antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali pada aturan pengindonesiaan kata asing.

Dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dinyatakan bahwa ejaan kata yang berasal dari bahasa asing hanya diubah seperlunya agar ejaannya dalam bahasa Indonesia masih dapat dibanding dengan ejaan dalam bahasa asalnya. Artinya, kata-kata dari bahasa asing harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia sehingga serapannya merupakan bentuk yang telah mengalami penyesuaian tulisan atau ucapannya, atau kedua-duanya.

Perlu diingat bahwa kata-kata dari bahasa asing memang tidak dapat dihindari dari pemodernan bahasa Indonesia. Akan tetapi, pengungkapan dalam kata-kata asing bagi gagasan dan pikiran yang dapat dinyatakan dalam bahasa Indonesia akan menghambat bahasa Indonesia, menggoyahkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, serta "mencemari" jati diri bangsa Indonesia.

RIBUAN MASSA

Adian Saputra

Kata *massa* banyak dipakai sebagai judul untuk menunjukkan sejumlah hal yang banyak. Tidak gagah rasanya kalau tidak menggunakan kata *massa* untuk menunjukkan sesuatu yang besar, banyak, dan melimpah. Oleh sebab itu, kata *massa* sering dijadikan kata gandeng kata di depannya, misalnya *ratusan massa*, *ribuan massa*, *jutaan massa*, dan sebagainya.

"Ribuan Massa Hadiri Deklarasi Kandidat Gubernur" dan "Ratusan Massa Demo Kedutaan Besar AS" merupakan judul-judul yang akrab kita baca di media massa. Pun demikian halnya akrab kita saksikan dalam pemberitaan di televisi.

Kata *massa* itu sejatinya sudah menunjukkan sesuatu yang banyak. *Massa* sebagaimana ditulis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan ketiga tahun 2003, berarti 'sejumlah besar benda (zat dan sebagainya) yang dikumpulkan (disatukan) menjadi satu (atau kesatuan); jumlah yang banyak; kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau pegangan tertentu'.

Dengan demikian, kata *massa* di belakang kata *ratusan*, *ribuan*, dan *jutaan* tidak tepat. Akan lebih baik jika kata *massa* diganti dengan kata lain. Misalnya, *ratusan kader*, *ribuan pendemo*, dan *jutaan orang*. Adanya perbaikan kata ini sangat te-

pat jika dilakukan media massa. Sebab, media massa menjadi rujukan pembacanya dalam soal kebahasaan. Dengan demikian, misi mencerdaskan pembaca oleh media massa bisa tercapai.

Selain kata *massa*, kata lain yang juga menjadi mubazir saat digunakan ialah *tenggat*. Banyak penulis atau jurnalis saat menulis kata *tenggat* dengan menggabungkannya dengan kata *waktu*, sehingga menjadi *tenggat waktu*. Ini juga keliru. *Tenggat* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artinya 'batas waktu'. Kalau dipakai juga kata *waktu* setelah lema *tenggat*, ya mubazir. Tulis saja *tenggat*, itu sudah cukup. Dengan begitu pembaca tidak memiliki persepsi yang salah terhadap kata itu.

Manfaat yang lain tentu saja keefisienan dalam ruang di media massa. Cukup lumayan bila membuang kata *waktu* ketika menulis *tenggat*. Sebab, media massa, khususnya koran, sangat memperhitungkan efisiensi kata. Kata ada yang bisa dibuang, untuk apa ditambah-tambah.

Kemubaziran kata layak untuk dihindari. Sebab, kemubaziran ini akan mengakibatkan kita akan memiliki interpretasi yang berbeda dengan makna asasinya. Satu lagi kata yang juga acap salah dalam pemakaian: *kawanan*. Sama seperti dua contoh kata di atas, kata *kawanan* kerap digunakan dengan keliru, misalnya *enam kawanan perampok*. Kata ini sebenarnya ditulis *wartawan* untuk menunjukkan *enam perampok*. Cuma, mungkin, karena kurang gagah kalau tidak ada kata *kawanan*, kata ini kemudian dipakai. Padahal, *kawanan* artinya 'sekumpulan orang dan sekelompok'.

Jadi, kata *enam kawanan perampok* berarti 'ada lebih dari satu kawanan'. Satu kawanan bisa dua atau enam orang, sehingga jumlahnya banyak. Kalau ingin menunjukkan hanya ada enam perampok, semestinya pakai saja kata *enam pe-*

rampok, tidak usah pakai *kawanan*. Kecuali kalau memang ada lebih dari satu *kawanan*. Semoga menjadi jelas.

Di televisi, kasus ini sering muncul. Padahal, sebelum dibacakan oleh penyiarinya, naskah yang banyak salah itu bisa disunting, sehingga tepat dalam pemakaian. Dengan demikian, pemirsa pun tidak salah dalam menangkap maksud isi berita. Atau malah bisa-bisa kesal karena tahu apa yang diujarkan si penyiar itu salah. Mari sama-sama benahi keba-
hasaan kita.

NUANSA MAGIFIKASI

Danang Harry Wibowo

Beberapa tahun yang lalu, Ayatrohaedi dalam tulisannya "Biar Salah Asal Gagah" (*Inul Itu Diva? Kumpulan Kolom Bahasa Kompas*, 2003: 47) mengajak masyarakat Indonesia kembali ke jalan yang benar. Ia mengatakan masyarakat salah memaknai arti kata *nuansa* dan cenderung memaknai kata *nuansa* sebagai 'sesuatu yang berhubungan dengan hawa, udara, keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu, dan keadaan suatu peristiwa'.

Padaahal, makna tersebut akan dijumpai pada lema kata *suasana* (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003: 1094). Sungguhnya, kata *nuansa* yang diserap dari bahasa Inggris (*nuance*) mempunyai arti 'variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali (tentang warna, suara, kualitas, dan sebagainya) dan kepekaan terhadap, kewaspadaan atas, atau kemampuan menyatakan adanya pergeseran yang kecil sekali (tentang makna, perasaan, atau nilai)' (*KBBI*, 2003: 788).

Ternyata, sejak tulisan Ayatrohaedi sampai tulisan ini dimuat, masyarakat telah bersepakat bergagah-gagah ria memakai kata *nuansa*, meskipun penggunaan kata tersebut kurang tepat jika ditilik dari maknanya. Berikut ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata *nuansa*, yang rasanya lebih pas menggunakan kata *suasana*.

Puluhan anak-anak bersenandung dan berdendang melantunkan lagu-lagu bernuansa Islami (*Lampung Post*, 3

November 2007). Maraknya pembentukan paguyuban bernuansa kedaerahan tidak berpotensi memperlemah konsep kebangsaan (*Lampung Post*, 2 September 2007).

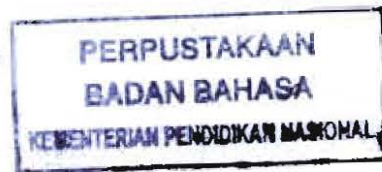
Lalu bagaimana dengan kata *magifikasi* yang digunakan Bang Oyos (Oyos Saroso H.N.) dalam tulisannya "Kebangkitan Nasional dan Magifikasi Indonesia?" (*Lampung Post*, 19 Mei 2008), sebuah kreasi atau distorsi?

Lazimnya, kata-kata Indonesia yang terdapat unsur fiksi diserap dari bahasa Inggris, seperti *qualification* (kualifikasi), *classification* (klasifikasi), dan *clarification* (klarifikasi).

Dalam menyerap kata asing seperti yang termaktub dalam *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2006: 23), ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, kata yang diserap dapat mempertajam daya ungkap penutur bahasa Indonesia. Kedua, belum ada konsep yang tepat untuk mengungkapkan gagasan dan hati dalam bahasa Indonesia sehingga harus menyerap kata asing, dan yang penting dalam proses penyerapan itu adalah motivasinya.

Apakah kata *magifikasi* merupakan kata serapan dari bahasa asing? Dalam kamus ekabahasa, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, tidak ditemukan kata *magification*, tetapi hanya kata *magi*, *magic*, *magician*, *magical*, *magically*, *magisterial*, dan *magistrate* yang ditemukan. Begitu pula dalam KBBI, kata *magifikasi* tidak ditemukan, hanya ditemukan kata *magi*, *magis*, *magister*, dan *magistrat*.

Nah, sekarang tinggal masyarakat memilih dan memilih, sepakat atau tidak sepakat dengan penggunaan kata itu, tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Kreasi dan distorsi mempunyai dua sisi yang berbeda seperti mata uang, bertolak belakang tetapi saling berkaitan, ketika sebuah kreasi muncul akan menimbulkan distorsi. Begitu juga sebaliknya, ketika sebuah distorsi muncul akan menimbulkan kreasi.





CHESKA

Adian Saputra

Putaran final Piala Eropa 2008 sudah dimulai. Beberapa negara tengah bertarung memperebutkan singgasana juara. Dalam ruang lingkup kebahasaan, saya ingin mengkaji nama negara yang ikut serta dalam Euro kali ini.

Republik Cheska. Demikianlah nama negara Peter Cech dkk. ini disebut. Negara ini memang pecahan dari Cekoslowakia. Satu menjadi Ceko atau Cheska, satu lagi berubah wujud menjadi Slovakia.

Beberapa koran sudah mengganti nama negara Tomas Rosicky ini dengan *Cheska*. Ada pula yang masih bertahan dengan *Ceko*. Tapi ada pula yang menyebutnya *Cek*. Mana yang benar?

Sewaktu melihat pertandingan mereka, syal yang dibentangkan pendukung negeri ini tertulis *Ceska*, tidak memakai huruf *h*. Ya, begitulah dinamika dalam bahasa Indonesia. Kalau mau pasti, memang lebih enak langsung saja bertanya. Bisa juga kalau kita pesan kepada reporter televisi Indonesia yang di sana, minta mereka bertanya: Apa sih nama asli negara, Anda, wahai Tuan Marek Jankulovsky?

Soal nama negara ini, kita memang paling bisa mengindonesiakannya. Dan hebatnya, kita tidak ribut. Coba ingat. Bagaimana mungkin negara yang bernama *Greece*, kita sebut *Yunani*. Negara bernama *Holland* (*Netherland*), kita indonesiakan menjadi *Belanda*. Dan negaranya Hitler, *Deutschland*, kita

kasih nama *Jerman*. Hingga kini mereka tidak protes dan oke-oke saja. Sebuah negara diberi nama tentu punya latar historis. Termasuk juga Cheska yang mungkin nama dari suku bangsa di sana.

Kita di Indonesia, *Celebes* berhasil kita ubah menjadi *Sulawesi* dan *Borneo* kita ganti dengan *Kalimantan*. Indah bukan? Bagus pula. Jadi, soal nama *Ceko*, *Ceska*, atau *Cheska*, kita tidak usah setumpahan ludah, istilah yang acap digunakan dari jurnalis Juwendra Asdiansyah. Tinggal pilih saja. Asal punya dasar. Toh, jika merujuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pun, banyak yang tidak sinkron dengan pemakaian umum masyarakat kita.

Nama negara *Kamboja*, tertulis di kamus *Kampuchea*. Kita menyebut *Turkmenistan*, di kamus ditulis *Turkimenistan*. Mana pula yang benar? Tinggal pilih saja. Namanya saja bahasa, selain soal kebakuan, juga tergantung nilai rasa. Terakhir, untuk Euro kali ini saya tidak memilih Cheska. Saya cenderung menir-menir dari Belanda yang menjadi juara.

SI JOMLO BODONG

Suheri

"Eh, tahu *nggak*, dua minggu yang lalu aku masih *jomlo lo*," ucap gadis cantik terkait produk pemutih wajah yang ia iklankan di stasiun televisi. Di akhir pariwara itu, sang dara kebingungan menentukan cowok mana yang akan ia pilih menjadi pacarnya.

Bila sang gadis mengaku *jomlo*, *jomlo* yang ia maksudkan adalah ia 'masih sendiri' atau 'belum memiliki pacar, kekasih'. Karena *jomlo* diasumsikan bermakna seperti itu, tidak heran jika dara yang masih sendiri atau belum mempunyai kekasih dengan bangga menyebut dirinya masih *jomlo*. Benarkah *jomlo* bermakna demikian? Mari kita periksa kebenarannya.

Kata *jomlo* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* edisi ketiga tahun 2005 halaman 476, bermakna 'gadis tua'. *Gadis tua* berkonotasi negatif, yakni gadis yang telah berusia dewasa (30—40 tahun), tetapi belum menikah.

Kata *gadis tua* lebih lazim diwakili dengan ungkapan *perawan tua*. Jadi, kalau para gadis mengaku dirinya masih *jomlo*, secara leksikon, ia tengah memperkenalkan dirinya sebagai gadis tua.

Selain *jomlo*, masih banyak kata-kata yang secara bertubi-tubi digunakan dalam komunikasi lisan dan tulisan, dan tengah mengalami proses perubahan makna secara ge-

neralisasi atau berhomonim. Sebagai contoh adalah kata *bodong*, *ember*, dan *menu*.

"Polres Lamsel Amankan 31 Unit Motor *Bodong*" (*Lampung Post*, edisi 31 Maret 2008). Sepeda motor *bodong* dalam konteks kalimat di atas dimaknai sebagai kendaraan bermotor atau sepeda motor yang tidak dilengkapi atau mempunyai surat-surat yang sah, seperti STNK dan BPKB.

Bandingkan dengan makna *bodong* berikut. *Bodong*: 'tersembul pusarnya, bujal, dan angin kencang' (*KBBI edisi ketiga*: 160). Karena tidak mempunyai surat-surat yang sah itukah, sepeda motor atau mobil yang seperti itu, dianalogikan sebagai tersembul pusarnya?

Makna kata *ember* dalam *KBBI* halaman 296 adalah 'tempat air berbentuk silinder (terbuat dari plastik, seng, dan sebagainya), dipakai untuk menimba air, dan sebagainya'.

"Awat hati-hati, jangan sampai Omas tahu, dia itu mulutnya ember." *Mulut ember* merupakan ungkapan yang diartikan 'orang yang banyak bicara, cerewet, tidak bisa menyimpan rahasia'. Apakah karena ember berpenampang lebar, hal ini diasosiasikan dengan mulut yang banyak bicara, cerewet?

Generalisasi atau homonim yang selaras agaknya berlaku untuk kata *menu*. *Menu* dalam *KBBI* halaman 734 bermakna 'daftar atau rangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia dan dapat dihidangkan'. Karena *menu* bermakna seperti di atas, kata *menu* secara umum digunakan pula sebagai fasilitas yang tersedia dalam perangkat elektronik seperti televisi, komputer, telepon seluler, dan lain-lain.

Penggunaan suatu kata dalam komunikasi verbal dan nonverbal tampaknya akan lebih bijak bila kita mengetahui makna kata itu secara leksikon lebih dahulu. Hal ini berguna agar tidak terjadi kerancuan makna kata yang sebenarnya,

apabila kata tersebut mengalami generalisasi maupun berhomonim.

Kecuali, apabila kata-kata atau ungkapan yang kita gunakan memang tidak terdapat dalam kamus. Seperti kata atau ungkapan *mak nyos* atau *mak nyus*, yang dimaknai sebagai sesuatu yang sangat enak, lezat sekali (makanan), indah, "panas", menggairahkan (tarian, joget).

SELEBRITI

Mukhammad Isnaeni

Gosip memang yahud. Apalagi gosip tersebut menyangkut para artis atau orang-orang terkenal di Tanah Air. Setiap orang pasti tergerak hatinya untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan pribadi artis pujaannya.

Siapa yang tidak penasaran jika yang diwawancarai adalah si blasteran, Cinta Laura? Siapa pula yang tidak terpancing untuk memelototi layar televisinya jika yang digunjingkan adalah Sandra Dewi, artis cantik dari Bangka Belitung itu?

Tidak dapat dimungkiri, kehidupan selebriti memang menjadi daya magnet yang cukup besar untuk memikat perhatian pemirsa televisi. Oleh sebab itu, wajar tentunya jika frekuensi penayangan acara *infotainment* tersebut lumayan sering: pagi, siang, dan sore.

Di Indosiar, kita mengenal acara *infotainment* KISS, yang merupakan akronim dari *kisah seputar selebritis*. Di Trans tv, ada acara sejenis, yaitu *Insert*, yang diakronimkan dari *informasi seputar selebritis*, serta banyak acara lain yang berembel-embel kata *selebriti(s)*. Kata *selebriti(s)* memang acap bergandengan tangan dengan nama acara-acara *infotainment*. Kata tersebut sepertinya menjadi sebuah kata yang sakral untuk menyebut segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia keartisan atau dunia orang-orang terkenal.

Sebenarnya, apa itu *selebriti(s)*? Kata *selebriti(s)* diserap dari bahasa Inggris, yaitu *celebrity*. Menurut kamus ekabahasa *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (1995: 178), *celebrity* bermakna *a famous person* atau orang terkenal. Kata ini memang berkategori nomina atau kata benda sehingga dapat ditambahkan akhiran *s/es* untuk membentuk nomina jamaknya. *Celebrity* tunggalnya, jamaknya menjadi *celebrities*/orang-orang terkenal. Tidak salah tentunya jika orang Inggris melafalkannya *selebriti(s)*. Persoalannya adalah sudah tepatkah pelafalan *selebriti(s)* menurut kaidah bahasa Indonesia?

Dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (2006: 26) dijelaskan bahwa unsur pinjaman, pengucapan dan penulisannya sebisa mungkin disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kata-kata asing yang berakhiran *ty* (Inggris) atau *teit* (Belanda), dalam bahasa Indonesia ejaan dan pelafalannya menjadi *tas*, contoh: *university* akan menjadi *universitas*, *quality* menjadi *kualitas*, *community* menjadi *komunitas*. Jika demikian, kata *celebrity* seharusnya dilafalkan dan dituliskan *selebritas*, bukan *selebriti*, apalagi *selebritis*!

Selain kata *celebrity* yang sering disalahlafalkan dengan *selebriti*, kata *reality* juga banyak dilafalkan orang dengan *realita*. Bahkan, kata *realita* juga dipakai sebagai nama sebuah tabloid di Indonesia. Padahal, kedua kata tersebut sama-sama berakhiran dengan *ty*, tetapi pelafalannya bisa berbeda-beda. Yang satu dilafalkan *selebriti*, yang satunya lagi dilafalkan *realita*. Jika *university* dilafalkan *universitas*, *community* dilafalkan *komunitas*, sudah semestinya kata *celebrity* dan *reality* harus dilafalkan *selebritas* dan *realitas*.

Memang orang Indonesia sangat aneh: Memperlakukan sebuah kata yang serupa dengan pelafalan yang berbeda-beda. Hal ini menandakan orang Indonesia memang malas berpikir, apalagi jika menyangkut bahasa. Padahal, bahasa juga mempunyai paradigma atau teori deklinasi kata yang jelas.

Munsi Anton M. Mulyono pernah berujar bahwa cara berbahasa seseorang mencerminkan kecendekiaan seseorang. Orang yang cendekia mempunyai konsep berpikir yang ajeg dan teratur. Makin *ngawur* bahasa yang kita pakai, makin kabur pula cara pikir kita. Salam!

NONAKTIF

Adian Saputra

Sejak mendaftarkan diri menjadi calon gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P. mundur dari jabatannya sebagai gubernur kini. Praktis sejak saat itu, putra mantan Gubernur Lampung Zainal Abidin Pagaralam ini tidak lagi menjadi gubernur.

Jika kita ingin menulis nama Sjachroedin dengan predikat tertentu, kita bisa menulisnya *mantan Gubernur Lampung*, Sjachroedin Z.P. atau *eks Gubernur Lampung*, Sjachroedin Z.P. Tetapi, jika kita melihat surat kabar dan media massa lain menyebut namanya, kita mendapati ada yang menulisnya *Gubernur nonaktif*, Sjachroedin Z.P.

Nonaktif dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti 'tidak menjalankan pekerjaan tugas lagi'. Di contoh kalimat dalam kamus: Ia adalah anggota TNI dengan pangkat sersan yang sudah *nonaktif*.

Makna kalimat dalam contoh penggunaan kata *nonaktif* di atas saya kira sangat jelas. Maksudnya ialah orang yang sudah *nonaktif*, segala predikat yang disandang, sudah dilepas. Sama seperti kata almarhum yang artinya sudah meninggal. Jadi, semua bentuk kata yang gandeng dengan nama seseorang, sudah hilang.

Di luar kebijakan redaksi media massa dan pilihan politik media tertentu, ada baiknya penggunaan kata *nonaktif* itu harus dibenarkan, ditempatkan sesuai dengan porsinya. Maksudnya, karena Sjachroedin sudah tidak lagi menjabat,

predikat gubernurnya menjadi hilang. Maka, saat kita menulis namanya dalam konteks mau pilkada, kita bisa menulis dengan *mantan gubernur*, *eks gubernur*, atau *gubernur masa jabatan 2003–2008*.

Saya kira itu jauh lebih baik ketimbang memaksakan unsur *gubernurnya* menempel pada nama. Saya khawatir dengan membaca kalimat yang menyebutkan *gubernur nonaktif*, masyarakat masih menganggap Sjachroedin sebagai *gubernur*. Padahal, dia sudah *nonaktif*. Sekarang Lampung memiliki pelaksana tugas gubernur yang disandang Syamsurya Ryacudu.

Jika ada pihak yang beralasan bahwa kata *nonaktif* itu menunjukkan memang Sjachroedin bukan gubernur lagi, ya sulit diterima. Dari efisiensi kalimat saja, tidak terpenuhi. Kemudian, dari sisi penerimaan logika, pembaca—insya Allah dan hakulyakin—tetap punya persepsi keliru.

Bisa jadi banyak di antara pembaca yang memiliki opini, “Oh Sjachroedin masih gubernur. Cuma lantaran mau ikut pilkada, dia *nonaktif*. Nanti setelah pilkada, dia menjabat lagi.”

Ketimbang berjudi dengan membuat kata *gubernur nonaktif*, ditulis saja *mantan gubernur*, *eks gubernur*, atau *gubernur periode 2003–2008*, kan menjadi jelas dan terang. Insya Allah jika kata itu yang dipakai, kerancuan berpikir pembaca akan dihindari. Ya semuanya untuk menghindari syak wasangka.

Yang perlu juga diingat, media massa menjadi alat pembelajaran terbaik buat pembaca. Makin jeli media memakai kata atau istilah tertentu, akan membantu pembaca menangkap maknanya. Sebaliknya, makin tidak teliti dan rumit dalam berbahasa, makin jauh pulalah pemahaman pembaca soal kebahasaan, utamanya bahasa Indonesia.

KARAN DAN LATAN

Oyos Saroso H.N.

Setelah melalui tahap *fit and proper test* (tes kelayakan dan kepatutan) di KPU Provinsi Lampung, akhirnya tiga anggota Panwas Kabupaten Pesawaran (Karan) ditetapkan sebagai anggota Panwas Pengisian anggota DPRD Pesawaran. Walaupun begitu, hingga kini, tiga anggota Panwas pengisiari DPRD Pesawaran belum memiliki tugas yang jelas. Padahal, KPU Lampung Selatan (Latan) telah sampai pada tahapan pembagian daerah pemilihan (DP) di tujuh kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah Karan hasil pemecahan kabupaten induknya, Latan.

Kalimat di atas merupakan teras berita sebuah harian di Lampung. Saya dibuat pusing bukan hanya kalimatnya yang *mbulet*, melainkan juga karena adanya kosakata baru: *Karan* dan *Latan*. *Karan* adalah singkatan dari Kabupaten Pesawaran, sedangkan *Latan* singkatan Kabupaten Lampung Selatan.

Selain *Karan* dan *Latan*, koran itu juga menyingkat *Lampung Utara* dengan *Laura*, *Lampung Timur* menjadi *Lati*, *Tulangbawang* menjadi *Tubang*, *Lampung Barat* dengan *Laba*, *Lampung Tengah* dengan *Langah*, Kota Metro menjadi *Komet*, dan *Bandarlampung* dengan *Bala*.

Apa alasan pembuatan akronim itu? Bukankah selama ini di Lampung kita sudah mengenal kata *Lamut* (untuk

singkatan Lampung Utara), *Lamteng* (Lampung Tengah), dan *Tuba* (Tulangbawang)? Saya khawatir akronim dan singkatan kata baru itu sekadar gagah-gagahan untuk tampil beda.

Para pembuat singkatan itu tidak sadar bahwa mereka telah membuat pembaca jadi makin jenuh bin pusing. Ya, banjir singkatan dan akronim sejak lima tahun terakhir gila-gilaan sehingga membuat masyarakat bingung. Jangankan orang asing, orang Indonesia pun banyak yang bingung karena kosakata dari hasil pembentukan akronim dan singkatan terjadi hampir setiap hari.

Media pembuat akronim itu sebenarnya tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Selain pertimbangan hemat kata dan hemat ruang koran, selama ini memang tidak ada aturan baku dari *ejaan yang disempurnakan* (EYD) tentang cara akronim. Dalam EYD hanya dikatakan pembuatan akronim dilakukan dengan mengambil salah satu unsur kata yang mau disingkat. Kalau setiap unsur dalam beberapa kata yang akan dijadikan akronim sudah terpenuhi, ya jadilah sebuah akronim.

Pada sisi tertentu, pembuatan akronim adalah sebuah usaha kreatif. Namun, ada baiknya kalau kreativitas itu juga mempertimbangkan masyarakat pemakai bahasa. Kalau masyarakat umum sudah mengenal akronim dan singkatan yang sudah dikenal luas, tidak perlu kita memaksakan diri untuk membuat yang baru. Bahkan, bila perlu media massa menghilangkan sama sekali akronim dan singkatan karena hanya membuat "polusi" bahasa makin menjadi-jadi.

Setelah *Susilo Bambang Yudhoyono* disingkat SBY, media massa juga ramai-ramai menulis *Hidayat Nurwahid* dengan HNW, *Soetrisno Bachir* menjadi SB, *Akbar Tandjung* menjadi AT, *Megawati Soekarnoputri* menjadi MS, dan *Tifatul Sembiring* menjadi TS.

Kita masih bisa memaklumi kalau pemakaian singkatan nama orang itu dipakai untuk percakapan sehari-hari dalam pemakaian terbatas. Namun, kalau singkatan dan akronim untuk kalangan terbatas itu juga dipaksakan untuk dipakai di kalangan luas, tentu akan merepotkan dan menambah bahasa Indonesia kian kena polusi.

Untuk kasus SBY, misalnya, akan lebih baik jika kita menulisnya *Presiden Susilo* atau *Presiden Yudhoyono*. Sejak kecil hingga menjadi menteri, *Susilo Bambang Yudhoyono* di daerah asalnya (Pacitan, Jawa Timur) biasa disapa *Susilo*, bukan SBY atau *Yudhoyono*. Namun, menulisnya menjadi *Presiden Yudhoyono* juga bisa. Ini jika kita mengacu cara media internasional menuliskan nama orang, yang biasanya memakai nama keluarga atau nama marga.

Produksi akronim dan singkatan itu menyebabkan “ledakan” kosakata bahasa Indonesia yang justru jadi kontra-produktif bagi pengembangan bahasa. Selain orang Indonesia jadi bingung, orang asing juga tambah sulit belajar Bahasa Indonesia karena akronim dan singkatan yang ada pengertiannya sering berubah.

O ATAU U, MANASUKA?

Asarpin

Seorang penyair menulis esai dengan sebuah kalimat begini: "Dalam keharuan di sekitar sajak-sajak yang serba gerak, maka tampak serba guyah". Seorang ahli bahasa pernah menulis di sebuah koran lokal: "Bahasa Indonesia sekarang tampak goyah".

Guyah atau *goyah*? Bahasa Indonesia memang masih labil karena selain dari segi usia yang baru 80 tahun (28 Oktober 2008 nanti), juga karena banyak faktor ditentukan faktor kultural dan politik. Sejak 1972, melalui penyempurnaan ejaan, masih saja ada yang kesulitan menentukan mengapa ada penulisan *guyah* dan *goyah*. Maka, arah ejaan dan penulisan kosakata bahasa Indonesia kini menjadi tidak jelas.

Banyak kosakata yang mengandung huruf *u* atau *o* yang membingungkan lantaran tidak jelas mana yang harus diikuti. Belum lagi banyak yang salah tulis untuk nama orang yang berakhiran *o*, seperti nama *Octavio* dan *Prasetyo* menjadi *Octavia* dan *Prasetya*. Saya ingat Umar Kayam yang tetap menulis *Gunawan Muhamad* dan bukan *Goenawan Mo-hamad*. Lalu bagaimana sikap kita? Biasa-biasa saja, agaknya, tanpa rasa bersalah apalagi menyesal. Tapi mereka yang terlampau ketat soal penulisan nama orang, mungkin menganggap penulisan nama yang sudah baku itu gegabah, salah.

Bahasa Indonesia berkembang bukan dari bahasa pasar sehingga dalam perjalanannya cenderung gamang dan seragam. Berbeda dengan bahasa Prancis yang lahir dari bahasa pasar dan berkembang secara *bhinneka* di bagian utara dan bagian selatan, seperti keterangan klasik Ferdinand de Saussure dalam buku *Pengantar Linguistik*.

Wajar bila ada yang menganggap bahasa Prancis bahasa kreatif, sedang bahasa Indonesia rigid, kaku, mengandung keragu-raguan. *Amuk* atau *amok*? *Amuk* bahasa Melayu, *amok* bahasa Inggris yang konon menyerap dari bahasa Melayu. Tapi masih saja ada yang menulis berkali-kali *amok* yang dianggap bahasa Indonesia.

Mungkin betul bahwa *ke-bhinneka*-an bahasa terletak pada ruang dan waktu. Keanekaragaman dialek, lingkungan, iklim, tanah, tradisi, menjadikan bahasa tidak tenang dan akan terus gelisah dan cemas, hingga akhirnya laur. Dari *u* menjadi *o* lalu *u* lagi, mana yang benar? Cukup banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang telah mengalami guncangan bagi pemakainya, karena lingkungan penggunaannya mengalami ketidakpastian, ketidakpastian, dan selalu di-rundung ragu.

Dapat dibenarkan bila para ahli bahasa beranggapan penutur bahasa Indonesia sedang guncang. Apakah *guyah* atau *goyah*, *goyang* atau *guyang*, *hojat* atau *hujat*, *mabuk* atau *mabok*? Ia berdiri *kukuh*, pendiriannya *kokoh*? Dapatkah kita memastikan penulisan mana yang benar sesuai dengan EYD? Sebelum EYD, banyak pengarang menggunakan kata *guyah*, *mulur*, *guyang*, *amuk*, *hujat*. Ketika EYD, ternyata berubah menjadi serba *o*. Penulis yang dibesarkan dalam khazanah Melayu, mungkin lebih nyaman menggunakan huruf *u* ketimbang *o*. Tapi banyak penulis-penulis Riau, Minang, Lampung, Jambi, ternyata *rame-rame* menggunakan *o*.

Penulis yang berlatar Jawa konon lebih sering menggunakan *o* ketimbang *u*. Kesimpulan ini tidak betul seluruhnya karena beberapa penulis yang bahasa daerahnya Jawa masih menggunakan *u* untuk kata *guyah*, *guyang*, *kukuh*. Orang yang termakan hasutan adanya proses "jawanisasi" bahasa Indonesia sejak zaman Orde Baru sampai kini, menganggap penggunaan *o* adalah bentuk jawanisasi bahasa Indonesia yang paling eksplisit.

Pandangan terakhir ini sulit ditolak. Walau yang terjadi sesungguhnya bukan jawanisasi bahasa Indonesia, sansekertanisasi, dan arabisasi. Namun, dominannya penggunaan kosakata Jawa dalam kamus-kamus bahasa Indonesia, sulit mengingkari sumbangan bahasa Jawa dalam melakukan pergeseran penulisan kosakata. Bukan maksud saya menganggap bahasa Indonesia keruh akibat masuknya kosakata Jawa, melainkan sejak Orde Lama memang bahasa Jawa tampak begitu dominan digunakan dalam tulisan.

Menyerap huruf, logat, dialek, dan kosakata hingga struktur kalimat dari berbagai cenayang daerah di bumi Nusantara, tidak ada salahnya, bahkan terbukti bisa memperkaya bahasa Indonesia. Namun sayangnya hanya segelintir bahasa daerah yang menyumbang kekayaan bahasa Indonesia. Bahasa Lampung, Minahasa, Manado, Nusa Tenggara Timur, Papua, hampir tidak menyumbang bagi penulisan kamus-kamus bahasa Indonesia sampai hari ini.

BAHASA INDONESIA MISKIN?

Yulfi Zawarnis

Bahasa Indonesia memiliki sifat dinamis dan terbuka. Artinya, bahasa ini setiap saat dapat menerima perubahan dan masukan yang membangun. Masukan yang membangun ini sering datang dari berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa daerah.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pun turut memengaruhi khazanah kosakata bahasa Indonesia. Kita sering mendengar kata *teknologi*, *berkah*, *madani*, *sehat*, *komputer*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kita tentunya menyadari kata-kata itu berasal dari berbagai bahasa yang ada di dunia. Kata *teknologi*, misalnya, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *technology* yang berarti 'metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau bisa juga berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia'.

Kata *madani* berasal dari bahasa Arab dan berhubungan dengan Kota Madinah. Kini kata *madani* digunakan sebagai padanan kata bahasa Inggris *civil society*. Masyarakat *madani* diartikan sebagai 'masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi, santun, menjunjung tinggi norma dan

hukum yang berlaku yang dilandasi penguasaan iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi'.

Penyerapan kata-kata dari bahasa asing maupun bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia tentunya boleh dilakukan selama sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada.

Berdasar pada taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya *reshuffle*. Unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya, misalnya *structure* menjadi *struktur*.

Sesuai dengan pedoman *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, penyerapan istilah asing ke bahasa Indonesia boleh dilakukan jika tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata *laundry*, misalnya, tidak perlu diserap karena bisa dipadankan dengan kata *binatu*. Kata *mouse* bisa dipadankan dengan *tetikus*, kata *download* bisa dipadankan dengan *unduh*, dan kata *workshop* bisa dipadankan dengan *sanggar kerja*.

Bahasa Indonesia sangat kaya. Banyak orang yang terkejut-kejut ketika membuka KBBI dan menemukan kosakata yang tidak lazim mereka dengar. Contoh sederhana adalah aktivitas tangan. Selama ini kita mungkin hanya mengenal beberapa kosakata yang melibatkan aktivitas tangan, misalnya *mencolek*, *memukul*, dan *menjitak*.

Ternyata khazanah kosakata bahasa Indonesia mengenal banyak sekali aktivitas tangan. Siapa yang kenal istilah

arih, bongmeh, dan ceku? Ya, istilah-istilah itu juga merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam gerak tangan. Bahkan, menurut Dr. Felicia N. Utorodewo ada 238 kata dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan "tangan bergiat" atau berbagai macam gerak tangan.

Oleh sebab itu, sangat naif rasanya ketika kita berdalih bahwa bahasa Indonesia miskin kosakata dan memilih mencampuradukkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing saat berkomunikasi dengan kerabat dan relasi. Ironisnya, tindakan mencampur aduk bahasa ini menjadi kebanggaan tersendiri di kalangan tertentu. Lalu, masihkah kita mencintai dan bangga berbahasa Indonesia?

RESTO DAN PROMO

Adian Saputra

Dalam beberapa bulan terakhir, ada banyak kata *promo* dan *resto* yang masuk meja kerja Tim Bahasa *Lampung Post*. Umumnya, berita tentang bisnis yang banyak menggunakan kata ini. Entah itu bank yang baru beroperasi, swalayan yang sedang gencar menarik simpati pelanggan, maupun produsen telepon seluler yang jumlahnya semakin bertambah.

Karena kami memegang teguh *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sebagai rujukan dalam melihat kata yang baku, dua kata itu kami ganti dengan *promosi* dan *restoran*. Asisten redaktur kami di koran ini, Isnovan Djamaludin namanya, juga acap cerewet kepada anggota tim bahasa yang lain jika khilaf mengganti dua kata itu. Keinginan tim ini tentu saja menjaga gawang bahasa Indonesia ini supaya tidak makin rusak. Sudahlah banyak kata yang keliru, masih pula memotong unsur kata dengan pertimbangan bisnis tertentu.

Memang makin zaman mendekati akhir ini penggunaan kata juga ingin dipersingkat. Mestinya *promosi* disebut *promo*. *Restoran* ditulis *resto*. Selain untuk menghemat huruf, mungkin keinginan dari pengelola dua usaha itu agar punya gaya berbeda. Ya mungkin siapa tahu menambah keberuntungan usaha mereka.

Namun, dalam ragam bahasa tulis di media massa, hal semacam itu semestinya dihindari. Media massa sebagai bagian integral dari unsur pendidik bangsa, seharusnya menjalani peran dengan baik, salah satunya dengan memegang pakem bahasa yang dianut.

Kata *promo* bisa saja dipakai untuk sebuah nama acara atau produk tertentu, misalnya "Gebyar Promo 2008". Kalau untuk yang itu, tetap dipertahankan karena merupakan merek tertentu. Tapi, di luar itu, kata *promosi* yang tetap dipakai. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi media massa untuk membodohi pembacanya dengan istilah atau kata yang tidak sesuai dengan makna asasinya.

Sekadar menambah ilmu, *promosi* itu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti 'kenaikan pangkat; hal memperoleh gelar doktor; pemberian gelar doktor yang dilakukan dengan upacara khusus; dan pengenalan'.

Jika merujuk kepada dunia bisnis, perihal pengenalan ini yang dimaksud dalam kata *promosi*. Pengertian yang lain jika kita simak dari artinya, sungguh tinggi. Bagaimana tidak dibilang tinggi kalau arti *promosi* itu berkenaan dengan dunia pendidikan, khususnya dalam memperoleh gelar doktor.

Sedangkan *restoran* bermakna 'rumah makan'. Sederhana bukan? Rumah yang di dalamnya orang bisa menikmati santapan yang diinginkan. Saya memprediksi penggunaan kata *resto* itu untuk memperluas makna rumah makan. Barangkali yang dimaksud dalam *resto* itu suatu rumah makan, tetapi dengan gaya yang berbeda. Di dalam *resto* bisa saja disiapkan tempat untuk kongko-kongko, ajang pertemuan pebisnis, dan sebagainya.

Dengan demikian, istilah rumah makannya hilang, diganti dengan tempat makan yang asyik di mana lebih trendi dan berkelas. Kalau sekadar *restoran*, masih dalam perkiraan

saya, kesannya kuno sekali. Kalau sekadar tempat makan, mungkin sudah biasa. Yang dibutuhkan pelanggan ialah tempat makan yang **trendi**, berkelas, dan sedikit mewah. Karena itulah dipilih nama *resto*. Cukup dengan membuang huruf *r*, *a*, dan *n* (*ran*), ditemukanlah kata itu: *resto*. Cukup enak didengar dan **terasa** kerennya.

Namun, perihal bahasa bukanlah semata keren tidak keren, melainkan bagaimana ejaan yang baku terhadap kata itu. Kefasihan kita dalam menulis dan menyebarluaskan suatu kata harus punya pedoman. Karena kita punya kamus, buku itu pulalah yang kita rujuk. Dengan demikian, pilihan redaksi koran ini tetap ke *restoran* dan *promosi*.

WANITA DAN PEREMPUAN

Asarpin

Saya kaget ketika dalam novel baru Ayu Utami, *Bilangan Fu*, terdapat banyak kata *betina* dan *jantan*. Aku pikir kedua kata ini sudah lama terkubur dalam langgam bahasa kita sehari-hari, juga dalam tulisan.

Aku pikir sudah tergantikan kata *perempuan* dan *lelaki*. Ternyata aku salah. Selain, dua kata yang dekat sekali dengan binatang itu, kata *wanita* dan *pria* juga masih sering dipakai dalam tulisan.

Dalam rubrik ini, Oyos Saroso H.N. pernah menegaskan penggunaan kata *perempuan* lebih pas, dan bukan kata *wanita*. Konon, kata *perempuan* dianggap berasal dari *mpu* atau *empu*, dua kata yang mungkin berasal dari Jawa itu, karena Sansekerta tidak punya penjelasan semacam itu. Kata *wanita* dan *perempuan* masih dipakai secara berganti-ganti dalam karya sastra. Selain Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, juga Pramoedya menggunakan kata *perempuan* dan *wanita*.

Semua kamus Indonesia bahkan menempatkan kedua kata ini sebagai sinonim. Kurang apa kerasnya kritik para feminis terhadap pemakaian kata *wanita*, tapi tidak juga kata ini mati. Apakah memang ada pengaruh pemakaian kata *betina* dan *wanita* bagi proses kesadaran gender (atau gender) dan feminisme? Aku rasa tidak. Kurang apa feminisnya Ayu

dan Djenar. Kurang apa semangat emansipasi wanita Kartini yang berpengaruh dalam novel-novel Pram.

Mari kita lihat kembali pengertian *betina*, *perempuan*, *wanita*, dan kosokbalinya: *jantan*, *lelaki*, dan *pria*. Kata *betina* sudah semestinya dikubur. Sementara itu, kata *perempuan* dan *wanita*, jika kita telusuri dari sejarahnya, kata *perempuan* jauh lebih dahulu digunakan dalam komunikasi keseharian dan tulisan, bukan kata *wanita*. Kartini menyebut emansipasi *wanita*, ormas PKI menyebut *Gerwani*, sebuah organisasi yang berada dalam kendali feminisme sosialis.

Sampai hari ini, belum ada ahli bahasa yang menemukan asal-usul kata *perempuan* secara pasti. Tidak benar bahwa kata perempuan bisa dihubungkan secara tegas dengan kata *empu* dengan pengertian yang bulat. Slamet Muljana (1964) begitu kewalahan mencari arti dan muasal kata *perempuan* dalam berbagai khazanah.

Akhirnya, ia pun menarik kesimpulan sementara yang bersifat kemungkinan: Kata *perempuan* adalah kata benda yang mungkin berasal dari kata *Khmer*, *prapon*, *female* dalam bahasa Inggris. Kata *women* sering diterjemahkan *perempuan*, tapi tidak kalah pasnya juga bila dialihbahasakan menjadi *wanita*.

Dalam *Kamus Inggris-Indonesia* karya John M. Echols dan Hassan Shadily sampai cetakan ke-20 (1994), masih menggunakan *wanita* dan *perempuan* secara sinonim. Bahkan, hampir semua kamus kita, termasuk yang terbaru kamus *Tesaurus Bahasa Indonesia* karya Eko Endarmoko. Karena dalam kamus dua kata itu masih digunakan sebagai kata sinonim, mestinya tidak terjadi apa yang Oyos katakan dan di sini saya tanyakan. Para ahli bahasa tidak pernah satu pendapat. Elizabeth Janeway (1977: 17) memberi anotasi untuk kata *female* sebagai *perempuan*, yaitu sebagai *pe(ng)rumah*. Dengan kata lain, *perempuan* merupakan bagian dari suatu ke-

hidupan rumah dan terpisah dari dunia luar rumah. Sementara itu, kata *wanita*, kata Elizabeth, mengandung pengertian gerakan pembebasan.

Wanita tidak mesti menjadi ibu karena pengertiannya tidak langsung berhubungan dengan menghasilkan anak. Kata *wanita* sendiri berasal dari Sansekerta, *vanita*. Namun, dalam bahasa ini tidak digunakan sebagai penunjuk jenis kelamin. *Vanita* bermakna harapan, pelaku, pencinta. Ini pendapat Umar Junus.

Dari keterangan itu tampak bahwa pengertian *wanita* lebih dekat dengan misi kaum feminis. Feminisme sosialis selama ini justru memperjuangkan kaum hawa tidak mesti harus menjadi "ibu" atau "ibu rumah tangga" karena seperti sudah dikatakan pengertiannya tidak langsung berhubungan dengan menikah dan memiliki anak. Feminisme radikal bertujuan agar wanita tidak terikat proses produksi.

Gerakan feminisme memberontak terhadap ke-perempuan-an, bukan memberontak terhadap ke-wanita-an. Kata yang lebih pas dari semangat ini jelas kata *wanita*. Namun, karena gerakan politik Orde Baru telah melacurkan kata ini, kata *perempuan* dianggap lebih tepat.

BAHASA DAN NASIONALISME

Yulfi Zawarnis

Madras mengingatkan kita pada sebuah wilayah di India Selatan yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Nama wilayah ini kembali mencuat di beberapa negara di Asia terkait masalah rasial. Di Medan, baru-baru ini masyarakat Indonesia asal Madras, India Selatan, ini menggelar pesta rakyat untuk merayakan perubahan nama Kampung Keling, yang identik dengan mereka, menjadi Kampung Madras.

Sebuah artikel di media massa Ibu Kota pernah menuliskan bahasa tidak saja sebagai alat komunikasi, tetapi juga mampu menusuk perasaan dan membuat sekelompok masyarakat merasa tersingkir oleh kesinisan yang terkandung di dalamnya.

Lalu apakah kaitannya dengan perubahan nama *Kampung Keling* menjadi *Kampung Madras*? Menurut tokoh warga Tamil di Medan, sejatinya, istilah *keling* merujuk pada kekuasaan Raja Kalingga (di India).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat istilah *keling* sebagai orang berkulit hitam yang berasal dari India sebelah selatan. Istilah *keling* bertukar menjadi istilah yang menghina sejak pertengahan 1970-an. Perlahan istilah *keling* mulai diasosiasikan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kulit hitam legam lebih ditonjolkan dibanding dengan kele-

bihan yang dimiliki kelompok masyarakat ini. Gaya hidup yang suka bermabuk-mabukan dan premanisme mulai diidentikkan dengan mereka.

Atas dasar itulah kemudian kelompok masyarakat ini berinisiatif mengganti sebutan *keling* menjadi *madras*. Perubahan ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi sampai ke negara-negara di Asia lain yang masih menggunakan istilah *keling*, seperti Malaysia dan Singapura.

Bahasa memang "organ vital" kemanusiaan. Pada zaman reformasi, kita masih ingat sekelompok orang yang menolak disebut *Cina* karena menurut mereka istilah itu bernada sinis, menghina, kasar, dan bermakna negatif. Lalu media massa tidak lagi menuliskan istilah itu dan menggantinya dengan *China*, *Tiongkok*, atau *Tionghoa*. Lalu apa bedanya ketiga istilah ini?

Menurut pakar bahasa Mandarin, Dr. Hermina Sutami, kata *Cina* tidak berasal dari bahasa-bahasa negara *China* melainkan dari bahasa Sansekerta, *China*, yang berarti daerah pinggir. Kata *Cina* itu sendiri digunakan menamakan negara yang berbudaya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Cina* adalah 'sebuah Negeri di Asia; Tiongkok'. Istilah *Tionghoa* dan *Tiongkok* ini sudah muncul di Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno dan pada masa Presiden Soeharto diganti menjadi *Cina*.

Rasanya menjadi tidak beralasan jika istilah *Cina* dianggap lebih bermakna negatif dibanding dengan istilah *China*. Bukankah kedua istilah ini sama saja? Namun, *Cina* merupakan bahasa Indonesia dan *China* merupakan bahasa asing. Pun demikian dengan istilah *keling* yang memang makna aslinya tidak memiliki konotasi yang buruk sedikit pun.

Jika kemudian muncul asosiasi yang negatif terhadap kata atau istilah yang bermakna netral, seperti *keling* dan

Cina ini, tentunya perlu pertimbangan yang matang untuk menggantinya. Masyarakat kita memang berasal dari berbagai suku dan bangsa, tetapi kita satu dalam Indonesia. Masalah bahasa tidak semata masalah rasa dan anggapan, tetapi juga masalah citra diri, identitas, dan nasionalisme.

SERANGAN FAJAR

Asarpin

Kata *serangan fajar* dipopulerkan Arifin C. Noor lewat drama tiga babak yang kemudian difilmkan dengan judul *Serangan Fajar*. Film dengan tokoh seorang anak bernama Temon ini mengisahkan tentang perang kemerdekaan yang berlangsung dini hari.

Kini, begitu sering orang menyebut *serangan fajar*. Kata *fajar* sendiri merupakan 'cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada waktu matahari mulai terbit'. Ini definisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* edisi kedua. Definisi ini cukup tepat, mengingat setiap cahaya pertama dimulai dengan *fajar*. Sementara *matahari* berbeda dengan *fajar*.

Setiap *fajar* memesonakan dengan sinarnya yang singkat. Beberapa saat kemudian akan muncul *matahari* dengan cahaya lebih panjang dan *tunggal*, sering terlalu cerah hingga membuat kita merasa gerah.

Dalam konteks nasionalisme, *fajar* adalah 'sebuah kebangkitan awal sebelum datangnya nasionalisme kemerdekaan'. Karena *fajar* hanya membawa cahaya yang pendek, sifatnya adalah sebuah permulaan yang rentan karena akan segera digantikan oleh terang yang panjang, yaitu *matahari*.

Ketika tentara Indonesia menyerang pasukan Belanda saat dini hari, tak ada pikiran lain yang terlintas ketika orang menyebut *serangan fajar*. Ketika mendengar sebuah film ber-

judul *Serangan Fajar*, yang terlintas adalah film perjuangan kemerdekaan. Ungkapan metaforis ini memang merdu dan elok terdengar.

Orang Indonesia memang pintar membuat metafora. Sebagian besar kita memang tidak didik dalam disiplin bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan kata sering tidak hirau pada kesalahan, yang penting terdengar merdu atau gagah. Sekarang ini, kalau orang mengucapkan *serangan fajar*, semua orang mungkin paham maksudnya; yakni berhubungan dengan suap politik dalam konteks pemilihan kepala daerah mulai dari kepala desa sampai gubernur.

Aneh bin ajaib! Tiba-tiba dari soal nasionalisme, perang kemerdekaan, ke film, dan ke proses penyusunan dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), banyak hal yang berubah, tetapi penggunaan kata tidak berubah. Yang dipakai tetap *serangan fajar*, walau maksudnya adalah penyusunan, atau proses mendatangi rumah-rumah untuk memberi uang sogok agar memilih calon si A atau si B.

Apa betul dalam Pilkada Lampung hari ini ada *serangan fajar*? Apa memang ada salah seorang calon gubernur Lampung yang mendatangi rumah-rumah masyarakat Lampung untuk melawan? Bukankah kata *serangan* adalah kata kerja, yang berarti 'menyerang'. Makna *serangan fajar* tidak sesuai dengan makna idiom *serangan* dan *fajar* dalam KBBI.

Kamus ini mendefinisikan serangan sebagai 'perbuatan menyerang (menyerbu)'. *Serangan* adalah kata lain dari agresi, serbuan, gempuran atau hantaman. Kata *serang* atau *menyerang* sendiri bermakna 'mendatangi untuk melawan, melukai, memerangi'. *Serangan fajar* artinya 'mendatangi untuk menyerang fajar!'

Apakah ini bentuk perluasan makna atau justru penyimpangan makna? Diterima-tidaknya makna baru *serangan fajar* itu tergantung pada praktik, kebiasaan, serta keya-

kinan yang diterima umum. Agaknya kata *serangan fajar* di-am-diam sudah biasa digunakan dan diterima umum begitu saja. Bisa jadi *KBBI* tidak terlalu tepat mendefinisikan *serangan fajar*. Karena walau sebuah kamus adalah buku pintar, masih juga ada yang salah. Banyak penyair yang mencaci-maki kamus bahasa Indonesia. Menganggap kamus membelenggu kreativitas. Tetapi, dalam hal ini, masih perlukah kita berapologi?

Kekeliruan menggunakan bahasa memang sering terjadi. Makna kata begitu rentan. Mengalami perubahan-perubahan. Hubungan antara penanda dan petanda dalam linguistik memang bersifat arbitrer. Penanda ini tidak ada kepastian menunjukkan petanda itu.

Makna *serangan fajar* bisa jadi tidak ada keharusan menunjukkan *proses menyerang fajar*.

Lagi pula, bahasa itu sendiri berwatak manasuka, seperti kata Eko Endarmoko. Juga bisa menunjukkan watak si pengguna bahasa. Para aktivis dan dosen serta penulis, anehnya justru ikut-ikutan menggunakan bahasa yang sudah jelas kacau dan keliru. Tapi sayang, *serangan fajar* adalah kekacauan dan kekeliruan yang tak mengandung berkah!

GRAHA, PONDOK, REGENCY...

Yulfi Zawarnis

Jakarta dan wilayah sekitarnya terus berbenah untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan yang nyaman bagi masyarakat. Sarana transportasi, tempat hunian, sampai pusat-pusat perbelanjaan terus dibangun untuk mencapai tujuan ini.

Alhasil muncullah nama-nama seperti *Transjakarta busway*, *ITC (international trade centre)*, *Cibubur Junction*, hingga *Depok Regency*, *Depok Town Square*, *Bogor Town Square*, *Bogor Nirwana Residence* yang dilengkapi dengan *The Jungle*-nya, dan *Bogor Trade Mall*.

Para pengembang dan pengusaha pusat perbelanjaan dan perumahan beralasan menggunakan nama-nama berbahasa asing untuk meningkatkan citra sehingga terkesan mewah dan metropolis.

Kalau saja nama-nama itu diubah misalnya menjadi *jalur bus Transjakarta*, *pusat perdagangan internasional*, *Simpang Cibubur*, *Depok Indah* atau *Wisma Depok*, *Pusat Perdagangan dan Hiburan Depok*, *Rumah Huni Bogor Nirwana*, dan *Pusat Perdagangan Bogor*.

Tentunya nama-nama seperti *Citra Garden* juga bisa diubah menjadi *Taman Citra Indah*. Pun demikian *Simpur Centre* diubah menjadi *Pusat Perdagangan Simpur*.

Sebetulnya beberapa tahun yang lalu para wakil rakyat pernah mengusulkan untuk mengganti nama-nama yang bernuansa asing menjadi lebih Indonesia.

Untuk itu, beberapa pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat pernah diubah namanya, misalnya *Pondok Indah Mall* diganti menjadi *Mal Pondok Indah*. Entah mengapa peraturan itu hanya diterapkan sesaat dan sekarang kita kembali melihat menjamurnya penggunaan nama-nama yang berbahasa asing.

Alih-alih berkurang, gejala ini bahkan menjalar hingga ke kota-kota kecil di Indonesia, semisal Lampung.

Ada apa dengan semua ini? Apakah alasan untuk keperluan menarik konsumen yang berkelas sosial tinggi dapat diterima? Ataukah mungkin hanya untuk gagah-gagahan.

Rasanya tidak masuk akal karena tempat-tempat yang menggunakan bahasa Indonesia pun dapat menjadi tempat yang berkelas jika memang tujuan utama pembangunannya adalah untuk orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi.

Beberapa perumahan mewah dan pusat perbelanjaan tetap dengan citra diri yang baik walaupun nama yang digunakan berbahasa Indonesia. Penggunaan nama *pondok*, *wisma*, *graha*, *pusat grosir*, *pusat perdagangan*, atau *pusat perbelanjaan* rasanya juga memiliki nilai rasa yang baik sehingga opini masyarakat pun akan tetap baik bila mendengar nama-nama ini.

Belum lagi selesai masalah membanjirnya penggunaan nama-nama yang berbahasa asing, nama-nama yang berbahasa Indonesia muncul dengan tetap mempertahankan struktur bahasa asing, terutama Inggris.

Contoh yang paling terkini adalah pembangunan *banjir kanal timur* dan *banjir kanal barat*. Jika pembuat istilah ini mau berpikir lebih logis tentunya yang muncul bukan *banjir*

kanal timur, melainkan *kanal banjir timur*. Bukankah dalam bahasa Indonesia kata yang kedua menjelaskan kata sebelumnya?

Oleh Sutan Takdir Alisjahbana gejala ini dirangkum sebagai hukum D-M (diterangkan-menerangkan). Jadi bila ada kata majemuk *lorong waktu*, *waktu* berfungsi untuk menerangkan *lorong*. Semua orang pasti setuju jika *lorong waktu* diubah menjadi *waktu lorong* akan terdengar aneh dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Jika alasan ini dapat diterima, kita akan serempak dapat mengatakan *banjir kanal timur* merupakan susunan kata majemuk yang tidak tepat.

Bukankah *kanal* berarti 'saluran' sehingga jika kita menggantinya menjadi *banjir saluran timur* baru terasa kalau susunan kata majemuk ini tidak tepat. Pelestarian bahasa Indonesia sebagai identitas kita tentunya menjadi tanggung jawab setiap orang sehingga kita akan berpikir dahulu sebelum berbicara bukan berbicara dahulu baru berpikir.

"PESEPAK BOLA MASUK NERAKA"

Adian Saputra

Judul tulisan ini memang mengerikan. Tapi, sengaja dibuat dengan tanda kutip untuk menjelaskan bahwa yang disampaikan tidaklah makna aslinya. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca artikel sederhana ini hingga tuntas.

Beberapa waktu lalu istri saya berujar bahwa semua pesepak bola akan masuk neraka. Saya kemudian bertanya mengapa demikian. Istri saya menjawab semua pesepak bola memiliki polah yang tidak baik. Dia mencontohkan agar mendengar suara komentator setiap pertandingan sepak bola. Pasti yang terdengar "mengecoh lawan", "memperdaya kiper lawan", dan "menipu pemain belakang lawan". Saya dan istri kemudian tertawa bersama karena yang dikatakan istri saya sebatas ujaran konteks bercanda.

Namun, jika kita amati ucapan komentator sepak bola, umumnya memang demikian. Mereka lebih senang menggunakan kata-kata yang konotasinya buruk, padahal yang dilakukan setiap pemain sesuai dengan konteksnya di lapangan.

Coba kita simak arti asli beberapa kata berikut dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Mengecoh artinya 'menipu, mengakali terutama dengan cara yang kurang baik'. Memerdaya berarti 'melakukan tipu muslihat'. Sementara itu, menipu memiliki 'arti mengenakan tipu muslihat'. Semua

makna dari tiga kata itu buruk. Sebetulnya bisa saja kalimat yang disampaikan tidak demikian. Saya memberi beberapa contoh: menaklukkan kiper lawan, melewati pemain belakang tim lawan, dan lolos dari adangan bek lawan.

Dalam berucap secara langsung umumnya kita sulit mengatur kata apa yang akan diucapkan. Kadang-kadang dengan ringannya kata dan kalimat itu keluar dari lisan kita. Dalam percakapan sehari-hari, mungkin tidak ada masalah. Namun, ketika dia ada dalam ruang publik, radio, dan televisi, misalnya, tentu akan memengaruhi pendengar.

Kosakata pendengar yang insya Allah sebagian besar tidak memiliki kamus, akan bertambah sesuai dengan apa yang mereka dengar. Maka, begitu kata *mengecoh*, *memerdaya*, dan *menipu* masuk benak mereka, yang akan terekam adalah perilaku yang buruk.

Media massa kita juga demikian, terutama media cetak. Konteksnya tidak serupa dengan tiga kata di atas, tapi masih ada kaitan. Misalnya, ketika tim nasional kita kalah besar, judul yang dibaca pembaca cukup hiperbola (berlebihan). Misalnya: Tim nasional kita dibantai Thailand dan Timnas Indonesia dicukur Vietnam. Di Malaysia, sebagaimana saya baca dalam pojok *Resonansi Republika* beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa di sana, jika tim nasionalnya kalah, judul yang tertera cukup sopan. Meski dikalahkan dengan skor mutlak, pilihan judul berita surat kabar Malaysia cukup dengan "Tim Nasional Kita Kalah".

Sebetulnya juga tidak mengapa kata-kata itu dipakai asal sesuai dengan konteksnya. Namun, jika lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata itu, jelas lebih baik. Apalagi, kalau pembawa acara liputan soal gosip di media massa lebih sopan dalam berkata-kata, lebih sedap tentunya.

SELAMAT IDULFITRI

Agus Sri Danardana

Umat Islam di seluruh dunia akan menyambut datangnya hari raya pada 1 Syawal 1429 (Hijriah), yang diperkirakan bertepatan dengan 1 Oktober 2008 (Masehi) nanti. Di Indonesia, secara nasional, hari raya umat Islam itu sekurang-kurangnya memiliki tiga nama/sebutan: *Idulfitri*, *Hari Raya Puasa*, dan *Lebaran*. Secara lokal/regional, hampir setiap kelompok masyarakat (etnis) memiliki sebutan sendiri-sendiri untuk hari raya itu. Beberapa di antaranya adalah *ba(k)da*, *riyadin* (Jawa), *aidilfitri* (Melayu), dan *boboran* (Sunda).

Dalam merayakan hari raya itu, umat Islam pun memiliki tata cara yang tidak sama. Konon, kegiatan utama umat Islam di Mesir pada hari raya itu adalah saling mendoakan, bukan saling memaafkan. Doa mereka itu, antara lain, berbunyi: *Kullu sanadin wa antum toyibin dan kullu aaman wa antum bikhoir* yang artinya lebih kurang: Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali suci dan berhasil. Di samping itu, ternyata mereka juga tidak menggunakan kata *idulfitri* sebagai ucapan selamat, seperti di Indonesia.

Pada umumnya, umat Islam (dan umat agama lain) di Indonesia menggunakan nama/sebutan hari raya menjadi bagian ucapan selamat hari raya. Ucapan-ucapan selamat, seperti "Selamat Hari Raya Idulfitri", "Selamat Hari (Raya)

Natal", dan "Selamat Hari Raya Nyepi", sangat lazim digunakan orang.

Pertanyaannya sekarang adalah sudah benarkah bunyi ucapan selamat itu? Masih perlukah kata hari raya disebut sebelum Idulfitri, Natal, dan Nyepi?

Hari raya pada hakikatnya sama artinya dengan *idul*. Karena sama arti, keduanya (*hari raya* dan *idul*) jangan digunakan bersamaan. Pilih salah satu: *hari raya* atau *idul* agar tidak terjadi kelewahan dan menimbulkan kemubaziran. Dengan demikian, ucapan selamat yang benar pada hari raya umat Islam nanti adalah "Selamat Idulfitri", "Selamat Hari Raya Fitri", atau "Selamat Lebaran", bukan "Selamat Hari Raya Idulfitri", atau "Selamat Hari Lebaran". Begitu pula pada hari raya umat Kristen dan Hindu, cukup diucapkan "Selamat Natal" dan "Selamat Nyepi".

Kelewahan adalah penggunaan kata secara berlebih. Kehadiran kata itu sesungguhnya tidak terlalu diperlukan sehingga, jika dihilangkan, tidak akan mengganggu informasi yang disampaikan. Biasanya, kelewahan terjadi akibat penggunaan kata yang bersinonim (sama arti) secara sama-sama, seperti *agar supaya, demi untuk, seperti misalnya, dan adalah merupakan*, di samping ucapan "Selamat Hari Raya Idulfitri", tentunya.

Meskipun demikian, ada kalanya kelewahan terjadi akibat penggunaan kata yang maknanya secara tersirat sudah terdapat pada kata berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini.

- (1) Ia akan menikah pada (hari) Jumat, (tanggal) 10 Maret 2009.
- (2) Setiap (bulan) Ramadan ia selalu mengadakan acara berbuka bersama.

Kata-kata yang berada di dalam kurung: *hari*, *tanggal*, dan *bulan* pada kalimat (1) dan (2) tergolong kata yang lewah dan mubazir. Tanpa kehadiran kata-kata itu, informasi yang terdapat pada kalimat (1) dan (2) tidak terganggu, bahkan terasa lebih efektif.

Demikianlah, ternyata dalam berbahasa pun kelewahan dan kemubaziran itu sering terjadi. Sebagai bangsa yang beragama, kita tentu mengetahui bahwa kelewahan dan kemubaziran itu tidak disukai Allah. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjauhinya, tidak terkecuali ketika dalam berbahasa. Selamat Idulfitri.

MENCONTENG ATAU MENCENTANG

Adian Saputra

Pada Pemilihan Umum 2009 mendatang, Komisi Pemilihan Umum berkeinginan agar saat memilih, masyarakat melakukan dengan menconteng atau mencentang. Maksudnya memberikan tanda dengan spidol pada kotak berlambang partai atau pada daftar nama calon anggota legislatif (caleg).

Para anggota KPU berharap cara yang baru ini berjalan dengan baik. Hasil simulasi yang beberapa hari lalu dilakukan menunjukkan bukti kalau masyarakat tidak sulit menconteng dan mencentang.

Karena ini kolom bahasa, marilah sejenak membuka kamus untuk melihat makna dua kata yang sedang populer itu — minimal di kalangan KPU.

Menconteng dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti 'mencoreng dengan arang'. Sedangkan makna *conteng* sendiri ialah 'coret dengan jelaga'. Ya kalau mau diperluas, *menconteng* ini memberikan tanda pada sebuah media. Jika untuk ruang lingkup pemilu, ya memberi tanda pada gambar partai atau nama calegnya.

Sedangkan *mencentang* bermakna 'membubuhi coretan pada tulisan'. Biasanya tandanya seperti huruf v atau seperti lambang produk olahraga — tanpa bermaksud promosi — Nike.

Kedua kata itu dalam pembahasan soal pemilihan umum, menurut saya, sama benarnya. Jika *Kompas* memakai pula kata *contreng*, hingga kamus yang ada saya buka dengan teliti, tak ada kata itu di dalamnya. Mungkin redaksi *Kompas* punya dasar tertentu sehingga memakai istilah itu, selain *mententang* dan *menconteng*.

Tapi, kita juga harus hati-hati karena *mententang* juga berarti 'memukul atau menempeleng'. Wah, jangan sampai gara-gara salah istilah, bukannya memilih wakil rakyat, memilih malah baku hantam. Insya Allah hal itu tidak terjadi ya.

Centang juga bisa berarti 'berantakan dan malang melintang'. Kalau dipikir-pikir, konotasinya negatif ya? Mudah-mudahan bukan tanda yang buruk perihal centang-mententang ini.

Yang penting untuk dilalukan oleh KPU tentu saja sosialisasi bagaimana *mententang* atau *menconteng*. Juga harus jelas bagaimana tandanya *mententang* atau *menconteng*. Bagaimana masyarakat menandai juga harus jelas. Jadi, saat di bilik suara, mereka tidak aneh lagi dengan kehadiran spidol di tangan. Jangan sampai masyarakat tidak mengerti, mau diapakan *nih* spidol di tangan.

Karena cara yang diberlakukan baru, tentu saja mengandung kemungkinan salah dalam memilih. Cara *men-coblos* yang lama dipakai di republik ini tentu mendarah daging. Apalagi kita kenalnya kata *mencoblos*, *hari pencoblosan*, *coblos*, dan sebagainya yang serupa dengan *coblos*.

Mohon izin saya menambahi naskah ini yang rada jauh kaitannya dengan perihal bahasa.

Menurut hemat saya, karena *mencoblos* sudah demikian akrab dikenal di Indonesia, sistem yang baru ini pasti punya peluang sulit dilakukan. Di pelosok negeri, hakulyakin orang lebih kenal istilah *mencoblos*.

Apalagi—semakin jauh nih—dengan *mencentang* atau *menconteng* itu bukti bahwa pemilih sudah menyalurkan haknya, mudah dihilangkan. Apalagi kalau dana pengadaan spidolnya dikorupsi. Bisa-bisa setengah hari saja tanda *centangan* atau *contengan* hilang lantaran kualitas spidolnya rendah. Beda dengan *dicoblos* yang tembus. Risiko adanya penyelewengan lebih kecil.

Ya, ini sekadar artikel bahasa yang sederhana digabung dengan secuil analisis supaya lebih gurih dibaca.

Jika kembali ke soal *menconteng* atau *mencentang*, keduanya, karena maknanya diperluas, ya sah saja. Insya Allah bisa dipakai. Tapi, apakah dua kata itu akan sepopuler *mencoblos*, *wallahualam bissawab*.

HALO COACH

Oyos Saroso H.N.

Sebagai penggemar sepak bola, akhir-akhir ini saya sering terganggu siaran langsung sejumlah pertandingan *Indonesia Super League (ISL* atau Liga Super Indonesia) di Antv. Yang mengganggu bukan pertandingan-nya yang acap diwarnai adu jotos, melainkan sejumlah wawancara reporter sebelum pertandingan dimulai.

Ketika mewawancarai pelatih PSIS Bambang Nurdiansyah, Minggu (12/10), misalnya, Nesya dari Antv, langsung memberondong dengan pertanyaan "Halo, apa kabar *coach (kowc)*? Strategi apa yang *coach (kowc)* akan terapkan dalam pertandingan melawan PSM? Apa harapan *coach (kowc)* dalam pertandingan nanti?"

Kata *coach* (pelatih) tidak hanya berhambur pada siaran langsung pertandingan sore itu. Pada sejumlah pertandingan lain, kata itu juga sering diucapkan pembawa acara dan reporter Antv.

Dalam berbagai tulisan dan laporan jurnalistik di televisi sejak dahulu kita lebih sering mendengar kata pelatih untuk menyebut orang yang melatih atlet atau sebuah tim olahraga. Setahu saya, hanya reporter Antv yang akhir-akhir ini sering memakai kata *coach*. Untunglah, para pelatih yang disebut sebagai *coach* oleh si reporter justru lebih memilih kata *pelatih* untuk menyebut dirinya. Itu pula yang diucap-

kan Bambang Nurdiansyah ketika menjawab pertanyaan reporter, "Sebagai pelatih saya menginstruksikan anak-anak (maksudnya para pemain PSIS) untuk bermain maksimal."

Sampai di sini sebenarnya persoalannya jelas: pemakaian kata *coach* dalam laporan pertandingan sepak bola di Antv lebih disebabkan keinginan (mungkin tanpa sengaja) si reporter. Lawan bicara (orang yang diwawancarai) maupun para penonton televisi meskipun tahu bahwa *coach* berarti 'pelatih' tetap menganggap kata *pelatih* lebih akrab di telinga.

Kata *coach* terasa sumbang di telinga. Mungkin si reporter sudah terlalu lama di luar negeri sehingga lebih akrab dengan kata *coach* dan tidak tahu bahwa kata itu belum masuk kamus bahasa Indonesia? Mungkinkah kata-kata itu dipakai sebagai imbas banyaknya pemain asing di sejumlah kesebelasan di Indonesia? Atau, mungkinkah kata *coach* untuk mengimbangi penginggrisan *Liga Indonesia* yang kini menjadi *Indonesia Super League*?

Mestinya, kita tidak berkenes dan bergagah ria memaksakan diri memakai kata dan istilah asing. Jangan lupa, bahasa-bahasa di Nusantara dari Papua hingga Nangroe Aceh Darussalam masih banyak yang "menganggur" (meminjam istilah Sujiwo Tejo). Akan lebih baik jika kita menggali dan mengambil kata-kata dari bahasa daerah itu ketimbang bahasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Memang, bahasa Indonesia selama ini sangat akomodatif terhadap pengaruh bahasa asing. Bahkan, munshi Remy Silado pernah menyinyalir 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa asing. Bahasa asing itu menjadi tidak asing dan berterima dalam tata bahasa Indonesia karena frekuensi pemakaiannya tinggi dan sudah mengalami asimilasi.

Dalam proses penyerapan dan penerimaan bahasa itu, tentu terjadi "pertarungan". Bahasa yang kuat, karena jumlah penuturnya besar atau karena faktor bisa menaikkan gengsi penuturnya, akan memiliki peluang untuk menang. Itulah sebabnya kata-kata dalam bahasa Jawa, Sunda, Arab, Inggris, atau Tionghoa, misalnya, lebih banyak diserap bahasa Indonesia ketimbang kata-kata dari suku-suku di Papua atau Maluku.

Kita mafhum, sebagai media tontonan, bahasa televisi harus luwes dan terbuka terhadap kata-kata kolokial, slang, dan prokem. Apalagi, memang, bahasa Indonesia sendiri terbentuk dari berbagai serapan bahasa asing (dan bahasa Nusantara). Namun, tertib berbahasa juga harus menjadi perhatian utama. Televisi (dan media massa cetak) seharusnya menjadi ujung tombak pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.

Dalam pemakaian bahasa, bangsa Indonesia mestinya belajar dari orang Prancis atau Belanda. Dua negara Eropa itu masyarakatnya bangga memakai bahasa mereka sendiri daripada bahasa Inggris. Sebaliknya, kita di Indonesia, justru rajin mempertontonkan bahasa asing (yang masih asing) di jalan raya, pusat perbelanjaan, iklan, hingga seminar.

MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN

Agus Sri Danardana

Judul tulisan ini dikutip dari teks asli Sumpah Pemuda (butir ketiga) yang berbunyi: Kami putera dan puteri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Entah apa sebabnya, pernyataan sikap kebahasaan: menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu oleh banyak orang telah diubah menjadi sebuah pengakuan: berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Ada perbedaan mendasar antara pernyataan sikap: menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia dan pengakuan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Pernyataan sikap menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia mengimplikasikan adanya pengakuan atas keberadaan bahasa-bahasa lain (daerah dan asing) di Indonesia.

Sebaliknya, pengakuan berbahasa satu, bahasa Indonesia justru mengimplikasikan adanya penolakan atas keberadaan bahasa-bahasa lain (daerah dan asing) di Indonesia. Dengan demikian, mengubah pernyataan sikap kebahasaan: menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi sebuah pengakuan: berbahasa satu, bahasa Indonesia tidak hanya menyalahi teks asli Sumpah Pemuda, tetapi juga mengkhianati bangsa Indonesia, karena telah membelokkan arah politik bahasa nasional.

Harus diakui, terpaan arus globalisasi dan berembusnya gerakan reformasi telah menciptakan paradoks pada dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Globalisasi dan reformasi itu, ternyata, tidak hanya telah membuat masyarakat menjadi semakin seragam (homogen), tetapi juga telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia (terhadap identitas, citra diri, hingga nilai-nilai hidup) berubah.

Bangsa Indonesia sudah tersihir untuk selalu mengagumi segala hal yang berbau asing, tidak terkecuali dalam berbahasa. Lihatlah, betapa riuhnya kata-kata asing (terutama Inggris) telah menghiasi semua bentuk komunikasi bangsa ini. Celakanya, kata-kata asing itu berjejal tidak mewakili konsep-konsep baru, tetapi berjejal menggusur kata-kata yang sudah ada. Kata *pertemuan*, *istirahat*, dan *kudapan*, misalnya, saat ini semakin jarang disebut orang, karena kata-kata itu telah digusur oleh kata *meeting*, *break*, dan *snack*.

Atas kenyataan itu, agar tidak musnah terbawa arus global, mau tidak mau bangsa Indonesia harus mempertebal rasa nasionalismenya, membangun keindonesiaan tanpa harus mengorbankan keserbamultiannya. Bangsa Indonesia harus terus berlari mengejar kemajuan, tetapi tidak boleh kehilangan jati diri agar bangsa lain tetap dapat mengenalinya. Salah satu ciri keindonesiaan itu adalah bahasa Indonesia.

Lahirnya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif (sebagaimana dikehendaki pemerintah, melalui visi Depdiknas) sesungguhnya dapat dimulai dari penanganan masalah kebahasaan. Dalam konteks Indonesia, manusia yang cerdas itu setidaknya dapat digolongkan ke dalam tiga kompetensi: lokal, nasional, dan internasional. Jika dikaitkan dengan kemampuan berbahasa, dapat dikatakan manusia cerdas berkompetensi lokal sesungguhnya cukup menguasai bahasa daerah tempat tinggalnya.

Ia baru akan menjadi manusia cerdas berkompetensi nasional jika menguasai pula bahasa Indonesia. Begitu seterusnya, ia baru akan menjadi manusia cerdas berkompetensi internasional jika menguasai pula bahasa asing. Dengan demikian, manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif itu adalah manusia Indonesia yang berjati diri. Di tingkat nasional, ia dapat dikenali kelokalannya. Di tingkat internasional, ia dapat dikenali keindonesiaannya.

Demikianlah, seiring dengan datangnya era globalisasi seperti sekarang ini, bangsa Indonesia perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang kebahasaan. Bangsa Indonesia cukup menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia (tidak perlu mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia), karena baik secara hukum maupun kenyataan mengakui keberadaan bahasa-bahasa lain, selain bahasa Indonesia.

Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, berarti menempatkan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lain itu. Dalam hal ini, bangsa Indonesia dapat meniru Jepang, Korea Selatan, dan China. Ketiga negara itu sangat bangga atas bahasanya. Dalam memberi penjelasan/aturan pakai produk-produknya, misalnya, mereka tidak hanya menggunakan bahasa negaranya, tetapi juga menggunakan aksara yang mereka miliki. Semoga.

POLITIK BAHASA DAN KITA

Oyos Saroso H.N.

Setiap peringatan Bulan Bahasa, saya selalu teringat saat-saat masih menjadi pelajar sekolah lanjutan tahun 1980-an di Jawa Tengah. Ketika itu, sekolah kami selalu mengadakan peringatan dengan mempraktikkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Benar berarti tepat pemakaiannya sesuai dengan keadaan atau situasi.

Pada pekan pertama semua siswa dan guru diharuskan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Pekan kedua semua harus memakai bahasa Jawa, pekan ketiga harus menggunakan bahasa Inggris, dan pekan keempat kembali bebas. Artinya, pada pekan keempat bahasa Jawa juga bisa digunakan jika sedang ngobrol di kantin atau di luar kelas.

Ada juga lomba pidato berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Meski lebih menyukai pelajaran Bahasa Indonesia, ketika itu saya justru menjuarai lomba pidato bahasa Jawa. Ya, mungkin bukan karena saya yang pintar berbahasa Jawa (*kromo inggil*), melainkan karena pesaing saya tidak biasa berbahasa Jawa halus.

Di rubrik ini, saya tidak ingin pamer kemahiran saya berbahasa Jawa. Saya hanya ingin mengajak Anda semua, pembaca budiman, tentang perlunya komitmen bersama se-

luruh elemen bangsa untuk kembali peduli dengan nasib bahasa Indonesia. Cerita tentang sekolah saya yang para gurunya sudah menyadari pentingnya praktik berbahasa Indonesia yang baik kini terasa menjadi hal mewah. Ya, kini saya sangat merindukan ada seorang Presiden Indonesia, gubernur, wali kota/bupati yang mengajak warganya mengembangkan bahasa Indonesia sembari mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seratus tahun lalu, ketika mengikrarkan Sumpah Pemuda, para pemuda pejuang kita menyadari betul bahwa bahasa harus diletakkan pada bingkai politik. Itulah sebabnya, para pemuda pejuang mengikrarkan "Bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Kalau kita hendak membesarkan bangsa dan negara Indonesia, dengan begitu, Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia harus dipahami sebagai sebuah kesatuan. Tidaklah mungkin kita disebut sebagai pembela Tanah Air tercinta jika bahasa nasional dibiarkan dijajah atau dirusak orang lain.

Pemerintah sudah menggariskan politik bahasa nasional yang juga menghargai keragaman bahasa daerah. Artinya, bahasa Inggris silakan menjadi bahasa pergaulan internasional dan bahasa-bahasa daerah di Nusantara terus dilestarikan para pemiliknya. Namun, pengembangan bahasa Indonesia harus menjadi agenda bersama bangsa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia kelak bisa menjadi bahasa modern yang menjadi jiwa bangsa yang menggerakkan seluruh kehidupan kebangsaan.

Banyak kalangan menyadari, bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru akan meluruh pula politik bahasa yang banyak dipengaruhi perpolitikan Orde Baru. Memang, pada beberapa kasus hal itu menjadi kenyataan. Isti-

lah-istilah lokal yang dahulu diseragamkan mulai diganti ke bentuk awal sehingga hidupkan kembali istilah *pekon* (Lampung) dan *nagari* (Sumatera Barat) yang selama Orde Baru disebut *desa*.

Pada sisi lain, bersamaan hilangnya politik penyeragaman dan penunggalan, lahirlah banyak kerancuan bahasa. Jika kita perhatikan papan-papan nama toko di sepanjang jalan utama di Bandarlampung, kita akan mendapatkan ratusan istilah yang membuat jidat berkernyit. Istilah asing dan Indonesia bertumpuk jadi satu.

Sepuluh tahun lalu kita tidak mendengar kata *Moka*. Kini, orang Lampung yang sepuluh tahun tidak pulang kampung akan bingung dijejali kata *Moka*. Kata orang (entah siapa orangnya), *Moka* adalah sebutan untuk *Mal (Mol) Kartini* (kalau diiinggriskan menjadi *Kartini Mall*). Kata *Moka* secara struktur sudah betul (diterangkan-menerangkan, DM). Namun, dengan diucapkan *Mol Kartini* dan disingkat *Moka* justru menjadi salah. Ah, mungkin, yang penting enak terdengar di telinga dan terasa keren.

Sampai hari ini pun masih banyak di antara kita bingung menentukan mana yang benar: *rumah dikontrakan* atau *rumah dikontrakkan*. Banyak juga yang masih keseleo mengucapkan *mempersilahkan*, bukan *mempersilakan*. Ada pula teman wartawan media cetak yang dibaca orang Lampung sering menulis kata *Walkot Beri Warning* ketimbang *Wali Kota Beri Peringatan*.

Ya, pada akhirnya pemertahanan bahasa Indonesia dan penerapan politik bahasa nasional bergantung pada masyarakat pemakai bahasa. Bagi penutur bahasa yang menghargai arti pentingnya nasionalisme, bahasa Indonesia akan dibuat tetap hidup, segar, dan menjadi citra diri yang membanggakan.

PESONA SASTRA

Agus Sri Danardana

Satu hal yang hingga kini masih mengganggu keharmonisan “rumah tangga” bahasa dan sastra adalah adanya anggapan bahwa antara bahasa dan sastra tidak saling menguntungkan. Dalam pembakuan bahasa, misalnya, sastra bahkan sering dianggap sebagai perusak bahasa. Pemakaian bahasa dalam (karya) sastra tidak dipandang sebagai hasil proses kreatif berbahasa pengarangnya, tetapi justru dicurigai dan dianggap sebagai suatu “keganjilan” berbahasa.

Isu ketidakharmonisan hubungan bahasa dan sastra seperti itu, rupanya, merebak pula di dunia pendidikan kita. Beberapa waktu yang lalu pernah muncul sebuah gagasan yang menghendaki pengajaran sastra, baik di SMP maupun SMA, dipisahkan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia — yang kebetulan sebagai mata pelajaran (induk) yang membawahkan pengajaran sastra — oleh sementara orang (kaum suka sastra) dituduh telah “mencaplok” jatah pengajaran sastra.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali isu ketidakharmonisan itu, tetapi untuk melihat lebih jauh hubungan yang sebenarnya antara bahasa dan sastra.

Hakikat Sastra

Jika sekarang ini masih ada anggapan bahwa sastra merupakan "perusak" bahasa, mungkin orang yang beranggapan seperti itu belum mengetahui hakikat sastra yang sesungguhnya: seni berbahasa. Sebagaimana seni-seni lainnya, sastra adalah karya kreatif. Karya sastra, dengan demikian, harus dipandang sebagai hasil kreativitas berbahasa pengarang.

Bahwa pada kenyataannya banyak ditemukan karya sastra yang memang amburadul bahasanya adalah sebuah keniscayaan. Pada dasarnya, pengarang adalah pengguna bahasa (Indonesia). Sama dengan pengguna-pengguna bahasa Indonesia lainnya, yang banyak tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak semua pengarang memiliki penguasaan bahasa Indonesia yang memadai. Artinya, meskipun harus disadari bahwa tidak semua karya sastra dapat mencerminkan kemahkotaan, hal itu tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membuat generalisasi (perampatan) bahwa sastra adalah perusak bahasa. Kenyataan bahwa masih banyak ditemukan karya sastra yang memang amburadul bahasanya membuktikan bahwa sebagai kreator, pengarang sesungguhnya tidak dapat berbuat semena-mena. Karena pada dasarnya hendak berkomunikasi dengan pembaca/apresiasi melalui tulisan/karyanya, pengarang harus tunduk mengikuti norma-norma yang ada dalam khazanah sastra dan budaya agar kreasinya itu dapat ditangkap dan dimaknai oleh apresiasi. Kreasi yang semena-mena (ekspresi simbolik yang terlampau subjektif dalam puisi-puisi gelap, misalnya) akan menyulitkan apresiasi dalam pemaknaan. Oleh karena itu, sastra (sebagai hasil kerja kreatif berbahasa dari sastrawan) justru mempunyai peluang yang sangat besar untuk dijadikan salah satu acuan dalam program perencanaan bahasa.

Mengapa demikian? Karena seorang pengarang pasti akan menggunakan bahasa yang menurutnya mantap sebab tanpa kemantapan itu ia tidak berhasil menjadi sastrawan. Artinya, setelah menulis, sastrawan pun berharap "kreasi" bahasanya dapat diterima, dipahami, dan bahkan dijadikan model berbahasa oleh masyarakat pembacanya.

Dalam hal ini, cara sastrawan dalam menyusun kalimat dan membuat uraian yang tepat dan lincah serta efisien dan memesona, misalnya, dapat dijadikan model pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Sekadar contoh, simaklah penggalan sajak *Doa* karya Chairil Anwar ini: *Biar susah sungguh/mengingat Kau penuh seluruh*. Pilihan kata susah sungguh pada baris I dan penuh seluruh pada baris II sungguh merupakan contoh penggunaan bahasa yang sangat baik. Kata-kata tidak hanya dapat memberi ketepatan makna yang diinginkan Chairil, tetapi juga dapat menampilkan suasana sepi dan khusyuk—yang justru mendukung makna—sehingga "kemahkotaan" bahasa itu terlihat dengan jelas. Plastisitas bunyi yang terungkap dari suasana keluh: (su)sah (sung)guh dan (pe)nuh (selu)ruh membuktikan hal itu.

Senyatalah bahwa sesungguhnya sastra, jika ditulis dengan bahasa yang benar-benar intens, tidak hanya dapat meningkatkan kualitasnya, tetapi juga dapat dijadikan model pemakaian bahasa yang baik dan benar.

KATAMSO WISATA KULINER

Oyos Saroso H.N.

Seorang perempuan bule yang pengetahuan dan pemahaman bahasa Indonesianya pas-pasan hendak membeli celana dalam di Pasar Proyek Senen, Jakarta. Kepada penjual pakaian (seorang pria asal Padang), si bule bertanya, "Pak, berapa harga dalam celananya?"

Penjual pakaian itu terkesiap. Bule itu bengong. Dengan gugup si uda itu menjawab, "Celana dalam memang saya jual, tapi dalam celana tidak!"

Kontan rona wajah bule perempuan itu memerah seperti udang rebus. Ia pun buru-buru meralat, "Maksud saya, saya mau membeli celana dalam. Berapa harganya?"

Itulah salah satu praktik kesalahan berbahasa karena kesalahan menerapkan hukum DM (diterangkan-menerangkan) dalam tata bahasa. Kesalahan yang membuat penuturnya malu. Bule itu tidak sepenuhnya salah karena dia biasa berbahasa di negaranya dengan pola MD (menerangkan-diterangkan).

Pemakaian hukum DM merupakan salah satu perbedaan mendasar antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain yang termasuk rumpun Austronesia dengan bahasa yang tergolong dalam rumpun Indo-Jerman (semisal bahasa Belanda dan bahasa Inggris). Di Indonesia kita menyebut *ba-*

ngunan sekolah (DM). Kalau diinggriskan menjadi *school-building* (MD). Sementara *kantor cabang* bahasa Inggrisnya menjadi *branch office*.

Sebagai orang Indonesia, sudah sewajarnya kita menguasai hukum DM dalam berbahasa. Kalau tidak akibatnya bisa berbahaya lantaran bisa bernasib seperti perempuan bule tadi. Cerita tentang perempuan bule mengingatkan saya pada perubahan wajah Kota Bandarlampung akhir-akhir yang banyak dihiasi dengan papan nama, spanduk, iklan, dan kawasan baru yang tidak asas pada hukum DM.

Sejak awal Februari 2008 lalu, kawasan Jalan Brigjen Katamso Bandarlampung, misalnya, menjadi Katamso Wisata Kuliner (KWK) itu. Di sana ada 20-an pedagang yang menjajakan aneka masakan. Kawasan itu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandarlampung dimaksudkan sebagai kawasan wisata kuliner.

Semula saya menyangka wartawan salah tulis ketika memberitakan tentang kawasan itu dengan menyebut Katamso Wisata Kuliner. Namun, ketika melihat sendiri kawasan itu dan melihat papan nama yang dipasang di ujung Jalan Brigjen Katamso, tahulah saya bahwa kawasan itu memang benar-benar bernama "Katamso Wisata Kuliner", bukan "Wisata Kuliner Katamso".

Saya perlu mengecek kebenaran tulisan "Katamso Wisata Kuliner" karena saya merasakan ada kejanggalan ketika membaca dan mendengar frasa tersebut. Terdengar janggal karena "Katamso Wisata Kuliner" adalah sebuah frasa berpola MD (menerangkan-diterangkan). Padahal, umumnya (dan ini menjadi hukum tata bahasa Indonesia) bahasa Indonesia lebih mengenal pola DM (diterangkan-menerangkan). Artinya, kata yang berada di belakang menerangkan kata yang berada di depannya. Kata yang diterangkan men-

jadi unsur utama frasa, sementara kata yang menerangkan menjadi unsur penjelas.

Dalam frase *Katamso Wisata Kuliner* unsur utamanya adalah *wisata kuliner*, sementara *Katamso* menjelaskan bahwa lokasi *wisata kuliner* itu berada di *Jalan Brigjen Katamso*. Kalau kawasan *wisata kuliner* itu berada di London atau New York, mungkin frasa *Katamso Wisata Kuliner* itu tidak salah menurut tata bahasa karena bahasa Inggris dan Amerika memang menganut pola MD. Tentu setelah diganti menjadi *Katamso Culinary Tour*.

Kalau taat asas pada tata bahasa Indonesia, seharusnya kawasan *wisata kuliner di Jalan Brigjen Katamso* itu bernama *Wisata Kuliner Katamso*. Artinya, kawasan wisata kuliner yang terletak di Jalan Brigjen Katamso. Selain benar menurut tata bahasa Indonesia, frasa *Wisata Kuliner Katamso* juga tidak terdengar sumbang di telinga dan tidak akan memalukan jika ada orang asing kebetulan datang ke tempat itu.

Mungkin saja frasa *Katamso Wisata Kuliner* dipakai dengan pertimbangan agar lebih bergengsi. Mungkin pula pembuat nama untuk kawasan itu memang tidak tahu tata bahasa Indonesia yang benar. Namun, yang paling pasti, pembentukan frasa secara serampangan itu tidak hanya terjadi pada *Katamso Wisata Kuliner*. Selama ini sangat banyak istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang pembentukannya melanggar hukum DM. Misalnya wanita yang menjadi polisi disebut *polwan* (polisi wanita). Padahal, wanita yang menjadi polisi itu tidak hanya mengurus warga masyarakat yang berjenis kelamin perempuan.

Dengan taat asas pada hukum DM, *dokter wanita* berarti 'dokter yang memiliki keahlian di bidang penyakit yang diderita wanita', sementara *wanita dokter* adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter. Nah, kalau ada wanita yang melakukan pencurian tidak lantas disebut *pencuri wa-*

nita. Wanita yang melakukan pencurian atau suka mencuri disebut *wanita pencuri*. *Pencuri wanita* berarti 'orang (laki-laki atau perempuan) yang mencuri wanita'.

Dengan taat asas pada hukum DM pula kita selayaknya menggunakan frasa *kali ini* dan *kali lain*, bukan *ini kali* dan *lain kali*.

KUNTEL KARENA SEKILIT

Adian Saputra

Sewaktu Chris John bertanding melawan Enoki beberapa waktu lalu, saya dan beberapa rekan sekantor ikut menyaksikan melalui televisi. Pertandingan berlangsung seru. Hal itu dibuktikan dengan muka kedua petinju yang lebam karena terkenal pukulan.

Mungkin saking serunya, rekan senior kami, Heru Zulkarnaen, sampai berteriak, "*Kuntel, kuntel sana.*"

Terus terang, sudah lama saya tidak mendengar kata itu. Mang Cek, sapaan akrab Heru Zulkarnaen, ternyata menghadirkan memori kanak-kanak saya dengan kata itu. Insya Allah yang seumur dengan saya dan masih bermain wayang (gambaran) dan kelereng pada 1990-an, akan tahu makna kata itu.

Kuntel, sebagaimana yang saya pahami, artinya berkelahi sampai seru. Bertarung. Suasananya ramai. Gigih. Itulah makna kata *kuntel*. Namun, saya harus jujur, saya tidak tahu apakah kata itu asli dalam bahasa Lampung atau buatan saja sehingga dikenal banyak orang.

Yang pasti, jika kami dahulu mengadu semut hitam dan kedua ekor serangga itu saling menggigit, pasti kami bilang, "*Kuntel, kuntel.*" Seru pokoknya.

Kalau kami mau berkelahi, kata itu juga acap dipakai. Misalnya, "Ngapa lo. Kuntel yuk. Di Klutum!" Klutum itu nama bukit di daerah Kotabaru, Tanjungkarang Timur, di atas Jalan Dr. Harun II.

Ada pula kata lain yang sering dipakai dan agak lebih terkenal dibanding dengan *kuntel*. Kata itu ialah *sekilit*. *Sekilit* artinya curang. Kalau sedang main wayang (gambaran) ada saja teman yang *sekilit*. Caranya dengan melapisi sisi gambaran dengan gambar yang sama.

Jadi, kalau setelah dilepas ke udara, nanti pas jatuh ada gambarnya. Terang saja karena kedua sisi ada gambarnya. Itulah contoh *sekilit* 'curang, culas, tidak jujur'.

Atau kalau sedang main gundu (kelereng) ketika akan menembak kelereng lawan, tangan kita agak dimajukan, menjulur. Jadi, peluang untuk kenanya lebih besar. Itu juga *sekilit*. Atau kalau sedang main petak umpet, saat kita menjaga benteng, mata kita sedikit mengintip di mana musuh kita sembunyi. *Sekilit* juga namanya. Namun, kadar *sekilit* ini tidak akan sama dengan bentuk kecurangan semisal korupsi, penyelewengan jabatan, dan sebagainya. Kadar *sekilit* lebih kecil, ya paling-paling dalam ragam permainan anak-anak sehari-hari.

Kata *kuntel* dan *sekilit* memang tidak ada di *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* sehingga jika akan ditulis pasti dicetak miring. Namun, karena bahasa Indonesia itu dibentuk dari beragam kata dan istilah yang ada, peluang *kuntel* dan *sekilit* masuk kamus pun bukan tidak mungkin terjadi.

Syaratnya tentu saja pengguna bahasa lisan sering menggunakan kata ini sehingga skala penggunaan kedua kata itu masif. Minimal untuk skop orang se-Lampung. Kalau diperhatikan juga, ada banyak kata di kamus, tapi tidak banyak dipakai orang.

Proses pengindonesiaan yang mungkin tidak berseléra, menjadikan beberapa kata jarang dipakai. Kata *file* dalam bahasa Inggris sudah ada di kamus dan berubah menjadi *fail*. Kata *chaos* di kamus bahasa Inggris, ditulis *kaos* dalam KBBI.

Karena proses pengindonesiaannya agak tidak sesuai dengan selera dan cita rasa, yang kemudian dipakai ya tetap *file* dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan berkas, data. Kata *chaos* dipertahankan ketimbang memilih *kaos* yang jangan-jangan diartikan sebagai jenis pakaian (*kaus*).

Provinsi Lampung memang menyumbang *wai* yang berarti 'sungai atau kali'. Tapi, ini juga rada tidak kompak karena pilihan menulis *wai* itu oleh banyak media ditulis *way* (pakai huruf *y*, tidak *i*).

Kembali ke *kuntel* dan *sekilit*. Peluang kedua kata itu masuk kamus terbuka lebar. Syaratnya, kita yang ada di Bumi Lada ini rajin mengartikulasikannya dalam percakapan, insya Allah lambat laun akan diterima.

Tapi, ya jangan sampai ada perdebatan kemudian saling menegangkan urat leher karena tidak setuju dengan isi tulisan ini. Jangan sampai kita *kuntel*, apalagi gara-gara *sekilit*.

LOGIKA BAHASA

Agus Sri Danardana

Sungguh, bahasa memang bersifat arbitrer: sewenang-wenang dan sekehendak hati, tidak berasaskan pada pertimbangan (rumus, hukum, dan/atau urutan) yang pasti. Itulah sebabnya, kokok ayam jantan disebut *kukuruyuk* oleh orang Jawa Tengah dan Timur dan disebut *kongkorongok* oleh orang Sunda. Padahal, penyebutan itu bisa jadi sama-sama berdasar pada pendengaran mereka (orang Jawa dan Sunda) atas bunyi kokok ayam jantan.

Dalam menyebut matahari, antara orang Jawa dan orang Sunda juga terdapat perbedaan. Orang Jawa menyebutnya *srengenge*, sedangkan orang Sunda menyebutnya *panonpoe*. Konon, kata *srengenge* diadaptasi orang Jawa dari *Sang Hyang He* (Sang Penguasa Hari), sedangkan kata *panonpoe* diduga merupakan terjemahan dari matahari. Begitulah, kesewenang-wenangan itu makin tampak pada penggunaan kata *dhahar* (makan).

Kata itu, *dhahar*, meskipun sama-sama digunakan (baik oleh orang Jawa maupun orang Sunda) untuk arti yang sama: Makan, tetap saja berbeda nuansa. Oleh orang Jawa, *dhahar* digunakan sebagai bentuk halus (*kromo*), sedangkan oleh orang Sunda sebagai bentuk kasar (*ngoko*). Sebagai akibatnya, banyak orang Sunda yang memiliki menantu orang Jawa sering merasa sakit hati ketika mendengar

menantunya berucap, "*Mangga dahar, Pak*", setiap mengajaknya makan.

Contoh di atas memperlihatkan betapa pun ada kesamaan, sesungguhnya setiap bahasa memiliki logika sendiri. Setiap bahasa, yang secara arbitrer dan dengan logika sendiri itu, telah membentuk sebuah sistem masing-masing, berbeda antara satu dan lainnya.

Perbedaan itu, karena tidak dipahami dan disadari semua orang, menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah dalam berbahasa. Sering terjadi, orang menggunakan logika bahasa X dalam berbahasa Y. Sekadar contoh, perhatikan kalimat berikut; (1) Rumahnya Pak Harto yang mana ya, Bu? (2) Dadang sudah diantar pulang oleh saya kemarin, (3) Kota Bandarlampung, di mana saya tinggal, memiliki wisata alam yang indah.

Orang Indonesia yang mau menggunakan logika bahasa Indonesia tentu akan dengan cepat dapat merasakan keanehan ketiga kalimat berlogika bahasa Jawa, Sunda, dan Inggris itu. Pengguna bahasa Indonesia yang baik akan mengubah ketiga kalimat itu menjadi; (1) Rumah Pak Harto yang mana ya, Bu? (2) Dadang sudah saya antar pulang kemarin, (3) Kota Bandarlampung, tempat saya tinggal, memiliki wisata alam yang indah.

Kesalahan penggunaan "logika" bahasa tertentu terhadap bahasa lain sangat besar kemungkinannya dilakukan masyarakat multibahasa, seperti Indonesia. Hal itu makin jelas terlihat belasan tahun belakangan ini, sejak globalisasi, reformasi, dan otonomi daerah dirayakan di negeri ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa globalisasi, reformasi, dan otonomi daerah yang telah mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, pada kenyataannya, tidak memberikan dampak

yang menguntungkan terhadap perkembangan bahasa-bahasa di Indonesia.

Bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah, seakan-akan menjadi subordinasi bahasa asing (terutama bahasa Inggris) yang perannya begitu penting dalam komunikasi di bidang iptek dan ekonomi. Sebagai akibatnya, upaya pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia (seperti pengindonesiaan kata/istilah asing) tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Salah satu contoh tanggapan tidak positif terhadap pengindonesiaan kata/istilah asing dilontarkan Saidiman di *Tempo* (edisi 8–14 September 2008). Pada dasarnya tulisan itu memperlihatkan ketidaksetujuan Saidiman atas pengurangan huruf dalam pengindonesiaan kata/istilah asing ber-*tasydid*, seperti *massive* (Inggris) serta *ummat* dan *kulliyah* (Arab) menjadi *masif*, *umat*, dan *kuliah*.

Tasydid (pengulangan huruf, istilah Saidiman) tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Kalaupun bahasa Indonesia memiliki kata *massa* 'orang banyak', hal itu semata-mata untuk membedakannya dengan kata *masa* yang berarti 'waktu, kala, jangka'. Orang Indonesia, yang menggunakan logika bahasa Indonesia, tidak akan merasa terganggu oleh keberadaan kata *masif*, *umat*, dan *kuliah*.

Jika Saudara Saidiman merasa terganggu, pasti dia sedang berlogika bahasa Arab. Dengan kasus yang sedikit berbeda, hal itu sama dengan orang Jawa yang selalu merasa terganggu ketika mendengar kata *edan* "gila" diucapkan *edham* oleh kebanyakan orang Indonesia. Dalam bahasa Jawa, *d* dan *dh* itu fonem yang berbeda. *Wedi* (takut) berbeda dengan *wedhi* (pasir).

Meskipun tidak mengenal *tasydid*, bahasa Indonesia mengenal tujuh pasang huruf rangkap yang masing-masing melambangkan satu bunyi (sebagai fonem), yakni *ai*, *oi*, dan

au (vokal) serta *ng*, *ny*, *sy*, dan *kh* (konsonan). Oleh sebab itu, bahasa Indonesia menyerap kata-kata bahasa Arab, seperti *mushola*, *wudlu*, dan *dhuafa* menjadi *musala*, *wudu*, dan *duaafa*.

Begitulah sifat bahasa. Ia unik dengan logika sendiri. Jika memaksakan “logika” lain kepadanya, kita pasti akan gagal menikmati keunikannya. Biarkan orang Indonesia tetap menggunakan kata *kalbu* (bukan *kolbu*) untuk hati, sanubari, tetapi jangan paksa mereka naik *bus way* (jalur bus).

MADANI

Oyos Saroso H.N.

Era reformasi banyak memberikan hal baru bagi bangsa Indonesia. Selain tata pengelolaan pemerintah yang berubah. Istilah-istilah baru pun bermunculan. Tentu, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, istilah-istilah baru yang berasal dari bahasa asing diberi padanannya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah baru yang laris-manis pada zaman reformasi antara lain *madani*, *good governance*, *fit and proper test*, dan *stakeholder*.

Madani berasal dari kata *madinah*. Ia kemudian menjadi istilah untuk tata pemerintahan yang baik yang mengacu pada zaman Nabi Muhammad saw. setelah hijrah dari Mekah. Istilah ini, kalau saya tidak salah, dipopulerkan antara lain oleh Nurcholish Madjid.

Menurut Cak Nur, sapaan akrab Nurcholish Madjid, kata *madinah* bermakna sebuah tempat yang didiami orang-orang yang taat pada peraturan dan saling memenuhi perjanjian yang diciptakan (*al-uqud*). Dalam masyarakat *madani*, supremasi hukum menjadi salah satu pilar penting karena tanpa supremasi hukum keadilan tidak akan terwujud.

Pada era yang sama, istilah *good governance* juga dipakai untuk menjelaskan pemerintah yang baik. Dalam tempo singkat, istilah yang gencar dipakai *United Nation Development Program (UNDP)* itu menjadi sangat terkenal dan dengan fasih diucapkan pengamat politik, LSM, mahasiswa, dan para politisi. *Good governance* maknanya kurang-lebih

sama dengan *madani*. *Good governance* berarti juga 'pemerintah madani atau pemerintah yang baik'.

Setelah sepuluh tahun berjalan, pemakaian istilah *madani* redup dengan sendirinya. Istilah *good governance* kemudian lebih banyak dipakai. Dan, ini yang agak aneh, sampai sekarang kita tidak punya padanan frase yang disepakati bersama dan baku. Padahal, bisa saja *good governance* dipadankan dengan *pemerintah yang baik*.

Fit and proper test juga menjadi istilah yang laris-manis di zaman baru ini. Seiring dengan terbentuknya beberapa lembaga independen, istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan kegiatan menguji kepatutan dan kelayakan calon anggota lembaga independen. Maka, kita sering membaca berita dengan judul berita: "Calon Anggota KPUD akan Mengikuti *Fit and Proper Test*", "*Fit and Proper Test* Calon Anggota Komnas HAM Hanya Formalitas", "Lolos-Tidaknya Calon Anggota Komisioner Bergantung *Fit and Proper Test*". Oh ya, bahkan untuk memilih seorang direktur perusahaan daerah pun Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan *fit and proper test*!

Dari sisi kesederhanaan (simpler karena terdiri hanya satu kata), kata *madani* sebenarnya lebih mudah diserap menjadi bahasa Indonesia untuk menjelaskan tentang pemerintah yang baik. Pertanyaannya, mengapa *madani* kalah pamor dengan *good governance*? Apakah istilah *madani* adalah produk Islam, sedangkan *good governance* produk Barat—yang juga menjadi penyokong terbesar bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia kini?

Yang paling pasti, orang Indonesia kini merasa "gurih" mengucapkan *good governance*. Sama gurihnya ketika mengucapkan kata *stakeholder* (yang juga menjadi istilah yang laris-manis di zaman reformasi). Saking gurihnya, kata *stakeholder* (yang bisa diartikan sebagai para pemangku kepen-

tingan atau para pihak yang berkepentingan) bahkan sering dianggap sebagai bahasa kita sendiri sehingga acap diucapkan *stik holder*. Ya, untung saja tidak menjadi *stik herder*.

Sebuah kata atau istilah akan diserap ke dalam bahasa Indonesia jika berterima, intensitas pemakaian tinggi, dan jangkauan pemakaiannya luas. Dalam kaitan inilah ada baiknya kita menggali padanan istilah-istilah asing itu dari bahasa-bahasa di Nusantara. Kalau tidak, ya kita nikmati saja mentah-mentah istilah asing itu sebagaimana kita menikmati *kentucky fried chicken*! Oh ya, istilah yang terakhir itu juga dari bahasa asing.

KULINER SAYUR ASAM

Mukhammad Isnaeni

Setakat ini, siapa yang masih awam dengan istilah *kuliner*? Mendengar ini, setiap orang mungkin langsung teringat dengan berbagai resep masakan dan sosok seorang Bondan Winarno. Ya, wajah Mas Bondan, begitu beliau acap disapa, memang sering menghiasi layar kaca untuk memandu sebuah acara yang berlabel “Wisata Kuliner”. Acara ini dikemas dalam bentuk jalan-jalan keliling ke berbagai daerah sambil mencicipi aneka menu masakan yang dihidangkan.

Sejak maraknya penggunaan istilah *kuliner*, banyak orang bertanya apa itu *kuliner*? Dari bahasa manakah ia? Apakah istilah tersebut sudah baku atau belum?

Untuk menjawab semua pertanyaan itu, tentu saja kita harus mencoba melihatnya di *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi ketiga serta literatur-literatur lainnya. Ternyata, dalam KBBI, kita tidak menemukan istilah *kuliner*, apalagi terjemahannya.

Lalu, apakah karena belum tercantum dalam kamus, istilah tersebut tidak baku? Jawabannya, belum tentu. Namanya saja sebuah kamus, tentu hanya merekam istilah-istilah yang sudah dan sedang marak digunakan masyarakat penutur bahasa pada masa tertentu. Itu pun belum tentu se-

muanya. Terkadang masih ada beberapa kata yang belum terekam si penyusun kamus.

Kembali ke *kuliner*. Istilah ini diserap dari bahasa Inggris, yakni *culinary*. Dalam kamus dwibahasa *An English-Indonesian Dictionary* karangan John M. Echols dan Hassan Shadily, istilah tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan dapur atau masakan. Pengertian tersebut tentu saja sejalan dengan konsep acara “Wisata Kuliner” yang dipandu Bondan Winarno.

Karena berasal dari bahasa asing, kata *culinary* tersebut harus diindonesiakan lebih dahulu. Bagaimana caranya? Dalam *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* disebutkan kata asing yang bersufiks *-ary* (Inggris) dan *-air* (Belanda) diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sufiks *-er*. Sebagai contoh kata *primary* dan *complementary* akan kita adopsi menjadi primer dan komplementer. Huruf *c* pada kata *complementary* berbunyi *k*. Oleh sebab itu, penulisannya dalam bahasa Indonesia menjadi *komplementer*.

Selain itu, acap kita lihat penulisan nama makanan dalam bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh misalnya penulisan *sayur asem* alih-alih *sayur asam*. Dinamakan *sayur asam* karena sayur tersebut terasa agak asam.

Menurut saya, penulisan *sayur asem* lebih banyak dipengaruhi bahasa lisan dan bahasa daerah tertentu. Padahal, kedua-duanya jelas berada pada ranah yang berbeda. Oh, iya, sayur asam juga masuk ranah *kuliner*.

Sebenarnya, baku tidaknya penulisan suatu kata tidak bergantung pada ada tidaknya kata tersebut pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, tetapi terletak pada ketaatan penulisan kata tersebut sesuai dengan kaidah tertulis bahasa

Indonesia, khususnya *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

Berpegang pada penjelasan di atas, istilah *culinary* dalam bahasa Inggris dapat kita tulis dan kita indonesiakan menjadi *kuliner* dan istilah *sayur asem* harus kita tulis *sayur asam*. Kata *kuliner* sebenarnya sudah kita bakukan menurut kaidah bahasa Indonesia. Namun, kata tersebut belum kita bukukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. Mudah-mudahan istilah *kuliner* dapat kita temukan pada *KBBI* edisi selanjutnya. Semoga!

NAMA(KU) INDONESIA

Juwendra Asdiansyah

Entah kenapa tidak banyak orang Indonesia yang menamai anaknya dengan kata dalam bahasa Indonesia. Umumnya, orang Indonesia memberi nama anaknya menggunakan kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Karena mayoritas warga Indonesia memeluk agama Islam, bahasa Arab yang merupakan bahasa Alquran tampaknya menjadi bahasa asing yang paling banyak digunakan.

Penggunaan bahasa Arab biasanya juga dilandasi pendapat nama tersebut lebih islami. Harapannya, kelak si anak dapat menjadi anak yang islami (saleh), yakni anak dengan ciri antara lain taat beribadah, patuh kepada orang tua, jujur, dan berakhlak mulia.

Bahasa asing lain yang juga banyak dipakai adalah bahasa Latin, Sansekerta, Turki, Yunani, atau Ibrani.

Untuk nama dalam bahasa daerah, bahasa Jawa mungkin paling banyak digunakan karena Jawa merupakan etnis mayoritas di Indonesia. Bahasa Melayu juga kerap dipakai karena bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun bangsa Melayu. Selebihnya, pilihan bahasa daerah menyesuaikan suku bangsa si orang tua.

Nah, bagaimana dengan nama dalam bahasa Indonesia? Seperti kalimat pertama tulisan ini, entah apa sebabnya tidak banyak yang menggunakannya. Meski tentu ada,

tapi jarang kita mendengar orang Indonesia dengan nama *Cahaya, Jujur, Pandai, Santun, Putih, Air, Bijak, Cantik*, atau *Gagah*.

Ada memang kata-kata dalam bahasa Indonesia yang agak banyak dipakai sebagai nama seperti *Bagus, Dewi, Dermawan, Indah, Jaya*, atau *Lestari*. Namun, tetap saja penggunaannya tidak sebanyak kata-kata dalam bahasa asing atau daerah.

Nama dalam bahasa Indonesia justru banyak digunakan untuk nama perusahaan, rumah sakit, perumahan, atau toko. Di sepanjang jalan utama, kita akan mudah menemukan plang-plang bertuliskan nama seperti *CV Jaya Abadi, PT Gemilang Kemilau Perdana, Rumah Sakit Permata Hati Bunda, Perumahan Citra Bumi Persada*, atau *Toko Makmur Sentosa*.

Padahal, pemberian nama orang dalam bahasa Indonesia jika padu padan dan bunyi antarkatanya pas juga akan menjadi nama yang bagus dan indah, sekaligus baik dalam makna. Nama beberapa artis Indonesia bisa menjadi contoh: *Aura Kasih, Dewi Lestari, Anggun Cipta (Sasmi), Citra Dewi*, dan tentu saja, *Bunga Citra Lestari*.

Di Lampung, nama *Awet Abadi*, bos Bank Eka, saya kira juga contoh yang sangat bagus.

Ada juga contoh nama yang nyentrik, bahkan ekstrem. Penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw, misalnya, memberi nama kedua anaknya tidak hanya dengan mengawinkan kata-kata, tetapi lebih dari itu menjadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia: *Anakku Lelaki Hoed* dan *Pria Bernama Hoed*.

Penyanyi legendaris Broery Pesolima (almarhum), mungkin saking nasionalisnya, plus tidak mau repot, malah memberi putranya nama: *Indonesia!*

Yang belum terlalu percaya diri untuk seekstrem atau senyentrik Melly dan Broery, mengambil jalan tengah,

menggabungkan kata dalam bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau daerah. Termasuk dalam kelompok "poros tengah" ini adalah orang tua pesohor *Cinta Laura*, *Banyu Biru*, *Dewi Rezer*, *Intan Nuraini*, *Indah Kalalo*, atau *Ence Bagus*.

Bagaimana dari kacamata agama (Islam)? Apakah nama-nama dalam bahasa Indonesia bisa dianggap islami seperti halnya nama dalam bahasa Arab? Atau jika pertanyaannya dibalik, tidak islamikah nama dalam bahasa Indonesia? Namun menurut saya, sepanjang makna, niat dan harapan (doa) dalam nama itu baik, mestinya nama itu tetap islami. Yang islami tentu bukan segala berbau Arab. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak arabi belum tentu tidak islami.

Saya memberi nama putra pertama, *Benar Ganthari Bumi*. Benar, jelas bahasa Indonesia. *Ganthari* yang berarti 'menyinari' merupakan bahasa Sansekerta. *Bumi* juga bahasa Indonesia meskipun diserap dari bahasa Sansekerta. Lumayanlah, dua (bahasa Indonesia) banding satu (Sansekerta).

AKIKA

Dominggus M.U.D.

A*kika* bukanlah nama seorang gadis atau nama seorang serdadu Jepang yang pernah menjadi penjajah negeri ini. Siapakah *akika* sebenarnya?

Akika akan mudah kita temui di salon-salon, mal, dan tempat arisan kaum *akika*.

Kaum *akika* biasanya beranggotakan waria dan perempuan yang sering bergaul dengan para pria yang agak kewanita-wanitaan.

Deby Sahertian, seorang penggagas pembentukan bahasa gaul yang eksentrik, adalah ibu yang melahirkan kata *akika* sebagai pengganti kata *aku*.

Bahasa gaul lahir karena ada percakapan yang ingin dirahasiakan dari orang lain selain anggota kelompoknya. Saat ini bahasa gaul seakan menjadi obat penambah rasa percaya diri sebagian besar anak muda di negeri kita.

Semua orang yang menggunakan bahasa gaul merasa bertambah derajat kegaulannya apabila menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-harinya.

Salahkah Deby Sahertian sebagai penggagas bahasa gaul? Tentu saja tidak. Hal itu terbukti karena tidak adanya demo yang menentang munculnya bahasa gaul. Dan adanya perubahan kata *aku* menjadi *akika* tentu tidak akan merepotkan banyak pihak seperti halnya kenaikan harga BBM.

Deby Sahertian juga tidak serta-merta dapat disalahkan karena jika dilihat dari sisi kreativitas dan unsur artistiknya memang cukup mendobrak.

Label banci kerap didengungkan bagi kaum awam jika mendengar orang berbicara dengan logat *akika* dan rangkaian bahasanya. Banci atau secara halus kita sebut waria merupakan suatu sebutan bagi transgender yang sering diartikan sebagai salah satu manusia baru selain pria dan wanita. Hubungan banci dan bahasa yang muncul, menurut saya ternyata telah menyentuh pada keberadaan peradaban anyar yang memunculkan *translanguage*.

Trans atau proses perpindahan atau perubahan suatu bahasa *akika* atau bahasa lain yang dianggap gaul memang tidak mengancam keberadaan nyawa seseorang. Akan tetapi, bahasa gaul jelas akan mengancam bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia. Terutama apabila guru tidak lagi peduli untuk mengoreksi kesalahan siswanya yang menggunakan bahasa gaul dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Akankah keturunan Anda tidak akan merasa malu jika bahasa yang sering dipergunakan untuk berkomunikasi dilahirkan karena rasa gaul dari nenek moyangnya, serta dipopulerkan oleh segelintir orang yang kehilangan kepercayaan pada dirinya?

POLUSI BAHASA SMS

Mukhammad Isnaeni

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus menerobos antero penjuru negeri ini, bahasa juga mulai terkena imbasnya. Sampai saat ini, banyak kita jumpai tulisan-tulisan aneh yang sering dipakai oleh para penikmat dan pecandu teknologi telepon genggam dan internet.

Pada saat berkirim pesan singkat, misalnya, entah melalui fasilitas SMS di telepon genggam atau pada saat *chatting* di internet, para pecandu teknologi tersebut sering memakai gaya atau cara penulisan seperti ini: *"enag y jalan2 ajj krjnya ajag2 dunk, ak qand jga pngen...othe, sdih tag bsa iquit."*

Itu belum seberapa alias masih ada yang lebih parah lagi. Perhatikan model tulisan berikut ini: *"eEeEHhH,,HebAt b9t Lu Ma5ih bl5a j4L@N -jALan,,,KeLilin9 eR0p4 l491*. Wah, tentunya ribet, *njelimet* dan *mumet* untuk memahami apa maksud tulisan-tulisan tersebut, bukan? Bila hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin polusi bahasa akan terus membanjiri dan membuat *erosi* bahasa Indonesia.

Model penulisan seperti itu bukan sekali dua kali kita jumpai. Model atau gaya penulisan seperti itu sudah sering kita jumpai dan seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa, bahkan boleh dibilang sedang *ngetren*. Kenapa dibilang *ngetren*? Karena gaya penulisan seperti itu cukup sering dipakai pada saat ber-SMS-an, *chatting*, atau komentar di beberapa

blog/tulisan/berita di internet. Untung saja, gaya penulisan seperti itu belum kita jumpai pada tulisan-tulisan yang bersifat resmi atau tulisan-tulisan ilmiah. Jika hal itu sampai terjadi, akan dikemanakan nasib bahasa Indonesia ini?

Jujur, ketika pertama kali membaca pesan singkat seperti itu, saya sendiri merasa pusing. Bagaimana tidak, si pengirim mencampuradukkan antara huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu dalam satu kalimat tanpa memperhatikan kaidah ejaan dan pengalimatan bahasa Indonesia. Konon, model penulisan seperti ini sudah sewajarnya dipakai dalam berkirim pesan singkat. Namanya saja pesan singkat. Oleh karena itu, cara menulisnya pun harus banyak memakai singkatan supaya lebih singkat. Benarkah demikian? Anggapan tersebut, menurut saya, tentu saja keliru. Dalam berkirim pesan, hal yang paling penting adalah si penerima pesan mengerti apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Nah, menurut saya, model penulisan seperti itu sebenarnya justru memerlukan waktu yang agak lama untuk membuat ataupun menafsirkan maknanya.

Bagi si penulis, jelas perlu waktu dan otak ekstra untuk mengombinasikan huruf, angka dan simbol-simbol apa lagi yang akan dipakai selanjutnya demi merangkai sebuah kalimat yang utuh dan bermakna. Demikian pula bagi si penerima pesan. Gaya penulisan seperti itu berpotensi besar untuk membingungkan si pembaca.

Menurut saya, adanya fenomena gaya penulisan seperti itu justru dapat menimbulkan polusi dalam berbahasa. Fungsi "singkat" yang menjadi ciri khas bahasa SMS menjadi agak terabaikan dan berganti ke fungsi "model". Siapa yang tidak mengikuti model penulisan seperti itu akan diterawakan serta kemudian dilabeli ketinggalan zaman.

Bahasa memang menjadi objek yang elastis. Bahasa dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Namun,

perkembangan bahasa ada yang bersifat pmenyuburkan bahasa atau sesuai dengan kaidah bahasa (bersih dari polusi bahasa) dan justru ada pula yang bersifat merusak kaidah bahasa (menimbulkan polusi bahasa). Tinggal terserah kita, mau pilih yang mana?

LUNCH DI TWENTY ONE

Juwendra Asdiansyah

Di sepanjang hari yang mendung pada pengujung November lalu, saya dan dua orang teman dari Lampung khusyuk mengikuti sebuah seminar di sebuah hotel di tepi Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Karena ini kolom bahasa, meskipun ingin, tentu saja saya tidak akan bercerita syahdunya suasana Sanur kala senja, atau apesnya kami karena terperangkap dalam hotel yang tamunya kebanyakan bule-bule di level usia oma-opa (hampir tidak ada bule muda seperti dibayangkan dan diharapkan sebelumnya).

Saya hanya ingin bercerita, lebih tepatnya *nggerundel*, bahwa dalam seminar tentang media baru (ditulis di *spanduk*, *new media*) berdurasi dua sesi itu semua pembicara menulis dan mempresentasikan makalahnya dalam bahasa Inggris! Ini cukup menyesakkan. Sebab, dari sudut pandang atau pendekatan apa pun, rasanya tidak tepat, tidak elok, dan tidak patut para pembicara—yang semuanya merupakan orang-orang di level atas pada perusahaan-perusahaan media massa besar di Tanah Air itu, menyingkirkan bahasa Indonesia untuk kemudian menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam makalahnya.

Entah apa yang terlintas di kepala para pembicara yang jelas-jelas orang Indonesia itu ketika membuat

makalah dalam bahasa Inggris yang akan dipresentasikan di sebuah seminar berlevel nasional (bukan internasional); yang diadakan oleh sebuah organisasi jurnalis Indonesia; yang panitianya orang-orang Indonesia (di antaranya bernama Suprpto, Minda, dan Asep—nama khas Indonesia); yang pesertanya wartawan-wartawan Indonesia dari Lhoksemawe hingga Jayapura (yang 99% bekerja di media-media berbahasa Indonesia); dan berlangsung di Bali yang jelas-jelas termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (meskipun orang-orang asing dari berbagai negara terserak di berbagai tempat)?

Di sesi kedua, seorang pembicara bergelar doktor lulusan Amerika Serikat membuat hati para pencinta bahasa Indonesia semakin *ngenes*. Konsultan *media online* berusia 30-an tahun itu berbicara dalam bahasa Indonesia yang sangat pasaran dan tidak baku, namun dengan begitu banyak selipan bahasa Inggris yang sangat baik.

Melihatnya bicara, suasananya persis seperti sedang menonton VJ (*video jockey*) Daniel, VJ Mike atau VJ Cathy cuap-cuap di MTV Indonesia. "Kita *nggak* bakalan *dapetin*... bla... bla... kalo kita *nggak* *masukin* dan *ngikutin*... bla... bla..." katanya di satu bagian. Di bagian lain dia berucap, "Kita harus *change mindset* kita. Atau, *trend* ini sudah *influenced* begitu banyak orang dan di-*applied* di *so many country*. Berikutnya, *so far* di Indonesia banyak banget *blogger* yang *gunain* teknologi ini! *Weleh...weleh...*

Kenapa ini terjadi? Bukankah jauh-jauh hari para ahli bahasa sudah mengingatkan, minimalkan penggunaan bahasa asing jika masih atau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia! Bahasa Indonesia akhirnya memang kerap menjadi ironi: tertindas di negerinya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Begitu banyak orang yang lebih suka dan lebih pan-

dai menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris, daripada bahasa Indonesia!

Dalam suasana ini, kita bersyukur punya presiden dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik (juga piawai berbahasa Inggris) – paling tidak menurut Pusat Bahasa. Jika tidak, mungkin akan lebih tragis lagi nasib bahasa kita. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mungkin salah satu presiden dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup baik yang pernah kita miliki (selain Bung Karno tentunya – meski masih dengan banyak *keno* di sana-sini).

Bandingkan dengan mantan Presiden Megawati yang gemar berbahasa kalbu alias lebih sering diam, tetapi sekalinya bicara acak kadut gramatikalnya. Jajarkan dengan Gus Dur yang populer dengan kalimat, *Gitu aja, kok, repot!* Sandingkan dengan Habibie yang sebenarnya cukup lumayan bahasa Indonesianya (padahal pernah sangat lama tinggal di Jerman), namun masih dengan cara bicara, *"akhan thcethcapi, kitcha tchidhak semestchinya begitchu."* Atau Pak Harto dengan bahasa khasnya, *Yang mana seandainya saya daripada sehingga membingungkan daripada orang lain.*

Tidak... tidak... jangan salah sangka, ini tidak ada kaitannya dengan pesta politik 2009. Saya tidak sedang bicara politik. Ini cuma soal bahasa, Bung!

Nah, sebelum terlambat, kenapa kita tidak mulai untuk belajar mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia (dengan baik, syukur-syukur benar). Dan, suatu hari kita boleh bermimpi, tak akan lagi mendengar Mas Prapto, Kyay Herman, Kang Asep, atau Uda Azwir, berkata, *Ah, you ini ada-ada saja, gini-gini I sudah sering lunch di Twenty One, lo! Weleh... weleh....*

BAHASA DOLANAN ANAK-ANAK

Adian Saputra

Kira-kira sebulan lalu, saya dan seorang teman berbincang tentang kata atau istilah yang dahulu akrab dipakai ketika kami kecil. Bermula dari *kuntel* dan *sekilit* yang pernah saya tulis di rubrik ini sekitar dua bulan yang lalu.

Dalam perbincangan, kami menghadirkan lagi beberapa kata yang sangat akrab dan sering dipakai semasa kami kecil dahulu. Semasa kami dolanan dengan karib-karib yang usianya hampir sama. Andaipun berbeda, tidak terlampau jauh rentangnya.

Inilah beberapa kata yang sempat saya catat ke dalam ponsel untuk kemudian saya pindahkan dalam baris demi baris artikel ini.

Dahulu, kami punya istilah *ula* atau *unca* untuk gundu atau kelereng sebagai benda yang diadu. Atau untuk gambaran (wayang) sebagai alat berlomba. *Unca* atau *ula* ini, dalam permainan kelereng atau gundu, biasanya dicari yang bagus.

Bentuknya bagus, warnanya unik. Ada kelereng susu karena warna putih seperti susu, ada yang disebut mata kucing karena ada selarik warna mirip mata kucing. Ada pula unca yang disebut gambir karena warnanya kehijau-hijauan.

Menarik sekali. *Unca* atau *ula* ini jika dipadankan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira apa ya? Bingung juga. Mungkin agak tepat kalau disamakan dengan modal. Sebab, kalau tidak ada modal, tidak bisa main.

Bisa juga dipadankan dengan barang unggulan. Dari sekian kelereng yang kita punya, kita pilih satu buah sebagai unggulan. Dengan harapan, unggulan kita itu mantap kalau menumbur kelereng lawan.

Selain itu, ada pula istilah *kucur*. Istilah ini kami pakai untuk meledek teman yang tidak mau ditantang bermain. *Kucur lu*, demikian sering dipakai. Ya dalam bahasa Indonesia artinya penakut. *Kucuran* itu artinya 'penakut'. Belum apa-apa, sudah tidak berani tarung. Ditantang berkelahi atau berantem (ini juga bahasa dolanan), selalu tidak mau. *Kucur*, ya penakut.

Bisa juga dia *kucur* karena takut *roncot*. Nah apa pula artinya? *Roncot* ini artinya 'bangkrut'. Kalau semua kelereng sudah berpindah ke tangan musuh, *roncot* itu. Ludes semuanya. Ya modal, ya *ula* atau *unca*-nya. Tidak bersisa lagi. Ada kemungkinan yang *kucur* itu karena takut *roncot*. *Roncot* tidak akan terjadi kalau kita piawai dalam bermain.

Kalau *lepay*, ya susah. Tahu maknanya *lepay*? *Lepay* ini merujuk pada pemain yang tidak bersemangat, tidak gesit, lamban. Kalau mainnya *lepay* atau lamban, peluang kalahnya besar. Maka itu, kalau bermain jangan *lepay*.

Ya kalau masih *lepay*, *kucur*, takut *roncot*, berhenti saja dahulu. Nah, berhenti sesaat dalam dolanan sewaktu kami kecil, namanya *cimit*. Ingat tidak? Ketika sedang asyik bermain, tiba-tiba ibu di rumah memanggil. Terpaksa kita berhenti bermain. Dengan teman bermain, kami acap berkata, "Cimit dulu ya. Gue dipanggil ibu."

Cimit itu berhenti dalam permainan. Saya juga ingin *cimit*. Selain bernostalgia dengan bahasa masa dolanan da-

hulu, penulis berharap keragaman bahasa ini dipelihara. Jika kita akrab memakainya, siapa tahu para bapak yang menyusun kamus bahasa Indonesia berkenan mencatat dan mengentrinya. Lumayan kan sumbangan daerah kita ini buat perbendaharaan bahasa di Tanah Air. Ya sudah, saya mau *cimit*. Tetapi, bukan berarti saya *kucur* dan *lepay* ya. Saya pasti membaca dan menulis lagi. Namun, saya harus punya *unca* atau *ula* yang baru supaya tulisan makin enak dinikmati.

IRONI BAHASA INDONESIA

Juwendra Asdiansyah

Kini banyak orang yang lebih terkagum-kagum mendengar seseorang mahir berbahasa Inggris, tapi biasa-biasa saja mendengar seseorang yang fasih berbahasa Indonesia. Banyak orang (Indonesia) yang pandai *casciscus* dalam bahasa Inggris, tapi tersendat-sendat saat bicara dalam bahasa Indonesia.

Dalam ajang pemilihan putri-putrian, misalnya. Banyak di antara kontestan yang menjawab, "*I will answer in English*, saat ditanya pembawa acara, "Anda akan menjawab dalam bahasa Indonesia atau Inggris?"

Serentet kalimat dalam bahasa Inggris kemudian memang meluncur dengan fasih dan lancar dari bibir putri-putri itu. Anehnya, di pertanyaan berikutnya, saat (terpaksa) menjawab dalam bahasa Indonesia terlihat sekali ketidakmampuan para putri berbahasa Indonesia dengan baik, mulai gramatikal atau struktur bahasa yang timpang, logika yang tidak beraturan, pemakaian diksi yang keliru, *dus* diselengi eee...yang panjang.

Bisa jadi, bagi putri-putri itu, selain lebih "terkesan cerdas" menjawab dalam bahasa Inggris jauh lebih mudah ketimbang dalam bahasa Indonesia. Pikir mereka, *toh* tidak banyak yang mempersoalkannya. Seperti tidak dipersoalkan terpilihnya Nadine Chandrawinata sebagai Puteri Indonesia

tahun 2005 manakala sang putri masih terpatah-patah bahasa Indonesianya!

Kecakapan berbahasa Indonesia juga jarang disyaratkan dalam seleksi calon wartawan. Dalam iklan lowongan pekerjaan di surat kabar hampir pasti ada syarat "mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan" (iklan ini biasanya juga ditulis dalam bahasa Inggris). Tapi cakap berbahasa Indonesia, rasanya jarang.

Ini aneh. Sebab, wartawan (Indonesia) adalah salah satu profesi yang paling banyak berkutat dengan bahasa Indonesia: Mewawancara dan menulis dalam bahasa Indonesia?

Buat banyak orang, bahasa Indonesia mungkin lebih rumit dan sulit daripada bahasa Inggris. Lihat saja hasil ujian siswa-siswa SMP atau SMA setiap tahun. Banyak yang nilai Bahasa Indonesianya lebih kecil dibanding dengan nilai Bahasa Inggris. Jika Bahasa Inggris mendapat 9, Bahasa Indonesia dapat 7 saja sudah bagus. Bahkan, tidak sedikit siswa yang tidak lulus karena nilai Bahasa Indonesianya jeblok.

Soal sulitnya bahasa Indonesia ini, Remy Silado mengilustrasikan bahasa Indonesia seperti "masakan yang pahit karena terlalu banyak bumbu masak, dan juga menor *cele-mong* seperti perempuan genit yang kebanyakan gincu". Namun begitu, seberapa pun pahitnya, menornya, rumitnya, dan sulitnya, semestinya bahasa Indonesia tetap kita junjung di atas bahasa lain (asing atau daerah). Kita tidak perlu meniru Malaysia atau Singapura yang gagal menjaga dan merawat bahasanya, bahasa para penuturnya sudah begitu *de-del duwel* tercampur baur dengan bahasa asing (Inggris).

Kisah berikut perlu menjadi renungan. Beberapa tahun lalu, ada seorang anak berusia sembilan tahun menerbitkan novel dalam bahasa Inggris. Hebat memang, dalam usia yang masih dini ia telah mampu berbahasa Inggris dengan

baik. Di rumahnya, si anak bahkan biasa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari.

Anak ini orang Indonesia (karena *nyak* dan *babe*-nya orang Indonesia), lahir dan tinggal di Jakarta. Tetapi, sungguh mengejutkan, saat peluncuran novelnya, banyak wartawan bingung ketika mewawancarainya: Si anak ternyata tidak mengerti bahasa Indonesia!

BUKAN HARI VALENTINE

Yuliadi MR

Bagi sebagian orang, 14 Februari merupakan hari yang istimewa, yang umum dikatakan hari *valentine*. Hari yang dilambangkan dengan warna merah muda. Salah satu hari yang baik untuk mengungkapkan cinta kepada pasangan, sebagai ungkapan kasih atau sayang. Persoalannya bukan pada harinya, melainkan penulisan nama hari *valentine*.

Kecerobohan kita dalam berbahasa salah satunya adalah ketidaktepatan dalam penggunaan kata. Ketidaktepatan itu bisa berupa kesalahan kaidah bahasa.

Kata *hari valentine*, secara semantis dapat dipahami, tetapi salah dalam pembentukan kata karena kata *hari* dan *valentine* tidak senyawa atau sejenis. Satu pihak kata *hari* kosakata bahasa Indonesia, lain sisi kata *valentine* kosakata bahasa asing.

Pembentukan kata/istilah dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan, pertama dengan penerjemahan, yaitu 1) secara langsung seperti pencakar langit (*skycraper*), kawasan terikat (*bounded zone*); 2) perakatan seperti jasa boga (*catering*), pasar swalayan (*supermarket*).

Kedua, dengan penyerapan, yaitu 1) penyesuaian ejaan dan lafal seperti kamera (*camera*), mikrofon (*mickrophone*), 2) penyesuaian ejaan tanpa penyesuai lafal seperti desain (*de-*

sign), fail (*file*), 3) tanpa penyesuaian ejaan dengan penyesuaian lafal seperti bias, nasal, unit, 4) tanpa penyesuaian ejaan dan lafal seperti *orbit*, *internet*.

Ketiga, gabungan penerjemahan dan penyerapan seperti koloid lempung (*clay colloid*), morfem terikat (*bound morpheme*).

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyerapan kata/istilah, hubungan dengan kata *hari valentine*, pertama apakah kata/istilah itu baru dan belum ada serta tidak didapat dalam bahasa Indonesia? Kedua, apakah kata/istilah itu juga tidak terdapat dalam bahasa daerah? Jika tidak, penyerapan kata/istilah dapat dilakukan dengan penerjemahan, penyerapan, dan gabungan penerjemahan dan penyerapan.

Untuk itulah, kata *hari valentine* itu dapat dilakukan dengan gabungan penerjemahan dan penyerapan, yaitu *hari kasih sayang* atau kalau mau digunakan secara utuh: *valentine day* bukan *hari valentine*. Sekadar contoh lain ada *hari ibu* (*mother day*) bukan *hari mother*, *hari kemerdekaan* (*independence day*) bukan *hari independence*.

Kecerobohan lain yang acap kita jumpai adalah kesalahan struktur kata, yaitu penulisan kata/istilah bahasa Indonesia yang menggunakan struktur bahasa asing. Sekadar contoh kata *tim manajer* seharusnya menjadi *manajer tim*? Karena struktur bahasa asingnya (Inggris) dari kata *team manager*.

Pengindonesiaan kata/istilah yang berupa frasa perlu diperlakukan seutuhnya tidak setengah-setengah. Seperti pada kata *marketing manajer* seharusnya menjadi *manajer pemasaran*? Begitu pula kata *bola volley* seharusnya *bola voli*. Kalau tidak mau susah, pakailah kata asingnya: *team manager*, *marketing manager*, *volley ball*.

Padahal, jika sudah ada kata/istilahnya dalam bahasa Indonesia, mengapa digunakan bahasa asingnya? Sebegitu rendahkan sikap positif kita terhadap bahasa sendiri?

ULUN LAMPUNG

Asarpin

Belakangan, istilah *ulun* Lampung banyak muncul di berbagai *blog*. Di *blog*-nya Udo Z. Karzi, berserakan kata *ulun* Lampung. Banyak juga orang hanya ikut-ikutan memakai nama *ulun* Lampung tanpa memahami apa makna dan maksud kata itu. Dan parahnya adalah orang Lampung sendiri yang menggunakan kata itu.

Baru-baru ini Agus Sri Danardana juga menggunakan kata *ulun* Lampung di harian ini (24/1/2009). Agus Sri Danardana menulis “Kemauan *ulun* Lampung”. Saya yakin maksudnya adalah suku Lampung atau orang Lampung. Seakan-akan tak ada sinonim dan lebih pas digunakan selain kata *ulun*. Padahal, akan lebih elok jika Agus menggunakan kata *tian* Lampung.

Wikipedia menyebut *ulun* Lampung sebagai orang atau suku Lampung. Namun, saya akan menerima dengan senang hati penggunaan kata ini jika ditujukan kepada saya karena saya tahu yang mengucapkan itu tepat pada tempatnya. Kalau yang mengucapkan kata itu Udo Z. Karzi atau Ansori, saya tentu akan mempersoalkan.

Lalu apakah bahasa Lampung punya hak milik tertentu? Apakah bahasa Lampung ada kekhususan yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan yang lain? Kalau begitu aneh sekali bahasa Lampung itu. Artinya, suku Lam-

pung bisa menggunakan kata itu, tetapi yang bukan suku Lampung tidak bisa menggunakan untuk kalimat yang sama.

Dalam salah satu tulisannya, Udo menulis begini: "Jika *ulun* Lampung masih merasa memiliki bahasa Lampung". Udo Karzi menulis dengan kalimat berbahasa Lampung begini: "*Jak ipa asal ni ulun Lampung?*" (Dari mana asalnya suku Lampung?). Bahkan, dalam salah satu tulisannya, Udo Karzi menulis namanya begini: "Udo Z. Karzi, *ulun* Lampung, tinggal di Pangkalan Bun, Borneo".

Jika seorang yang pintar bahasa Lampung sudah berani menambahkan kata *ulun* Lampung setelah namanya, buat saya masalah ini sangat serius. Orang tersebut tentu tidak mau jika dikatakan sedang meniadakan identitas diri sendiri. Sebab, kata "Udo Z. Karzi, *ulun* Lampung" di situ berarti: Udo Z. Karzi bukan Lampung. Yang lebih parah adalah ketika orang menyebut "O, kamu *ulun* Lampung ya". Ada pula yang kenalan dengan menyebut namanya sambil menambahkan kata "*nyak ulun Lampung* (saya orang Lampung)".

Di tempat kelahiran saya tidak pernah mendengar orang menyebut istilah *ulun* Lampung. Bisa-bisa orang Lampung di tempat kelahiran saya akan tersinggung ketika mendengar istilah ini dipakai. Teman saya pernah bertanya: Kamu siapa? Teman yang satunya jawab: *Uluu!* Maksudnya bukan orang Lampung.

Saya mengernyitkan dahi setiap orang menyebut kata *ulun* Lampung. Bukan karena saya fanatik terhadap bahasa Lampung! Saya sedih karena orang tak pernah berusaha memahami makna kata itu dan ikut-ikutan secara buta seperti laron yang akhirnya mati terbakar!

Kata *ulun* sama kasarnya dengan sebutan kepada seseorang atau suku atau marga dengan menggunakan kata

mereka: Mereka Jawa. Mereka Batak. Yang gaul akan menggunakan kata “dia orang”, bukan mereka. Jadi, kata *ulun* Lampung sama dengan kata orang lain atau kata penunjuk untuk orang yang bukan suku Lampung.

Kata ini biasanya digunakan orang Lampung pesisir untuk menyebut orang lain yang bukan suku Lampung sebagai jawaban jika ada yang bertanya. Agak aneh kalau orang menyebut *ulun* Lampung, tetapi yang dia maksudkan adalah orang/suku Lampung. Misalnya, ada orang bertanya siapa yang berkelahi, orang Lampung akan menjawab *ulun*. Siapa yang mencuri akan dijawab *ulun* dalam arti bukan saya, melainkan orang lain yang mencuri.

Biasanya, kata *ulun* digunakan orang yang bukan suku Lampung kepada suku Lampung. Kalau seseorang adalah suku Lampung, tidak mungkin ia menggunakan kata itu, kecuali jika orang itu ikut-ikutan saja. Asarpin *ulun* Lampung, misalnya, bisa saja digunakan orang lain untuk menyebut saya. Namun, tidak mungkin saya menyebut diri Asarpin *ulun* Lampung. Inilah yang tidak pernah disadari para pengguna, yang semoga segera tersadarkan.

Dulu, jauh sebelum memopulerkan *ulun* Lampung (ada juga yang menuliskan dengan *ulun Lappung*), saya sempat protes ke mana-mana soal pemakaian kata *ulun*. Bukankah *ulun* itu bersinonim dengan *ghumpok* yang berarti orang lain? Waktu kecil, saya akrab dengan kalimat yang dianggap kurang ajar seperti ini: “*Beni sapa inji* (Punya siapa ini)?” Jawabnya tak kalah kurang ajar: “*Beni ulun, lain beram* (Punya orang/orang lain, bukan punya kita).”

Dalam konteks ini, *ulun* memang bukan saya, bukan kita, bukan kami, melainkan orang lain. Kata *ulun* di sini sinonim dengan *ghumpok* (sama artinya, orang lain). Dalam kasus ini, *ulun* memang menjauhkan seseorang (*out group*) dari kelompok saya (*in group*). *Ulu*n, dengan demikian, menjadi makhluk asing bagi seseorang atau sekelompok orang.

Anehnya, *Supermarket King* (Swalayan King) tahun 1980-an mempunyai moto dan bahkan *jingle* iklannya radio-radio: “*King jak ulun Lampung*”. Lo? Ini swalayan di Lampung kok malah *gembur-gembor* mengatakan *King* punya orang lain dan bukan punya orang Lampung?

Belakangan saya tahu bahwa kata *ulun* sebenarnya sebuah kata yang juga banyak digunakan di daerah lain. Saya tanyakan kepada Heru Zulkarnain yang berasal dari Cukuh

Balak, sesama bahasa Lampung dialek a (api). Kata dia, *ulun* berarti orang. Masih bahasa Lampung—sebagaimana dikutipkan Agus Sri Danardana—dalam kamus (Junaiyah H.M., 2001) halaman 298 tertulis *ulun*: 'orang; seseorang'. Untuk arti 'orang lain' (seperti pendapat Asarpin) di kamus itu ditulis '*ulun di ulun*'.

Kata *ulun* sering dilekatkan kata *tuha* (tua). *Uulun tuha* berarti 'orang tua' dalam arti ibu-bapak yang melahirkan kita. Kalau yang dimaksudkan adalah orang yang sudah tua, biasanya dipakai kata *jelma tuha* yang artinya orang (yang sudah) tua.

Kamus Bahasa Lampung (Fauzi Fattah dkk., 1999: 79) mencantumkan *ulun*: 'orang'; *ulun alim*: 'ulama'; dan *ulun tuha*: 'orang tua'.

Keluar dari bahasa Lampung, kata *ulun* juga dikenal dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, dan bahasa Banjar. *Uulun* dalam bahasa-bahasa itu berarti 'saya, aku, abdi'.

Pada Laras edisi 18 Februari lalu Asarpin mengusulkan untuk menggunakan *tian* sebagai pengganti *ulun*. Ah, masak iya sih? *Tian* dan *ulun* ya jelas berbeda. *Tian* (mereka) adalah kata ganti orang ketiga jamak. Dalam tulisan rasanya tidak elok, menganggap pembaca sebagai kelompok lain. Mengapa Agus Sri Danardana harus mengatakan mereka (kepada orang Lampung). Kata *tian* bisa berhadap-hadapan dengan kata ganti orang lain seperti: *nyak* (saya), *gham* atau *negham* (kita), *sikam* (kami), *niku* (kamu tunggal), *keti/kutti* (kalian), dan *ya* (dia).

Sedangkan *ulun* adalah kata benda yang berarti 'orang', bisa juga 'orang lain'. Kalau digandengkan dengan Lampung menjadi *ulun Lampung*. Tentu artinya, bukan 'orang lain Lampung' atau 'bukan orang Lampung'. Ini soal konteks saja.

Awal tahun 2000-an saya menulis judul tulisan di *Lampung Post* berjudul "Menelusuri Jejak-Jejak *Ulu* Lampung di Bandarlampung". Saya juga baru tahu kalau *Wikipedia* pun sudah mengadopsi kata *ulu* Lampung dan mengartikannya sebagai 'orang Lampung' atau 'orang suku Lampung'. Saya berpikir, wah, malahan bagus.

Sedikit keluar dari bahasa Lampung, ke bahasa Indonesia untuk sebuah contoh. Kata *canggih* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* bisa berarti (1) 'banyak cakap, bawel, cerewet'; (2) 'suka mengganggu (ribut)'; (3) 'tidak dalam keadaan yang wajar, murni atau asli'; (4) 'kehilangan kesederhanaan yang asli (seperti sangat rumit, ruwet, atau terkembang)'; (5) 'banyak mengetahui atau berpengalaman (dalam hal-hal duniawi)'; (6) 'bergaya intelektual'.

Nah, dengan demikian, kata *ulu* dalam bahasa Lampung berarti orang atau orang lain. Dua-duanya benar berdasar pada makna leksikal.

Ya, saya memang sengaja memopulerkan *ulu* Lampung sebagai ganti istilah orang Lampung dan masyarakat Lampung. Ah, sebenarnya kalau mau bisa saja yang pakai kata *jelma* yang artinya sama, 'orang'. *Jelma* Lampung artinya 'orang Lampung'. Tapi, *kan* ini hanya soal rasa bahasa saja, ketimbang saya menulis *jelma* Lampung kok rasanya lebih sedap pakai *ulu* Lampung, saya orang Lampung dan bukan orang lain.

Saya juga serius! Saya sama sekali tidak tersinggung disebut *ulu* Lampung di tempat kelahiran saya sendiri dan dengan bangga mengatakan, "Saya *ulu* Lampung!"

NALAR BERBAHASA

Oyos Saroso H.N.

Wartawan atau jurnalis tidak pernah kehabisan kata dan istilah untuk membuat tulisan dan laporan. Tersangka kasus korupsi yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa disebut “diseret ke meja hijau”, pelaku kejahatan yang ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ditulis “digelandang ke kantor polisi”. Kalau terdakwa sudah divonis dan masuk penjara akan disebut “dijebloskan ke jeruji besi”. Ada juga wartawan yang menulis “terdakwa mendekam di hotel prodeo”.

Yang lebih “ngeri” lagi adalah pengendara sepeda motor yang mati karena kecelakaan. Si korban akan disebut “meregang nyawa”. Entah si wartawan melihat atau tidak saat nyawa korban memisahkan diri dari jasadnya. Pokoknya, mereka yang meninggal hampir selalu ditulis “meregang nyawa”.

Karena terlampau sering dipakai, frasa “meregang nyawa” selalu dipakai untuk menulis orang yang meninggal dalam sebuah kecelakaan. Padahal, dalam proses pembuatan berita, belum tentu si wartawan mengetahui dengan persis bagaimana proses si korban meninggal. Apalagi melihat proses meregangnya nyawa dari tubuh korban.

Tanpa sadar, wartawan juga sering menambah penderitaan korban dengan istilah “digagahi”. Kata “digagahi” bia-

sanya dipakai wartawan ketika menulis berita pemerkosaan. "Dadap digagahi" berarti "Dadap diperkosa". Secara tidak langsung si wartawan memberikan membenaran bahwa pelaku pemerkosaan adalah orang yang menjadi gagah setelah memerkosa. Atau: dia gagah karena memerkosa.

Semua istilah di atas menunjukkan bahasa superlatif. Seperti halnya kita sering menyebut "turun ke bawah", "naik ke atas", dan "amat sangat bagus sekali". Para wartawan yang mengawali memakai istilah-istilah tersebut barangkali bisa disebut sebagai kreator bahasa. Mereka berjasa menemukan kata dan istilah yang kemudian dipakai secara luas di dunia pers dan kehidupan sehari-hari.

Secara kebahasaan, frasa-frasa dan istilah tersebut diterima dalam tata bahasa Indonesia. Artinya, memang tidak ada yang salah dalam pemakaian frasa dan istilah-istilah tersebut. Bahkan istilah-istilah tersebut terutama "diseret ke meja hijau" dan "mendekam di hotel prodeo" kini sudah menjadi ungkapan sehari-hari. Pertanyaannya: Bagaimana soal nalar bahasa dan rasa bahasanya?

Kata "digelandang", misalnya, mengandung arti 'diseret dengan paksa'. Badu digelandang ke kantor polisi berarti 'Badu diseret dengan paksa ke kantor polisi'. Untuk Si Badu yang melakukan perampokan keji atau penjahat kelas kakap, rasanya kita masih bisa menangkap maksudnya. Nah, kalau untuk menuliskan "Si Umri mantan Gubernur Provinsi Waru diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", apakah akan memakai kata "digelandang" juga? Rasa-rasanya kok tidak. Tampaklah di sini bahwa wartawan juga masih menimbang-nimbang, memilih dan memilih kata untuk dipakai sesuai dengan konteksnya.

Nah, wartawan zaman kiwari yang masih sering memakai istilah-istilah itu bisa disebut sebagai penerus atau pengekor. Masih untung kalau mengekor, tetapi tahu makna

aslinya sehingga tidak salah nalar. Yang parah adalah kalau sebagai pengekor masih juga tak paham logika bahasa sehingga sering mengalami salah nalar. Makanya, agar praktik berbahasa Indonesia terasa legit dan jernih nalar memang perlu kreativitas para pemakainya. Masa iya sudah puluhan tahun berlalu wartawan hanya memakai istilah yang "itu-itu saja".

Salah nalar sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Seorang karyawan yang terlambat ke kantor misalnya berkilah, "Maaf saya datang terlambat karena jalannya macet." Kali lain, ketika dia tidak masuk kerja dan membuat surat izin. Ketika kita menolak undangan teman, kita pun sering berkata, "Maaf saya tidak bisa datang karena tidak ada waktu."

Frasa "jalannya macet" dan "tidak ada waktu" adalah contoh salah nalar. Sebab, macet atau tidak lancar bermakna gerak, sementara jalan (raya) tidak mengandung makna gerak karena sebagai kata benda jalan memang diam saja. Pemakaian frasa "tidak ada waktu" juga salah nalar karena waktu bersifat tetap (24 jam) dan selalu ada. Yang tidak ada, barangkali adalah kesempatan. Jadi, yang tepat untuk mengelak undangan adalah bukannya "tidak ada waktu", tetapi "tidak ada kesempatan".

Semua itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga memang sulit mengubahnya. Lagi pula, kita masih bisa menenteramkan hati: Bukankah kesalahan nalar dalam berbahasa merupakan produk masyarakat? Artinya, bukan saya sendiri—termasuk Anda pembaca—yang salah. Salah nalar pula ketika sebuah partai dalam iklannya mengklaim kesuksesan pembangunan di Indonesia adalah keberhasilannya. Mungkin, dikiranya, partai lain hanya nebeng dan kita cuma penonton.

BUKAN CONTRENG DAN CENTRANG?

Yuliadi M.R.

Entah siapa yang memulai penyebutan kata *contreng* atau *centrang* sehingga kita terbawa-bawa menggunakan kata itu. Bahkan beberapa media pun mulai ikut-ikutan memakainya.

"*Contrenglah* nomor atau nama calon pilihan Anda ini! Jangan lupa, ingat-ingat partai dan nomor ini," begitu ajakan berbagai pihak (partai) dalam sosialisasi bagi pemilih (terutama pemula). Apakah kita tahu arti kata *contreng* atau *centrang* itu?

Memang, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Tata cara pemilihan calon anggota legislatif dilakukan tidak lagi dengan *mencoblos*, tetapi dengan *mencontreng*(?) atau *mencentrang* (seperti sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak). Perubahan cara pemberian suara dari *mencoblos* menjadi *mencontreng* atau *mencentrang* tentu tidaklah mudah.

Kendala yang mungkin terjadi, pertama tidak semua orang tahu istilah *contreng* dan *centrang*, maka perlu dilakukan sosialisasi bagi pemilih. Kedua, belum populer dan akrabnya masyarakat dengan kata *contreng* atau *centrang*, ketiga masyarakat sudah sangat akrab dengan kata *coblos*.

Mengapa *centang*? Bukan *centrang* dan *contreng*?

Kata manakah yang tepat digunakan pada pemilihan nanti? Barangkali perlu kiranya kita lihat arti kata *mencontreng* dan *centrang*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) tidak ditemui kata *contreng* dan *centrang*. Dalam KBBI akan kita temukan kata *centang*, *conteng*, dan *coreng*.

Kata *contreng* mungkin berasal dari kata *conteng* dan kata *centrang* berasal dari kata *centang*. Kata *contreng* dan *centrang* dapat dikatakan sebagai suatu variasi bahasa atau ragam bahasa (daerah) yang disebabkan oleh kebiasaan/cara berbahasa (idiolek) atau sosiolek seseorang atau kelompok tertentu.

Contoh lain variasi/ragam bahasa (daerah), yaitu kata *menerapkan* (kata dasar serap, bahasa Indonesia) menjadi kata *mentrapkan*, kata *meneropong* menjadi *mentropong*, kata *menerawang* menjadi *mentrawang*. Kata-kata *mencontreng*, *mencentrang*, *mentrapkan*, *mentropong*, dan *mentrawang* tentu tidak baku dan salah menurut kaidah/tata kata bahasa Indonesia.

Menurut KBBI, kata *centang* adalah 'tanda koreksi yang bentuknya seperti huruf V atau tanda cawang, sedangkan kata *mencentang* adalah membubuhi coretan, tanda, dan sebagainya pada tulisan'. Kata *conteng* adalah 'coret (palit) dengan jelaga, arang, dan sebagainya sedangkan kata *menconteng* adalah mencoreng dengan arang, tinta, cat, dan sebagainya'.

Kata *coreng* adalah 'garis tebal dan panjang, conteng, coret', sedangkan kata *mencoreng* adalah 'menggaris tebal panjang, memberi garis tebal panjang, menconteng, men-coret'.

Barangkali sangat tepat bila penyebutan kegiatan membubuhi coretan (tanda cawang atau seperti huruf V) pada nomor atau tanda gambar pada lembar pemberian suara

disebut *mencentang*. Bukan *mencentrang*, *menconteng* atau *mencontreng*, apalagi *mencoreng*.

Mudah-mudahan dalam pemilihan nanti kita tidak *menconteng* (apalagi *mencontreng*). Sebab *menconteng* dapat diartikan 'mencoret dengan tinta, arang, cat, dan sebagainya pada nomor atau nama calon legislatif'. Bila itu terjadi, pilihan kita dianggap tidak sah.

Lembaran pilihan yang sah menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah memberikan tanda cawang atau tanda koreksi seperti huruf V pada nomor atau nama calon legislatif, bukan memberikan (tanda) coretan atau garis panjang (*coreng*).

Mengubah kebiasaan pemberian suara untuk memilih calon legislatif dari *mencoblos* menjadi *mencentang* (sekali lagi bukan *mencentrang* atau *mencontreng*), tentu bukanlah tidak ada persoalan. Langkah awal telah kita lakukan, yaitu memberikan dan menjelaskan kata/istilah yang tepat pada masyarakat tentang cara pemberian suara.

Pemakaian kata *mencentang* dan tidak menggunakan kata *mencentrang* dan *mencontreng* setidaknya telah meluruskan pandangan masyarakat tentang cara pemberian suara.

Pesta demokrasi bangsa ini adalah milik dan untuk kita bersama. Kita tidak mengharapkan gagalnya pemilu karena kesalahan pada cara pemberian suara dalam pilihan calon legislatif karena rentannya kesalahan cara pemilihan calon legislatif nanti.

Kita tidak menginginkan ada pihak yang memanfaatkan kondisi perubahan sistem pemilihan ini. Apalagi mengagalkan pesta demokrasi. Semoga tidak terjadi!

GAULLAH BIAR GAK KATRO!

Danang Harry Wibowo

Tukul, ternyata tidak hanya pandai menghibur menggunakan bahasa tubuh, tetapi ia juga pandai menghibur dengan bahasa tuturnya. Setiap ia meledek seseorang dengan kata *katro*, *simsalabim*, semua orang yang menontonnya otomatis tersenyum atau bahkan terpingkal-pingkal mendengarnya.

Entah siapa yang menciptakan, kata *katro* sudah dipakai masyarakat Jakarta sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Yang pasti, bukan Tukul yang menciptakannya. Namun, pamor *katro* ikut menanjak seiring dengan ketenaran Tukul, tidak hanya masyarakat Jakarta, tetapi juga dikenal (digunakan) sebagian besar masyarakat Indonesia.

Selain *katro*, kini kita akrab dengan kata *bokap*, *bokin*, *lekong*, *lesbong*, dan *dagadu*. Dulu, kita tidak mungkin mengenalnya karena kata-kata tersebut sengaja diciptakan komunitas atau kalangan tertentu agar apa yang sedang mereka bicarakan tidak diketahui orang lain di luar komunitas atau kalangannya (rahasia).

Berbeda dengan kata *jayus*, *nek*, dan *bo*, yang oleh sebagian orang disebut *bahasa gaul* (mengacu pada kamus yang dibuat Debby Sahertian), yang tidak jelas pembentukannya, kata *bokap*, *bokin*, *lekong*, *lesbong*, dan *dagadu* dibuat dengan bentuk yang jelas alias memiliki pola.

Pola menyisipkan -ok- sebelum vokal awal dan menghilangkan vokal kedua berikut huruf setelahnya pada sebuah kata, seperti *b(ok)ap(ak)* dari kata bapak, *b(ok)in(i)* dari kata bini, diciptakan komunitas preman (*bahasa prokem*).

Pola mengganti vokal awal (kecuali e) dengan e dan mengganti vokal akhir dengan ong, seperti *l(e)k(ong)* dari kata laki, *l(e)sb(ong)* dari kata lesbi, diciptakan komunitas banci (*bahasa bencong*).

Pola dengan menukar konsonan pada susunan huruf aksara Jawa [ha, na, ca, ra, ka (baris pertama), da, ta, sa, wa, la (baris kedua), pa, dha, ja, ya, nya (baris ketiga), ma, ga, ba, tha, nga, (baris keempat)], diciptakan kalangan mahasiswa di Yogyakarta (*basa walikan*).

Kata *dagadu* yang berasal dari kata *matamu* merupakan hasil penukaran konsonan m dengan d, sedangkan konsonan t dengan g. Pola pada *basa walikan* dilakukan dengan menukar baris aksara ganjil dengan ganjil, baris aksara genap dengan genap, untuk setiap konsonan. Sementara itu, vokalnya tidak berubah. Pola ini pun berlaku pada kata *dab* yang berasal dari kata *mas*.

Bahasa prokem, *bencong*, dan *basa walikan* yang frekuensi pemakaiannya meningkat itu kemudian oleh sebagian orang diklaim sebagai *bahasa gaul*. Padahal, jika dirunut kemunculannya, kata *gaul* yang juga membentuk frase *anak gaul* dan *mobil gaul* muncul lebih dulu dibandingkan dengan *bahasa gaul*.

Bahasa gaul juga tidak lebih dulu muncul dibandingkan dengan *bahasa bencong* yang sudah dipakai sejak Si Emon menemani Mas Boy membuat catatan atau *bahasa prokem* yang sudah dipakai sejak zaman Lupus mengunyah permen karet atau *basa walikan* yang aksaranya saja lahir lebih dulu dibandingkan dengan Patih Gajah Mada. Namun, *basa wa-*

likan mulai tenar ketika salah satu produsen cendera mata asal Yogyakarta menggunakan pada produk-produknya.

Andai orang-orang menyebut *bahasa prokem*, *bencong*, dan *basa walikan* itu bukan sebagai *bahasa gaul*, melainkan bahasa tidak baku yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, mungkin kita tidak perlu mengernyitkan dahi atau memicingkan mata ketika memikirkannya. Repot juga jika kata *(ka)gak*, *dapetin*, *di mane* diklaim sebagai bahasa gaul. Bukankah kata-kata dalam bahasa Indonesia itu hanya terpengaruh dialek Betawi?

Ya, begitulah bahasa, fenomena alam yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia. Perkembangannya pun mengikuti zaman. Mungkin, kita pun akan menjadi orang yang *katro* kalau telat mengikutinya. Oleh sebab itu, gaullah biar *gak katro*!

BAHASA INFOTAINMENT

Habib Mawandhi

“**D**i balik wajah cantiknya, ternyata Marcella terlibat kasus kekerasan.” Itulah penggalan kalimat yang diucapkan seorang pembawa acara *infotainment* (ah, istilah apa pula ini?) sebuah televisi swasta.

Di benak saya, ucapan pembawa acara itu berarti ‘Marcella cantik tapi kejam’. Kalimat dengan rasa sama bertaburan saat acara bertajuk *infotainment* di sejumlah televisi swasta. Taburan berita tentang Marcella mulai terjadi sejak akhir 2008. Marcella Zalianty, si bintang sinetron muda nan cantik, terlibat kasus penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap Agung Setiawan. Kasus yang melibatkan Marcella Zalianty dan pembalap Ananda Mikola itu jadi santapan empuk *infotainment*!

Salahkah *infotainment* menggunakan bahasa hiperbola? Saya pikir tidak. Kalau tidak *lebay* (bahasa anak-anak gaul sekarang yang merujuk pada berlebihan) justru *infotainment* kehilangan cirinya. Ya, itulah *infotainment*, yang konon berasal dari kata *information* dan *entertainment*. Pendeknya, informasi yang menghibur.

Dalam *infotainment*, seremeh apa pun informasi, akan digiring dalam bingkai seks, kekerasan, dan sensasional. Bingkai ini yang kemudian klop dengan bahasa yang hiperbolis. Agar tampak dramatis, mungkin. Atau, ingin melibatkan emosi penonton lebih dalam.

Hal mengganggu kemudian datang. Para pekerja *infotainment* disebut sebagai jurnalis. Bisakah? Kita tahu, jurnalisme mengabdikan pada kepentingan publik. Verifikasi menjadi esensi. Berita mesti cerdas, bukan saja soal isi, melainkan juga dalam bersiasat dengan keterbatasan ruang dan waktu di media massa.

Andreas Harsono, penyunting buku *Jurnalisme Sastrawi*, salah satu aliran dalam jurnalisme yang menekankan pada narasi, mengatakan dalam pengantar buku itu kalau jurnalisme sastrawi bukan reportase yang ditulis dengan kata-kata puitis. Sering orang salah mengerti. Narasi boleh puitis, tapi tak semua prosa yang puitis adalah narasi.

Meski beraliran narasi, jurnalisme tetap menekankan pada efektivitas dan efisiensi. Tidak boleh boros dengan kata dan kalimat yang berlebihan. Biarkan fakta berbicara. Hitam ya hitam. Putih ya putih. Tak perlu bantuan hiperbolis.

Masyarakat kita memang suka dengan sajian *infotainment* plus narasi hiperbolis dari naratornya. Tengok saja acara serupa yang ramai bermunculan. Layaknya orang minum obat, tiga kali sehari. Ini bukti jika rating *infotainment* tinggi. Tapi bukan berarti informasi yang disampaikan bermanfaat bagi publik. Sekali lagi ini hanya hiburan.

Sebab itu, label pekerja *infotainment* terasa pas bagi awak *infotainment*. Mereka adalah orang-orang yang berjasa memberikan hiburan ke masyarakat. Gayung bersambut, di tengah harga-harga yang tak kunjung turun meski BBM sudah turun tiga kali, kelakuan pejabat negara yang saat tampil di televisi tak jauh-jauh dari kasus korupsi, *infotainment* pun jadi kanal pilihan hati. Apalagi yang jadi sumber berita selebriti cantik dan tampan dengan segala pernak-pernik kehidupan glamor. Dibumbui dengan bahasa yang dramatis, makin *mak nyus* saja bukan?

LAGI, SECARA GITU LOH

Oyos Saroso H.N.

Setahun lalu, di kolom ini Ratih Rahayu mengulas soal kata gaul *secara gitu loh*. Saya kembali tergelitik untuk mendedahkan kata gaul itu karena saya perhatikan bahasa gaul makin mendominasi di ruang-ruang publik. Bahasa gaul yang menerabas makna umum tidak hanya dipakai secara terbatas di kalangan anak baru gede (ABG), tetapi juga telah merambah media televisi. Kata *secara* yang pemakaiannya tidak tepat pun acap dipakai di forum-forum resmi.

"Ya... pokoknya *secara* kita hal itu dianggap melanggar hukum," ujar seorang penegak hukum saat ditanya wartawan tentang kasus korupsi di sebuah lembaga. Seorang pembawa acara informasi dan hiburan di televisi pun dengan enteng mengatakan, "Wah, pemirsa, artis yang satu ini *secara* kita sih bisa dibilang lagi jadi buah bibir gitu."

Saya bukanlah alergi dengan bahasa gaul. Itu lantaran fakta memang membuktikan bahwa bahasa gaul mempermudah pergaulan. Suasana percakapan antara dua orang atau lebih pun akan jadi makin terasa akrab. Bahkan, karya sastra semisal cerpen, novel, dan lakon drama pun ada yang memakai bahasa gaul untuk membuat karya itu lebih "hidup". Kalau begitu, di mana letak salahnya?

Sepanjang kata-kata dalam bahasa gaul itu tidak mengubah arti atau maksud penutur bahasa secara umum, tentu saja sah-sah saja dipakai dalam bahasa lisan maupun tertulis. Dalam konteks seperti itu, bahasa gaul justru akan memperkaya bahasa Indonesia. Namun, jika kata-kata gaul itu tidak jelas asal-usulnya, tidak bisa mengganti makna kata atau suatu maksud yang sudah dianggap umum, dan hanya sebagai bentuk kekurangtahuan penuturnya terhadap pemakaian kata, jelas tidak semestinya dikembangkan.

Sejak zaman saya kuliah pada akhir tahun 80-an, misalnya, banyak kawan sering bilang, "Ke *perpus* yuk!" Ternyata yang dimaksud kawan saya itu adalah *perpustakaan*. Bagaimana kata bentukan yang berasal dari kata dasar *pustaka* dipotong begitu saja jadi *perpus*? Saya perhatikan, kata *perpus* pun masih laris-manis di kalangan mahasiswa dan pelajar.

Kembali ke kata *secara* dan frase *secara gitu loh*, kata dan frase itu tersebut jelas tidak bisa dipakai untuk menggantikan kata tugas *karena*. Kata *secara*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI, 2005: 195), berasal dari kata *cara*. Artinya antara lain: 1) sebagai; selaku, seperti; 2) menurut (tentang adat, kebiasaan, dsb.); 3) dengan cara; dengan jalan; 4) dengan.

Dalam obrolan di Facebook dan jaringan surat elektronik, para ABG sering menulis begini: "Iya *neh* pada *lom* aku cobain *secara* aku paling *males* *lok kudu pake-pake gitu-gituan* segala", "*Secara* kita *mah* yang seperti itu jelas salah *dunk*", "Pokoknya *secara* aku *ngefans* banget deh *ama* si Samson", "Waduh, *chanyank* gue suka banget *ama* kue buatanmu, *secara nyokap* gue belum tahu gimana cara buatnya", "Aku malah naik angkot, soalnya *secara* aku *dah* lama banget *gak* pernah *naek* kendaraan umum", "Gue sih *enjoy-enjoy aja* *ama* dia,

soalnya meskipun dia bos *gue*, tapi *secara* aku udah kenal akrab banget sama dia *gitu loh*".

Kalau kita perhatikan, pemakaian kata *secara* dalam bahasa gaul itu hampir selalu dirangkaikan dengan subjek (aku, kita, dia, mama). Kata *secara* posisinya sebagai konjungsi yang artinya dianggap sama dengan *karena* atau *berhubung*. Namun, jelas sekali bahwa menyamakan arti kata *secara* dengan *karena* atau *berhubung* sangat tidak tepat atau tidak berterima menurut tata kalimat. Kalau ditambah dengan kata *gitu loh* akan tampak bahwa *gitu loh* dimaksudkan untuk menekankan makna kata *secara*. Kata *secara* sendiri dimaknai sebagai preposisi.

Bahasa, bagaimanapun merupakan cermin sebuah masyarakat. Sebuah kata mula-mula bermakna *arbriter* (manasuka), tetapi kemudian akan diakui masyarakat pemakainya dan memiliki makna tertentu jika intensitas pemakaiannya tinggi. Meskipun bersifat manasuka, pembentukan sebuah kata, frase, atau istilah tertentu tidak boleh asal-asalan. Dengan begitu, pembentukan kata gaul pun tidak boleh keluar dari konteks makna yang umum.

Kata *say* dalam bahasa gaul bisa merujuk pada makna *sayang*, *cubit* bisa merujuk pada *yang enak dicubit*, bahkan kata *skul* pun bisa dilacak rujukannya pada makna *sekolah*. Nah, kalau memaksakan kata *secara* dengan rujukan makna *karena* atau kata *ker* dengan makna *kerja*, tentu itu sebuah pemeriksaan bahasa. Ya, bahasa gaul silakan berkembang, tapi jangan dengan melakukan pemeriksaan!

APA ARTI NGENET?

Agus Utomo

Istilah *ngenet* atau *netter* tentu tidak asing bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca *Lampung Post* karena rekan-rekan sering menggunakan istilah ini. Istilah tersebut dipakai agar memudahkan percakapan untuk menggabungkan beberapa kata yang dirasa panjang sehingga lebih sering dipakai istilah *ngenet*.

Tidak diketahui dari mana asal-muasal digunakannya istilah *ngenet* yang menurut arti sebenarnya adalah 'mencari data, berita, informasi, berkirim pesan, atau bermain *game* lewat internet'. Tanpa disadari kita sering mendengar atau bahkan menggunakan bahasa yang sebenarnya bisa dikatakan tidak jelas.

Istilah-istilah yang terasa asing dan merupakan gabungan beberapa kata yang dipopulerkan sendiri. Penggunaan istilah tersebut tak dapat dinafikan sangat dekat dengan kita atau bahkan kita juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam percakapan dengan rekan kita.

Mendengar istilah tersebut bagi sebagian orang tentu aneh. Sementara itu, bagi pengguna istilah atau komunitas yang betah berlama-lama di depan internet, mereka merasa lebih nyaman dan mudah. Namun yang perlu dicermati, dalam kebahasaan Indonesia tidak terdapat istilah tersebut. Penulis juga telah berusaha mencari dalam *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga ternyata istilah ini tidak ditemukan.

Kemudian, menjadi hal yang harus diperhatikan ketika makin hari makin banyak istilah yang muncul yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Menggunakan istilah atau bahasa yang dibuat berdasar pada keinginan sendiri tentunya lebih baik dihindari karena istilah yang selanjutnya lazim digunakan pada kalangan tertentu mungkin akan memberikan sebuah pemahaman yang berbeda pada kalangan lain.

Penggunaan istilah yang dipakai dalam keseharian tanpa adanya pemahaman yang sama justru akan menimbulkan. Perbendaharaan istilah yang makin luas dengan adanya kesepakatan beberapa pihak menggunakannya menjadi sesuatu yang ironis. Sebab, sebenarnya masih banyak perbendaharaan istilah dalam bahasa kita yang mungkin belum kita ketahui.

Perlu kita sadari, penggunaan istilah yang tidak dimengerti semua kalangan akan membawa pada kondisi yang tidak saling mengerti atas bahasa yang digunakan. Mungkin kini telah terjadi perkembangan bahasa yang masyarakat tidak sepenuhnya mengerti tentang kebahasaan yang mereka dengar dan mereka pakai.

Ada kecenderungan memakai yang lazim digunakan meski belum tentu benar dan tepat. Ketidaktahuan ini yang selanjutnya harus disikapi dengan bijak oleh para pakar yang mengerti kebahasaan dan juga dari masyarakat sendiri.

Selanjutnya adalah kini masyarakat, termasuk mahasiswa, harus dapat memilih sepakat atau tidak dengan penggunaan kata tersebut dengan melihat kondisi yang sebenarnya. Baik dari segi kebahasaan serta keadaan yang ada.

MENGAJI ATAU MENGKAJI?

Fikri Ariyanto

Dalam kajian morfologi bahasa Indonesia, semua kata dasar yang diawali oleh huruf *k, p, s, t*, akan luluh atau lesap menyatu dengan imbuhan *me-*, *mem-*, *meny-*, *meng-*, dll. Namun, dalam praktiknya, tidak bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Ada kata pilih yang bertemu dengan imbuhan *me-* berubah menjadi memilih (*p* luluh), itu diterima dengan *legowo* oleh masyarakat.

Ada lagi kata dasar *punya*. Bagaimana bila kata dasar yang diawali huruf yang harus luluh tersebut bertemu dengan imbuhan *me-*, tentunya kata *punya* harus berubah menjadi *memunyai*, bukan *mempunyai*.

Tetapi, bagaimana dengan reaksi masyarakat pemakai bahasa Indonesia? Secara alamiah masyarakat pemakai bahasa akan menerima kata *memilih*, *menusuk* (*t* pada kata *tusuk*, luluh), *menyapu* (*s* pada kata *sapu*, luluh), *mengubur* (*k* pada kata *kubur*, luluh), karena kita sebagai pemakai bahasa merupakan penutur asli bahasa Indonesia, tetapi saat harus mengetahui fakta mencengangkan mengenai kebenaran kata *memunyai*, *memesona*, *memerkosa*, dll., hidung kita pemakai bahasa Indonesia menjadi sengau, tidak enak mengucapkan kata yang benar tersebut, dan *ngotot* tidak mau memakai kata yang benar.

Terkait dengan peran para pakar bahasa, para pencinta bahasa, kaum akademisi, serta jurnalis, dalam menyosialisasikan bentuk kata yang benar, mereka (kaum akademisi dll.) juga sering sulit *legowo* untuk menerima bentukan kata *memunyai*, *memesona*, dan *memerkosa* sulit bagi mereka menerima luluhnya *k, p, s, t* bila bertemu imbuhan *me-*. Hingga kini, penulis, kaum akademisi, jurnalis, bahkan para pakar bahasa, bahkan tidak konsisten meluluhkan huruf *k* pada kata *kaji* yang bertemu dengan imbuhan *me-* yang harusnya berubah menjadi kata *mengaji* bukan *mengkaji*.

Dalam tulisan ilmiah semacam makalah, artikel, skripsi kebahasaan sekalipun, kata yang dipakai sering salah, yaitu *mengkaji*, padahal yang benar adalah *mengaji*, walau kita tahu yang benar adalah kata *mengaji*.

Tetapi, mungkin, karena para pakar bahasa, para pencinta bahasa, kaum akademisi atau jurnalis, tersebut tidak ingin tulisan ilmiah mereka terkontaminasi kata yang identik dengan anak-anak yang tengah membaca kitab suci Al-quran, mereka malu untuk memakai kata *mengaji* dan tetap memakai kata *mengkaji*, dalam kegiatan berbahasa mereka baik dalam tulisan maupun pengucapan.

Nah, kini, beranikah kita memakai kata tersebut dalam tulisan-tulisan kita, dalam kegiatan berbahasa kita? Itu merupakan tugas dari para pakar bahasa, para pencinta bahasa, kaum akademisi, serta jurnalis memberikan pengarahan kepada masyarakat pemakai bahasa agar menggunakan bentukan kata yang benar. Karena bila tidak disosialisasikan dengan baik, akan sulit membelajarkan pemakai bahasa untuk menerima kaidah-kaidah bahasa.

MENGAJI ATAU MENGKAJI?

Tanggapan atas Tulisan Fikri Ariyanto
Hasnawati Nasution

Saya tertarik mengomentari tulisan “Mengkaji atau Mengaji” yang terbit pada kolom Laras Bahasa pada Rabu, 15 April 2009. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa dalam tulisan ilmiah semacam makalah, artikel, skripsi kebahasaan sekalipun kata yang di pakai sering salah, yaitu *mengkaji*, padahal yang benar adalah *mengaji* walau kita tahu yang benar adalah kata *mengaji*.

Kata *mengaji* dan kata *mengkaji* memang berasal dari kata dasar yang sama, yakni kata *kaji*, tetapi penggunaan dua kata tersebut berbeda. Kata *mengkaji* lebih bersifat ilmiah karena mengkaji berkaitan dengan penelitian. Peneliti tidak akan menerima kata *mengaji* untuk suatu penelitian yang mereka lakukan. Begitu pun dengan kata *mengaji*, kata ini mengandung nilai sosial, berkaitan dengan agama Islam.

Semua orang akan tahu jika mendengar kata *mengaji*, mereka akan langsung berpikir bahwa hal itu berhubungan dengan membaca Alquran dan bila mendengar atau membaca kata *mengkaji* orang akan langsung berpikir ada sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* secara tegas dibedakan turunan kata *kaji*. Ada dua turunan kata *kaji*, turunan yang pertama adalah *mengaji*, yang bermakna ‘mem-

baca Alquran, belajar dan membaca tulisan Arab', sedangkan turunan yang kedua adalah *mengkaji* yang bermakna 'belajar, memeriksa, dan menyelidiki'.

Dua kata ini (*mengaji* dan *mengkaji*) memang kata yang unik, memiliki cita rasa bahasa yang berbeda. Penggunaan kata *mengaji* sangat sensitif dan sangat berhubungan dengan agama Islam. Coba saja bila kata ini kita contohkan dalam kalimat: Para ahli *mengaji* kehidupan pelacur yang masih belia.

Jika ditelaah dari segi morfologi tidak ada yang salah dari kalimat di atas. Akan tetapi, apa jadinya jika para ustaz atau umat Islam membaca kalimat tersebut? Mereka pasti akan merasa tersinggung karena kata *mengaji* dikaitkan dengan pelacur. Kata *mengaji* yang secara maknawi berkaitan dengan Alquran disandingkan dengan kata *pelacur* yang sangat terhina dalam Islam. Tentu saja hal ini akan membuat mereka marah, dan merasa agama Islam dihina.

Karena kesensitifan kata tersebut, Pusat Bahasa membuat dua bentuk turunan dari kata *kaji* yakni *mengkaji* dan *mengaji* dengan makna yang berbeda, seperti yang telah ditulis di atas. Jadi, kata yang tepat untuk contoh kalimat di atas adalah *mengkaji* sehingga kalimat tersebut akan menjadi seperti kalimat berikut: Para ahli *mengkaji* kehidupan pelacur yang masih belia.

Contoh lain dari perbedaan makna kata *mengaji* dan *pengkaji* dapat dilihat pada kalimat berikut: (1) Mereka sedang *mengaji* Alquran di masjid, (2) Mereka sedang *mengkaji* Alquran di masjid.

Kata *mengaji* dan *mengkaji* pada kalimat di atas memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, kata *mengaji* bermakna 'membaca Alquran, ada orang yang sedang membaca Alquran di dalam masjid'. Kata *mengkaji* pada kalimat kedua bermakna 'mempelajari isi Alquran, ada seke-

lompok orang di dalam masjid yang sedang mempelajari makna atau maksud yang terkandung dalam sebuah ayat Alquran'.

Selanjutnya, bagaimana dengan nama sebuah badan pemerintahan BPPT. Akankah kita menerima singkatan tersebut sebagai *Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi* atau *Badan Penelitian dan Pengajian Teknologi*? Tentunya akan terasa rancu bila digunakan kata *mengaji*, pastilah kita akan memilih kata *mengkaji* karena di tempat tersebut orang mempelajari dan meneliti teknologi, bukan membaca Alquran.

Jadi penggunaan kata *pengajian* dan *pengkajian* pada singkatan BPPT itu berbeda karena dua kata tersebut (*mengaji* dan *mengkaji*) memiliki perbedaan makna dan cita rasa bahasa yang berbeda.

Sudah selayaknya, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia, pengajar, dan jurnalis lebih memperhatikan penggunaan kata-kata yang tepat dan benar dalam penulisan karya ilmiah maupun dalam penulisan di media massa. Penggunaan kata-kata yang tepat akan memberikan makna yang tepat pula. Di samping itu, sudah kewajiban kita mengarahkan masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, salah satunya dengan mengenalkan kata-kata yang baik dan tepat dalam sebuah kalimat.

QUICK COUNT

Adian Saputra

Quick count menjadi istilah yang akrab di telinga pemirsa televisi selama hajatan pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif digelar. Melalui beragam lembaga survei, kata *quick count* ini akrab di telinga kita. Mungkin dalam sebulan pascapemilu, istilah ini akan masih kita dengar dengan intensitas yang sering.

Kata *quick count* memang bahasa asing, Inggris tentunya. Jika kita mau mengindonesiakan, saya pikir *penghitungan cepat* merupakan frase yang pas untuk menggantikan kata itu. *Penghitungan cepat* merupakan jalan tengah buat kita yang amat menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jika kata itu disampaikan kepada khalayak, baik melalui surat kabar, televisi, dan radio, insya Allah kata ini akan akrab dipakai. Jadi, untuk pemilihan umum calon presiden sekitar bulan Juni mendatang, kita sudah bisa mengganti kata *quick count* dengan *penghitungan cepat*.

Dalam ranah politik, khususnya pemilu, selain kata *quick count*, masih ada beberapa kata yang muncul. Masalahnya ya lagi-lagi diangkat dari bumi Inggris Raya. Misalnya, *voter education*. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, Lembaga yang dipimpin seorang presiden ini misalnya, mengadakan semacam kegiatan pendidikan untuk pemilih pemula beberapa waktu lalu.

Mereka menamai kegiatan itu dengan *voter education*. Memang enak mendengarnya. Gagah begitu. Namun, kalau mau sedikit berpikir dan mencari padanan yang pas, saya pikir istilah *pendidikan untuk pemilih* juga enak dipakai. Enak didengar, langsung paham dengan makna, dan yang pasti tidak membuat kening berkerut meski sedikit.

Ada pula istilah *swing voter*. Ini maksudnya merujuk pada mereka yang bukan pemilih loyal partai tertentu. Juga dimaksudkan buat mereka yang belum menentukan pilihan.

Kalau menurut saya, istilah *swing voter* bisa dimaknai dengan 'pemilih mengambang'. Ya bukan dimaknai ada pemilih yang benar-benar mengambang secara denotatif, melainkan pemilih yang tidak loyal. Ya bisa saja kata mengambang yang dipilih karena ada kata *swing*-nya. *Swing*, kalau kita rujuk dalam *Kamus Inggris Indonesia* karya John M. Echols dan Hasan Shadily berarti 'ayunan dan buaian'. Kata *ayunan* dan *buaian* bisa diartikan 'gerakan yang bergantung pada siapa yang mengayun atau membuai'. *Pemilih mengambang* akan sangat bergantung kepada tokoh, partai, dan individu politik tertentu yang bisa membuai atau mengayun mereka. Tujuannya tentu saja untuk menconteng partai atau calon anggota legislatif tertentu.

Fenomena keinggris-inggrisan, selain pada ranah politik, juga acap kita temui dalam ruang publik yang lain. Beberapa waktu lalu saya melewati sebuah toko komputer. Di plangnyanya saya membaca; *sales, service, maintenance*.

Aduh, saya kira sulit langsung mencerna artinya, apalagi buat yang belum fasih berbahasa negerinya Pangeran Charles itu. Kata-kata itu sebenarnya akan mudah dipahami dan enak didengar jika diganti dengan kata *penjualan, perbaikan, dan perawatan*. Ah, itu saya pikir lebih punya kebanggaan. Enak didengar dan mudah dipahami kan? Insya Allah.

Ya mudah-mudahan saja kita semua makin hari makin pandai berbahasa. Termasuk juga berpikir ulang saat akan menulis sebuah kata, selarik kalimat atau sejumput naskah dengan bahasa Inggris. Jika masih ada padanan dalam bahasa Indonesia, alangkah indahnya bila kata dalam bahasa Indonesia itu yang dipakai. Anda setuju? Insya Allah ya.

Wallahualam bissawab.

BEDEBAH!

Juwendra Asdiansyah

Masih ingat *Wiro Sableng* dan *Saur Sepuh*? Novel *Wiro Sableng* dan (sandiwara radio) *Saur Sepuh* adalah dua di antara beberapa cerita silat yang pernah begitu digemari pada era 1980-an.

Wiro Sableng rekaan Bastian Tito adalah jagoan berjudul Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dengan aneka jurus dan ilmu super sakti antara lain Pukulan Sinar Matahari, Benteng Topan Melanda Samudera, atau Kunyuk Melempar Buah. Pendekar dari Gunung Gede ini begitu digdaya karena punya sederet guru dan sahabat yang kesaktiannya pilih tanding seperti Sinto Gendeng, Tua Gila, Kakek Segala Tahu, Dewa Ketawa, dan Bujang Gila Tapak Sakti.

Saur Sepuh begitu memesona dengan figur sentral Brama Kumbara, sang Satria Madangkara yang sakti mandraguna. Seperti jagoan lainnya, Brama juga memiliki ilmu kanuragan kelas wahid mulai Aji Gelang-Gelang, Ajian Serat Jiwa, hingga Lampah Lumpuh. Para pencinta karya Niki Kosasih ini juga belum lupa dengan Si Pedang Setan, Mantili atau Lasmini yang seksi tapi sakti, dengan reputasi sebagai pemuja dan penggoda abadi Brama.

Selain jurus-jurus hebat, ilmu-ilmu sakti mandraguna, tokoh-tokoh digdaya nan aneh, dan pertarungan-pertarungan seru, yang juga sangat khas dari cerita silat adalah ragam bahasanya. Selain baik dalam struktur, kaya akan majas, serta detil mendeskripsikan karakter, latar, dan adegan,

bahasa cerita silat juga punya banyak istilah yang penuh impresi, memikat, dan khas.

Di banyak cerita, misalnya, kerap muncul kata *warok*, *begundal*, atau *bajingan*, sebagai kata ganti *perampok* atau *penjahat*. Adegan perkelahian, yang merupakan bagian paling seru, biasanya dimulai dengan saling caci, hujat, atau bentak dengan kata-kata seperti *keparat*, *bangsat*, *bajingan*, dan *bedebah*. Ketika dua orang bertemu lazimnya akan terucap salam, *sampurasun!* Yang lalu dijawab, *rampes*.

Karakter dalam cerita biasanya saling menyapa dengan panggilan khas macam *ki sanak*, *aden*, *anak muda*, *tuan*, atau *juragan*.

Untuk menunjukkan keterangan waktu, cerita silat juga punya istilah sendiri. Jika matahari sedang gagah-gagahnya sekitar pukul 12 siang, bisa diilustrasikan dengan kalimat "Mentari tepat di ujung kepala". Saat Wiro membuat janji pertarungan dengan musuh bebuyutannya, Pangeran Matahari, ia akan berkata, "Kutunggu kau di puncak Seme-ru dua purnama di muka." Empat kata terakhir, maksudnya dua bulan lagi.

Untuk jarak atau waktu tempuh, lazim dihadirkan dengan kalimat seperti "Teruslah berkuda Datuk, kau akan mencapainya dalam sepeminuman teh." Atau, "Tak sampai sepenanakan nasi, Raden Samba akhirnya tiba di tepi hutan." Soal berapa lama waktu standar meminum teh atau menanak nasi (yang sebenarnya bisa sangat berbeda-beda), pembaca atau pendengar tidak terlalu ambil pusing.

Tak kalah uniknya adalah kata atau kalimat untuk menunjukkan ukuran seperti *sepemelukan orang dewasa*, *sepelemparan batu*, *sepenggalahan*, *setombak*, *sehela*, atau *sedepa*.

Kini rupa-rupa kata atau kalimat dalam cerita silat itu nyaris hilang dalam kebiasaan atau memori kebahasaan kita, tulisan maupun lisan. Kondisi itu tampaknya terutama dise-

babkan semakin langkanya produksi cerita silat Indonesia baik dalam format novel, sandiwara radio, cerbung, atau komik. Wajar saja jika generasi MTV kini bisa jadi terbungong-bungong mendengar kata *sampurasun*, *sehela*, atau *sedepa*.

Tidak semua memang bahasa cerita silat sudah hilang dari peredaran. *Keparat*, *bangsat*, atau *bajingan*, yang merupakan sinonim untuk kata *makian*, rasanya masih banyak dipergunakan. Yang agak jarang dan nyaris punah adalah *bedebah*. Mungkin karena *bedebah* kini mengalami pelunakan makna yang amat dalam.

Jika kini ada dua orang mau berkelahi, lalu salah satunya berkata, "Dasar bedebah lo!" rasanya emosi lawannya yang sudah di ubun-ubun langsung turun atau malah spontan tertawa. Tidak percaya? Coba saja sendiri. Dasar bedebah!

UNTUK TUHAN: UMAT ATAU HAMBA

Diah Meutia Harum

Sesuai dengan dasar negara Indonesia yang berketuhanan, demikian pula sikap hidup orang Indonesia, religius dan selalu mensyukuri nikmat Tuhan, tak sulit kita menjumpai ungkapan-ungkapan religius keluar dari mulut orang Indonesia.

Sebagai bangsa yang beragama, sudah sewajarnya warga negara Indonesia selalu menyelipkan di sana-sini, entah lewat lisan maupun tulisan, kata-kata yang menyiratkan hubungan dengan Sang Pencipta.

Suatu hari ketika saya menyaksikan acara sinetron kesukaan saya, muncullah kalimat yang membuat jidat saya sedikit berkerut. Di sana, tokoh ibu menasihati anaknya, katanya, "Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya." Dan lain kali, ketika saya menyaksikan acara gosip yang mengabarkan kemalangan seorang artis, si pembawa acara juga menyelipkan nasihat bijak, "Kita sebagai umat-Nya jangan pernah berputus asa."

Apakah ada yang aneh? Jika Anda seorang pemerhati atau yang peduli terhadap bahasa, Anda akan mendapati bahwa tidaklah tepat merangkaikan kata *umat* dengan kata *Tuhan*. Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) kata *umat* berarti 'para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; sedangkan kata *hamba* berarti abdi'.

Dalam konteks agama Islam, yang dimaksud dengan kata *umat* adalah 'pengikut (*follower*) seorang nabi, rasul ataupun agama tertentu, misalnya umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, atau umat Muhammad'. Lalu apakah kata yang lebih tepat dirangkaikan dengan kata *Tuhan*? Kata *Tuhan* akan lebih tepat apabila dirangkaikan dengan kata *hamba*. Manusia adalah *hamba Tuhan* bukan *umat Tuhan*.

Coba saja, misalnya kita menulis kalimat "Tuhan selalu mendengar doa umatnya" bandingkan dengan kalimat "Tuhan selalu mendengar doa hambanya". Kata *hamba* mutlak menjadi milik Tuhan. Kata *umat* dan kata *hamba* tidak dapat dipertukarkan apalagi dipersamakan pemakaiannya, contohnya, "kita sebagai umat Muhammad..." bandingkan dengan "kita sebagai hamba Muhammad...."

Tentunya itu adalah kesalahan besar yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan salah kaprah. Jelas di sini bahwa kata *umat* berada dalam ruang lingkup yang lebih kecil dibanding dengan kata *hamba* yang lebih berskala besar dan bersifat universal.

Sayangnya, kesalahan berbahasa yang menurut saya cukup serius itu banyak dilakukan orang-orang yang terkait dengan media yang notabene mempunyai akses langsung kepada masyarakat. Saya pikir orang-orang ini pun kelihatannya tak mau repot-repot untuk lebih mendalami bahasa sendiri.

Beberapa bulan yang lalu (tanggal 28 Maret 2009) dalam acara Panasonic Award, saya menyaksikan salah satu tokoh pertelevisian Indonesia. Saya kira Tantowi Yahya berulang-ulang mengucapkan kata-kata mubazir seperti *agar supaya, adalah merupakan* dalam pidatonya. Sungguh memprihatinkan nasib bahasa kita, selalu digunakan orang tapi tak dipedulikan pemakaiannya.

ELEKTABILITAS

Oyos Saroso H.N.

Kita yang lama tinggal di kampung atau di pucuk gunung dipastikan akan bingung ketika bersirobok dengan kata *elektabilitas*. Namun, ketika kata itu dirangkaikan menjadi kalimat "Elektabilitas JK-Win kalahkan SBY-Boediono", tahulah kita bahwa *elektabilitas* berarti 'daya keterpilihan atau peluang untuk dipilih'.

Jauh sebelum para calon presiden dan wakil presiden mendapatkan pasangan dan mendaftarkan diri ke KPU, kata *elektabilitas* sudah bertaburan di media massa. Kata itu sering dipakai lembaga survei, para peneliti, dan jurnalis. Masyarakat di Indonesia pun menjadi terbiasa melafalkan kata *elektabilitas*. Ia menjadi kata yang "terberi", kata yang seolah jatuh dari langit.

Kita memang telah menyerap kata dari bahasa asing itu ke bahasa Indonesia. Tak perlu diperdebatkan lagi, *elektabilitas* sudah pasti berasal dari kata *electability* (bahasa Inggris). Ia diturunkan dari kata *elect* (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari kata *elect* antara lain *election*, *electable*, *elected*, *electiveness*, *electability*, dan sebagainya.

Adakah kata *elect* dalam bahasa Indonesia yang sudah kita gunakan sehari-hari sehingga kita bisa menurunkan kata *electability* menjadi *elektabilitas*? Kenapa kita begitu mudah takluk untuk menjemput kata *elektabilitas* padahal dalam bahasa Indonesia sudah tersedia kata *keterpilihan*?

Untuk menyebutkan proses memilih calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden, kita memakai kata *pemilihan* (berasal dari kata *pilih*). Dari kata *pilih*, jadilah kata *pemilihan*, *pemilihan umum* (*pemilu*), *pemilihan kepala daerah* (*pilkada*).

Orang Inggris menyebut *walikota terpilih* dengan *mayor elect* dan *presiden terpilih* dengan *president elect*. Berkaitan dengan itu, media massa di Lampung sudah benar ketika menulis "Gubernur terpilih Lampung Sjachroedin akan dilantik 2 Juni 2009".

Saya berusaha mencari kata *elect* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Namun, hasilnya sia-sia. Yang mengherankan, kata *elektabilitas* sendiri sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya: Bagaimana mungkin sebuah kata bentukan dari bahasa asing dengan sangat gampang kita terima sementara kita masih merasa asing dengan kata dasarnya? Bukankah itu sebetulnya kepasrahan atau ketidakberdayaan kita terhadap serangan bahasa asing?

Memang, sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa di dunia, kehadiran bahasa asing tidak bisa kita hindari. Bahkan, kata *munsyi* Remy Silado, 9 dari 10 kata dalam bahasa Indonesia adalah asing. Namun, yang perlu dicatat, kata-kata asing yang kita serap itu sudah mengalami "asimilasi sedemikian rupa" sehingga menjadi terasa "tak asing" lagi.

Kata *elektabilitas* hanyalah satu kasus. Selain *elektabilitas*, kita juga mengenal kata *preferensi* (kecenderungan). Ini juga kata bentukan dari kata *prefer* (cenderung). Dalam praktik berbahasa sehari-hari kita memakai kata *cenderung*, bukan *prefer*. Misalnya: "SBY cenderung memilih calon wakil presiden yang nonpartai", bukan "SBY *prefer* memilih calon wakil presiden yang nonpartai". Apalagi "SBY *prefer to choice* calon wakil presiden yang nonpartai".

Nah, bandingkan, misalnya, dengan kata *loyalitas* (*loyalty*) yang diturunkan dari kata *loyal* (Inggrisnya juga *loyal*), *efektivitas*, *efisiensi*, dan *stabilitas*.

Saya menduga pemakaian kata *elektabilitas* lebih cenderung disebabkan keefektifan kata tersebut dibanding dengan kata *keterpilihan*. Kita juga lebih suka memakai kata *efektivitas* ketimbang *keefektifan*, *stabilitas* ketimbang *kestabilan*, serta *kualitas* dibanding dengan *mutu*.

Mungkin juga memakai kata *elektabilitas* dan *-tas* lain terasa lebih keren dibanding dengan *keterpilihan*. Jadi, memang mungkin sudah nasibnya begitu kalau kata *kecakapan* pun kini juga tersingkir oleh kata *abilitas* (*ability*).

SEBAB PENGRAJIN TAK BERARTI RAJIN

F. Moses

Andai ada sebuah kalimat berbunyi demikian: “Kemarin saya melihat pengrajin itu tengah membuat barang-barang kerajinan berupa boneka yang terbuat dari serat kain.” Mungkin, Anda juga akan mengatakan kira-kira demikian: “Ya, bukan hanya pengrajin boneka, melainkan pengrajin layang-layang, pengrajin topi, dan pengrajin kaus oblong.”

Mengapa pengrajin dan bukannya perajin?

Kedua kata itu acap saya temukan baik dalam situasi lisan maupun tulisan. Apakah kata *perajin* lebih tepat daripada *pengrajin*? Memang. Akan tetapi, nanti dulu. Mari kita “berkorek-ria” sejenak.

Dalam bahasa Indonesia, huruf yang diawali konsonan *r* tak berhak untuk memperoleh bunyi sengau apabila mendapat awalan *me-N-* atau *pe-N-*. Dengan kata lain, awalan tersebut berbentuk *me-* dan *pe-* apabila ditambahkan pada kata dasar yang diawali dengan konsonan *r*, misalnya untuk kata dasar *racik* menjadi *meracik* dan *peracik*, *rangsang* menjadi *merangsang* dan *perangsang*.

Untuk menyatakan pengertian mereka yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan, bentuk manakah

yang benar: *pengrajin* atau *perajin*? Apakah kata *pengrajin*, sebenarnya, dapat kita gunakan untuk mengganti kata *perajin*?

Dalam bahasa Indonesia, sekali lagi, awalan *pe-N-* menyatakan pelaku dari suatu perbuatan, *peramu*: orang yang meramu, *pemanjat*: orang yang suka memanjat. Tetapi *peN-*, ketika dirangkaikan dengan kata sifat menyatakan "orang yang mempunyai sifat atau yang suka berbuat" misalnya pada kata *pemalas*: Orang yang mempunyai sifat malas, *pembohong*: Orang yang mempunyai sifat suka bohong.

Lantas, dalam hubungan ini, tepatkah makna *perajin* digantikan kata *pengrajin*? Bukankah semua *pengrajin* itu adalah *perajin*? Setiap *pengrajin* itu tak berarti rajin, ada juga yang malas. Jadi, tak semua *pengrajin* itu adalah *perajin*. *Pengrajin* dan *perajin* menyatakan makna yang berbeda. Tak dapat saling menggantikan.

Ya, (mungkin) tak dapat saling menggantikan, dari segi makna kata *pengrajin* tidak berhubungan dengan kata *rajin*, melainkan dengan kata *kerajinan* (*tangan*). Itulah yang menyebabkan bila boleh dikatakan secara maknawi serasa tak pas ketika kata *pengrajin* dinalarkan dengan kata *rajin*. Kemudian salahkah kata *perajin*? Tidak.

Terlalu arbiter? Apalagi itu. Bukankah bahasa secara tidak langsung merupakan "citraan" atas peradaban zaman itu sendiri, dari balik suara hati yang bernamakan komitmen bersama, entah zaman apa, dan komitmen yang bagaimana dari milik siapa? Intinya, mengapa mesti dipertahankan apabila tak bernalar? Itu saja.

Kembali pada andai ada sebuah kalimat, berbunyi demikian: "Kemarin aku melihat pengrajin itu tak membuat kerajinan berupa boneka dari serat kain, lagi." Rajinkah ia? Apakah layak disebut *perajin*?

Kembali pada makna, andai akhirnya kata *pengrajin* tetap dipertahankan sebab *pengrajin* tak berarti *rajin*, mungkin-kah? “Ya,” jawab saya.

FREE TAK SELAMANYA BEBAS

Danang Harry Wibowo

Sebuah stasiun televisi swasta terlihat kebingungan memilih kata yang *pas* untuk menginformasikan bahwa Pemerintah Kota Tegal memberlakukan peraturan baru tentang hari tanpa kendaraan bermotor di wilayahnya. Stasiun televisi itu menulis: Tegal berlakukan aturan *car free day* di kawasan alun-alun kota.

Persoalannya bukan pada Pemerintah Kota Tegal yang ingin kotanya bersih dari polusi setiap Minggu, bukan pula pada stasiun yang mengabarkannya, melainkan pada keter-sampaian informasi itu.

Persoalan campur-campur bahasa seperti pada imbau-an itu bukan pertama kali ditemui. Masyarakat pun sepertinya sudah sangat terbiasa dan mudah memaklumi, meskipun sadar bahwa percampuran bahasa seperti itu sering menyesatkan.

Jangankan berbahasa asing, imbauan yang berbahasa Indonesia saja masih sering disalahpersepsikan oleh banyak orang. Imbauan *bebas parkir* di beberapa pusat perbelanjaan, misalnya, sering tidak sesuai dengan harapan para pengelola.

Mereka pasti sering sakit kepala karena lokasi yang bertuliskan *bebas parkir* masih saja dipenuhi kendaraan. Mungkin, pengelola itu lupa kalau *bebas* itu berarti 'lepas

sama sekali (tidak terhalang, terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa), lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut), dan tidak terikat atau terbatas oleh aturan' (KBBJ).

Kalaupun ingin menyontek *free parking*, para pengelola itu mestinya total, jangan setengah-setengah. Di negeri asalnya, setiap orang leluasa parkir di sekitar tulisan *free parking*. Mereka sadar betul jika *free* itu sama artinya dengan *not restricted* (Oxford Advanced Learner's Dictionary).

Agaknya, masyarakat Indonesia senang dengan sesuatu yang berbau asing. Sayangnya, kita tidak pernah konsisten memperlakukannya, ada yang langsung dicaplok, ada yang dihidu terlebih dahulu. Jika yang berbau asing itu enak, *hap*, langsung dilahap.

Free sex, sebagai contoh, yang kita artikan 'seks bebas' itu jelas-jelas bukan budaya kita, sekarang ini, telah menjadi tren. Banyak organisasi, termasuk pemerintah, kebakaran jenggot mencari cara agar perilaku itu bisa diminimalisasi atau kalaupun tidak bisa, penyebaran penyakit kelamin akibat dari perilaku tersebut harus dihentikan lajunya.

Sebaliknya, hanya virus H1N1 (termasuk produk asing, bukan?) yang tidak diingini bangsa ini sehingga kita jijik dan serius menangannya. Nanti dulu! Jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan, jaga gengsi, sebuah tren, karena negara lain juga serius menangani persoalan flu yang satu ini.

Tampaknya, persoalan penyakit menular tidak memiliki kaitan dengan persoalan bahasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita pernah menyadari bahwa ada banyak pelaku seks bebas dan pengidap penyakit kelamin yang tidak mengerti imbauan *safe sex*, *use condom* atau *stop! free sex*? Apakah kita bisa mencegah virus H1N1 jika imbauan *stop the swine flu pandemic* itu tidak dipahami banyak orang?

Anehnya, masyarakat Indonesia sering memaksakan diri. Siapa yang akan disalahkan jika setiap Minggu alun-alun Kota Tegal tetap dipadati mobil (motor tidak termasuk) karena banyak orang yang mengartikan *car free day* itu dengan 'hari bebas mobil' seperti mengartikan *free sex* (seks bebas)?

Harusnya, kita mencontoh organisasi *From the People of Japan*. Mereka sadar kalau kampanye yang dilakukan di Indonesia untuk mencegah penyebaran AIDS akan sia-sia apabila imbauan yang mereka sebarkan tidak dituliskan dengan bahasa Indonesia. Imbauan itu dengan ramahnya ditulis: Gunakan kondom, untuk cegah IMS dan HIV.

ABSEN TAPI HADIR

Diah Meutia Harum

Salah kaprah. Itulah hal yang sering terjadi di negeri kita Indonesia. Kesalahan berbahasa bagi sebagian orang barangkali bukan menjadi hal yang penting dan istimewa, dan tidak perlu dikoreksi. Namun, hal kecil yang dibiarkan sesungguhnya berpotensi merusak bahasa, terutama apabila digunakan terus menerus.

Kali ini, izinkanlah saya menyinggung salah satu kesalahan kaprahan yang sering dibuat masyarakat kita. Bagi Anda yang sehari-hari bekerja di kantor, mungkin kenal dengan kata yang satu ini: *absen*. Apabila kita berangkat bekerja, hal yang biasanya kita lakukan saat tiba adalah memasukkan data kehadiran kita, entah itu dengan cara manual maupun dengan teknologi canggih lewat sidik jari.

Di kantor saya, kami memasukkan data kehadiran dengan menggunakan mesin yang bernama *Amano* atau yang biasa kami sebut dengan *ceklok*, mungkin karena kartu yang digesekkan itu mengeluarkan bunyi “ceklok”. Tetapi tentu saja bukan itu yang akan saya bicarakan dalam kolom ini.

Hal yang akan saya bahas adalah suatu hal yang cukup mengganggu, setidaknya pendengaran saya. Saya tak tahu, apakah Anda menggunakan istilah ini juga ketika melaporkan kehadiran Anda.

Kata *absen*, ya, biasanya kita melaporkan kehadiran kita dengan kata *absen*. Di sekolah, biasanya guru mendaftarkan kehadiran muridnya menggunakan *buku absensi*. Begitu pula, di tempat kita bekerja, kita melaporkan kehadiran kita dengan kata *absen*.

Sesungguhnya, penggunaan kata *absen* menjadi salah satu contoh ketidakcermatan kita dalam berbahasa. Kalau Anda memiliki waktu dan berkenan membuka-buka *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Anda akan menemukan arti kata *absen* adalah 'tidak hadir atau tidak masuk (kerja, sekolah, atau lainnya)'.

Sering saya menyaksikan dan mengalami sendiri, entah itu di televisi maupun dalam keseharian kita, kesalahan kaprahan ini. Saat saya atau kawan-kawan tiba di kantor, sering kami saling mengingatkan, "eh sudah *absen* belum?" atau saat jam pulang kantor tiba, "ah *absen* dulu".

Sampai di sini, saat Anda membaca tulisan ini barangkali Anda akan menyadari kerancuan penggunaan kata ini dan barangkali pernah Anda lakukan atau mungkin pernah Anda dengar penggunaannya oleh orang-orang di sekeliling Anda, lucu bukan.

Padahal, saat kita membaca surat kabar atau menyaksikan berita di televisi ada berita yang menyatakan si A diadili secara *in absentia* karena berhasil kabur saat berada dalam tahanan polisi. Anda mengerti bukan, yang dimaksud dengan berita tersebut berarti si A tidak hadir dalam persidangan.

Akan tetapi, mengapa kesalahan ini masih terus kita lakukan, padahal ada kata lain yang memang memiliki arti kata hadir. Sekali lagi jika Anda berkenan membuka *KBBI*, Anda akan menemukan kata *presensi* yang berarti kehadiran.

Alangkah baiknya apabila sekolah menggunakan *buku presensi* untuk mengetahui kehadiran siswanya, dan mema-

sukkan nama siswa yang tidak hadir ke dalam *daftar absensi*, nah terasa benar bukan? Begitu pula di kantor tempat kita bekerja, kita menggunakan *kartu presensi* untuk menandai kehadiran kita dan *absen* di saat kita berhalangan.

Anda tahu, kita sungguh harus memperbaiki hal ini. Walaupun terdengar biasa, penting untuk kelangsungan bahasa kita agar tidak mengalami pergeseran arti, apalagi karena kata yang kita bahas tadi adalah kata serapan yang seharusnya tidak berbeda makna dari kata asalnya. Meminjam kalimat salah satu iklan di televisi, “Apa kata dunia? Malu dong?”

EKONOMI KATA

Asarpin

Saya pernah membaca sebuah risalah tentang jurnalistik, kalau tidak salah, tulisan Rosihan Anwar. Dalam risalah itu Rosihan Anwar mengatakan, kalau saya tidak salah, kata *Perserikatan Bangsa-Bangsa* sebaiknya ditulis *Perserikatan Bangsa* saja. Mengapa? Sebab, tidak mungkin kata *perserikatan* hanya menunjukkan satu. Kata *perserikatan* itu sendiri sudah menunjukkan keragaman. Jadi untuk apa ditulis *Perserikatan Bangsa-Bangsa*.

Tidak hanya dalam penulisan kreatif saja dikenal ekonomi bahasa, tapi juga dalam bidang jurnalistik ditekankan pentingnya membuat kalimat pendek. Cukup banyak memang istilah yang sudah terkenal, tapi berisi kata-kata yang mubazir. Kasus *PBB* tadi hanya satu contoh. Sebagai suatu kata yang mubazir, ia tidak dipakai tidak mungkin mengganggu kelancaran komunikasi. Juga tidak mengubah apa-apa bagi tekanan sebuah kalimat.

Bahasa jurnalistik, masih menurut Rosihan Anwar, ialah bahasa yang membuang kata mubazir. Melalui perhitungan dengan baik sebuah kalimat dan memangkas apa yang disebut kata mubazir, bisa tercapailah efisiensi dalam kata. Efisiensi dalam kata? Ah, ekonomi banget!

Tak terhitung jumlah kata mubazir setiap kita membaca koran harian lokal di Lampung. Maka, anjuran untuk

menerapkan kembali ekonomi kata dalam berita saya kira tetap penting sampai kapan pun. Namun, yang jadi soal bagi saya adalah dari mana orang menerjemahkan ekonomi kata sebagai sama dengan hemat kata? Bukankah yang namanya ekonomi itu dekat sekali dengan pasar, yaitu sesuatu yang boros?

Ada beberapa contoh kata boros yang bisa diatasi. Misalnya, kata *syukur* cukup ditulis *sukur*. Kata *syahwat*, *syariat*, *syarah*, *insyaf*, tak perlu pakai *y* karena kata-kata itu sudah jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab lagi. Ada pula soal penambahan kata bantu yang tak perlu sehingga kalimat jadi hemat. Misalnya kata bantu *bahwa* sering kita jumpa dalam kalimat, yang sebetulnya cukup disiasati dengan membubuhkan koma, kata itu bisa hilang. Demikian pula *daripada*, *darimana*.

Kalimat yang pendek, tentu lebih enak dibaca. Hemat kata tentu memesonakan asal dilakukan dengan secermat mungkin. Namun, tiap penulis biasanya ada yang suka dengan kalimat-kalimat panjang dengan membubuhkan sekian koma, titik koma, dan titik dua dalam kalimat. Seno Gumira Ajidarma pernah menulis kalimat panjang hanya ada titik saat di akhir paragraf, tapi tetap sedap dibaca. Mungkin karena ketepatan Seno meletakkan tanda baca sehingga kalimat-kalimatnya justru elok dan bergaya.

Demikian pula pada kasus esai-esai Sutardji Calzoum Bachri yang menggunakan kalimat panjang, tetap enak dibaca, tapi mungkin hanya perlu bagi dirinya, bukan untuk ditiru. Sastrawan, filsuf, dan jurnalis andal adalah orang-orang yang biasanya suka menunjukkan pentingnya menulis dengan kalimat padat tapi hemat, sederhana tapi jernih. Catatan pinggirnya Goenawan adalah contoh terbaik penggunaan ekonomi kata. Berita majalah *Tempo* juga menekankan ekonomi kata-kata.

Namun, ada kasus seorang penulis yang mengebiri kata demi hemat kata. Biasanya, dalam proses pengeditan, ada beberapa kata yang dipanggal tanpa memperhitungkan kata tersebut justru harus ada. Bukan berarti bahwa asas ekonomi kata lantas kita dapat menghilangkan kata dan kalimat sesuka hati kita. Ada kata yang dapat dihilangkan, ada pula yang tidak. Misalnya kata dengan. Kata ini biasanya menjadi penghubung kata atau frase yang besar pengaruhnya dalam kalimat. Hanya karena ingin hemat kata, kata dengan dihilangkan sehingga menjadi kalimat rancu.

Masih bisa dimaklumi jika “dengan” atau “terdiri dari” yang dikebiri itu kita temukan dalam puisi mantra Sutardji atau esai main-main Iwan Simatupang, yang memang tak berurusan dengan kata kamusan. Sebagai pembaca, gejala semacam itu tak mungkin saya dekati dengan pendekatan bahasa yang baik dan benar. Sebab, bisa rugi awak!

INTERNASIONAL

Yulfi Zawarnis

Status internasional yang disandang salah satu rumah sakit di Tangerang mulai dipertanyakan seiring dengan kasus yang sedang digulirkan rumah sakit tersebut. Berbagai pihak mempertanyakan apakah betul rumah sakit itu berstatus internasional? Lalu apa bedanya rumah sakit yang berstatus internasional dengan rumah sakit umum, rumah sakit umum pusat, dan rumah sakit umum daerah?

Di Lampung saja ada beberapa rumah sakit dengan status masing-masing, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), misalnya, terdapat hampir di semua kabupaten di Lampung. RSUD Sukadana, RSUD Mayjen H.M. Ryacudu Kotabumi, RSUD Kalianda, RSUD Pringsewu, dan RSUD Abdul Moeloek. Belum lagi kota-kota besar yang memiliki banyak rumah sakit. Di Jakarta, misalnya, ada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Pertamina dan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, di Sleman ada RSUP Dr. Sardjito, dan di Bandung ada RSUP Hasan Sadikin.

Di samping itu, yang jadi perbincangan tentunya, rumah sakit yang berstatus internasional. Rumah Sakit OMNI Internasional, Rumah Sakit Surabaya Internasional, Rumah Sakit Mitra Internasional, Rumah Sakit Internasional Bintaro.

Menilik status yang disandang, agaknya kita sedikit dibuat bingung. Kita tahu bahwa rumah sakit yang berstatus

RSUD merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah, rumah sakit yang berstatus RSUP merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Jakarta. Anehnya, tiba-tiba muncul kebimbangan apakah rumah sakit internasional merupakan rumah sakit yang dikelola asing?

Untuk diketahui, status internasional tidak hanya disandang oleh rumah sakit. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi juga menyandang status yang sama. Hanya, sekolah dan perguruan tinggi yang berstatus internasional sudah bisa dipastikan milik negara lain.

ACG International School di Jakarta, *Australian International School*, *British International School*, *Jakarta International School*, *Medan International School*, *The International School of Bogor*, dan Universitas Internasional Batam merupakan beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola secara internasional. Bukan hanya kepemilikan yang memang dikelola oleh negara tertentu melalui kedutaan negara masing-masing, siswa-siswa di sekolah ini pun menggunakan bahasa internasional, Inggris, di samping bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar-mengajar.

Lalu khalayak mulai berpikir apakah rumah sakit internasional memiliki standar tertentu sehingga layak dilabeli internasional? Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *internasional* merupakan kelas kata sifat yang berarti menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; antarbangsa. Bila dianalogikan dengan RSUD dan RSUP, seharusnya rumah sakit internasional adalah rumah sakit yang dikelola oleh pihak asing.

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes, Farid W. Husain, bahkan pernah menyatakan bahwa kata internasional itu sekadar nama. Kata ini tidak merujuk pada standar layanan dan standar mutu. Seyogianya kata interna-

sional wajib disertai dengan standar mutu layanan yang berkelas dunia. Bagaimana dengan rumah sakit internasional yang ada sekarang? Entahlah!

PERTARUNGAN BAHASA PILPRES

Yuliadi M.R.

Selain perang visi dan misi, perang bahasa dan legitimasi diri terjadi antara pasangan capres dan cawapres untuk merebut simpati pemilih. Perang bahasa terlihat dalam wacana bahasa pilpres dimulai setelah pengumuman penetapan pasangan: "SBY Berbudi" didendangkan oleh pasangan SBY dan Boediono; "JK-Win" dikibarkan oleh pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto; dan "Mega-Pro" diusungkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto.

Moto yang diangkat antara ketiga pasangan memiliki arti yang kuat dan mencerminkan diri pasangan masing-masing. Seperti frasa "SBY-Berbudi" dilihat dari bentuk kata terdiri dari singkatan kata *SBY* dan kata *berbudi*. Singkatan SBY dapat diartikan Soesilo Bambang Yudoyono dan Boediono.

Kata *berbudi*, menurut KBBI adalah (1) mempunyai budi; (2) mempunyai kebijaksanaan; berakal; (3) berkelakuan baik; (4) murah hati; baik hati. Setidaknya frasa "SBY Berbudi" dapat diartikan SBY dan Boediono yang mempunyai budi, bijak, dan berakal serta berkelakuan baik juga murah hati. Kesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah pemimpin bangsa harus berbudi, bijak, dan berkelakuan baik. Jauh dari korupsi, nepotisme, dan kolusi. Per-

juangan hanya untuk rakyat, bukan untuk sebagian orang atau kelompok.

Begitu pula frasa "JK-Win", dilihat dari bentuk kata terdiri dari singkatan JK dan *win*. Singkatan JK dapat diartikan Jusuf Kalla (dan Wiranto) sedangkan kata *win* merupakan singkatan dari kata Wiranto (walau terkesan memaksa, seharusnya *wir* bukan *win*). Kata *win* menurut *An English-Indonesian Dictionary* dapat diartikan (1) menang; (2) memenangkan, menang dalam (persaingan dan sebagainya); (3) memikat hati (penikmat, pembaca, pendengar, dan sebagainya).

Bila kita coba artikan frasa "JK-Win" itu adalah Jusuf Kalla dan Wiranto yang menang karena mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Kepemimpinan "JK-Win" harus bertindak cepat dan lebih baik. Sebab siapa yang cepat, dialah yang terbaik dan memenangi pertarungan. Keraguan dan kelambatan adalah setengah dari kegagalan. Kesan yang ingin diungkapkan adalah bertindaklah dengan cepat, jangan ditunda-tunda demi kepentingan rakyat. Percaya pada diri sendiri: tunjukkan bahwa kita mampu dan tidak terus tergantung kepada bangsa lain.

Bagaimana pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto? Frasa "Mega Pro" dilihat dari bentuk kata terdiri dari kata *mega* dan *pro*. Kata *mega* merupakan singkatan dari Megawati. Kata *mega* dapat diartikan Megawati Soekarno Putri (dan Prabowo Subianto) sedangkan kata *pro* merupakan singkatan dari kata Prabowo (seharusnya *pra* bukan *pro*).

Kata *pro* menurut *An English-Indonesian Dictionary* dapat diartikan (1) setuju; (2) profesional. Barangkali, arti yang ingin diusung oleh pasangan ini adalah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang disetujui atau dikehendaki oleh masyarakat karena profesional. Pasangan ini mem-

perjuangkan "ekonomi kerakyatan". Selain itu, pasangan ini pro atau memihak kepada masyarakat bawah: petani, nelayan, pegawai rendah, dan sebagainya. Kesan yang ingin diharapkan bahwa kepemimpinan nanti akan memihak kepada rakyat kecil yang selama ini terlupakan.

Pertarungan legitimasi diri ketiga pasangan juga terlihat pada pendayagunaan jargon. Pasangan SBY dan Boediono mengangkat jargon "bekerja keras untuk rakyat". Frasa itu dapat diartikan suatu kerja pemerintah yang diperjuangkan sebagai usaha untuk kesejahteraan rakyat semata. Rakyat yang sejahtera, rakyat yang makmur.

Pasangan JK dan Wiranto mengusung jargon "lebih cepat, lebih baik". Kecepatan ditempatkan sebagai prasyarat untuk mengukuhkan diri yang lebih baik. Bisa cepat menyelesaikan persoalan, tidak perlu diperlama, lebih cepat tentu lebih baik. Istilah "cepat" dipakai untuk melawan "lambat serta hati-hati".

Pasangan Megawati-Prabowo, memproklamasikan diri dengan berjuang "membangun ekonomi kerakyatan". Isu ini menjadi modal pencitraan karakter prorakyat. Tanpa dukungan rakyat, perjuangan tidak berarti apa-apa. Pemerintahan tanpa didukung rakyat tidak akan mampu tercapai ekonomi yang baik.

Pertarungan ketiga pasangan akan terus memanas hingga waktu pemilihan nanti. Selain menunggu pasangan manakah yang akan menjadi pecundang dan pemenang, kita juga menunggu bahasa-bahasa (pilpres) baru. Barangkali nantinya bahasa-bahasa itu akan memperkaya bahasa (politik) Indonesia. Kita semua menunggu. Mudah-mudahan, pilpres nanti tetap berjalan baik! Semoga....

POLITIK BAHASA: GOLPUT DAN PEDAS

Diah Meutia Harum

Tinggal hitungan jam kita akan melaksanakan pemilu: pemberian suara. Pemberian suara dilakukan untuk memilih capres dan cawapres. Akan tetapi, dalam pemberian suara nanti, bila ada yang menjadi golput, siapa yang salah? Entahlah, dapat dipastikan pengetahuan tentang politik bahasa diperlukan, selain pengetahuan lainnya. Setidaknya kita tidak hanya tahu menyebutnya kata tertentu, tetapi tidak tahu bentuk dan maknanya: *golput* dan *pedas*.

Politik Bahasa antara *Golput* dan *Pedas*

Memang sah-sah saja bila sebagian orang beranggapan bahwa kata *golput* diciptakan untuk mengkritisi dan memprotes. Istilah/kata *golput* mulai kita kenal dalam dunia politik di Indonesia pada pemilihan umum 1971. Ketika itu, golput yang dimotori para tokoh mahasiswa eksponen 66 merupakan gerakan moral sebagai bentuk antitesis terhadap sistem politik yang mengarah ke format monolitik ketika terjadi fusi politik di bawah "paksaan" rezim Orba, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik guna memperlancar roda pembangunan nasional.

Secara bahasa, kata *golput* terimplikasi dari kata golkar: setidaknya sama-sama golongan. Bentuk kata kontradiktif

sebagai wacana perlawanan, pembantahan, penyangkalan, dan pertentangan terhadap keadaan politik. Dampak lainnya, ada yang mengatakan kuningisasi atau hijau royo-royo dalam pemerintahan.

Istilah/kata *golput* merupakan akronim dari kata *golongan putih* (orang yang tidak memberikan pilihan pada pemilu). Istilah/kata *golput* juga diartikan dengan *golongan luput* oleh sebagian orang, yaitu golongan yang tidak atau luput memberikan suaranya pada pemilu.

Akan tetapi, dalam perpolitik dewasa ini ada beberapa alasan seseorang menjadi pemilih *golput*. Pertama, *golput* teknis, yaitu mereka yang melakukan kesalahan teknis dalam proses pemberian suara pada pemilu berlangsung. Mereka yang sudah manula atau buta huruf maupun amat bodoh dan terbelakang bingung bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berada di bilik pemberian suara.

Kedua, *golput* politis, yaitu mereka yang sangat sadar untuk menentukan pilihan "tidak memilih" parpol apa pun atau caleg siapa pun dengan berbagai argumentasi dan pertimbangan secara pribadi.

Ketiga, *golput* ekonomis, yaitu mereka yang memilih *golput* dengan dalih sangat sibuk dengan pekerjaannya serta berasumsi bahwa siapa pun calon presiden terpilih akan sulit memperbaiki keadaan.

Keempat, *golput* anarkis, yaitu mereka yang kecewa karena calegnya tidak masuk atau kalah sehingga tidak ikut pemilu.

Barangkali ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi *golput*. Pertama, mengadakan sosialisasi tata cara pemilu kepada masyarakat pemilih. Kedua, menjembatani antara parpol dan capres/cawapres dengan masyarakat pemilih, dapat berupa debat kandidat, pameran partai politik, sosialisasi visi dan misi partai, dan lainnya.

Ketiga, memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat pemilih. Dengan hal itu, setidaknya-tidaknya masyarakat akan menjadi *pedas* "pemilih (yang) cerdas".

Istilah/kata *pedas*, muncul dalam pemilu 2009, yaitu orang yang memberikan suara pilih dengan sangat sadar akan pilihannya pada pemilu. Sadar dalam artian mengetahui cara pemberian suara yang benar dan mengetahui serta menyakini bahwa partai dan capres/cawapres yang dipilih dapat menjadi wakilnya dan dapat memberikan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Harapan kita pada Pemilu 2009 nanti, perkembangan politik masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dan tidak hanya menjadi pemeran, tetapi berperan dalam menentukan perjalanan bangsa.

IALAH, ADALAH, DAN MERUPAKAN

Adian Saputra

Beberapa bulan yang lalu, seorang teman meminta saya menjadi editor buku yang ia tulis. Setelah honorarium disepakati, tentunya disesuaikan dengan pesan idealisme yang mau disampaikan, pekerjaan mengedit dimulai.

Dalam naskah yang disodorkan teman tadi, Muhammad Farid namanya, cukup banyak kalimat yang dimaksudkan sebagai definisi. Maka, kata *adalah*, *ialah*, dan *merupakan* sering muncul dalam tulisan tersebut.

Rupanya pekerjaan di bagian bahasa surat kabar memberi pengaruh besar terhadap metode kerja saya. Karena curiga ada bedanya antara tiga kata itu: *adalah*, *ialah*, dan *merupakan*, saya mencoba membuka kamus. Tujuannya, untuk mengetahui definisi setiap kata tersebut dan bisa tepat menggunakannya dalam kalimat.

Dan ternyata benar. Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *adalah* adalah verba atau kata kerja. Arti kata tersebut adalah identik. Dalam kamus dicontohkan kalimat sebagai berikut: Pancasila *adalah* falsafah bangsa Indonesia. Sederhananya, kata *adalah* ini hanya dipakai untuk kalimat yang benar-benar menunjukkan keidentikkan, kemiripan, dan keserupaan. Sekadar memberi contoh lain, Garuda Pancasila *adalah* lambang negara Indonesia.

Sekarang kita ke *ialah*. Masih merujuk ke *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata ini adalah partikel. Partikel sendiri berarti kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, dan ucapan salam. Kata *ialah* menjadi penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal pertama. Contoh dalam kalimat: Yang perlu dikerjakan sekarang *ialah* membawa korban ke rumah sakit.

Terakhir, kata *merupakan*. *Merupakan* ini verba atau kata kerja. Asal katanya adalah *rupa*. Artinya, memberi rupa, membentuk, menjadikan, supaya berupa. Contoh dalam kalimat: Formasi barisan itu merupakan lambang PON.

Fuh. Jujur saja, setelah mengetahui arti dari tiga kata tersebut, agak sulit juga untuk menempatkan tiga serangkai ini dalam sebuah kalimat. Menjadi agak susah untuk menempatkan ketiganya dalam konteks kalimat yang benar.

Mau tak mau, harus hati-hati juga menggunakan tiga kata ini dalam kalimat yang menunjukkan keidentikan, definisi, dan pemenggalan.

Namun, saya sadar para ahli bahasa memberikan definisi yang berbeda punya tujuan agar kita cermat dalam berbahasa.

Bahasa memang bisa disederhanakan sebagai urusan komunikasi saja. Ketika kita mengucapkan sesuatu dan orang lain dapat mengerti, itu sudah cukup. Ketika kita meminta orang untuk melakukan apa yang kita minta dan orang tersebut memahami dengan baik, itu juga sudah lebih dari cukup.

Namun, kita memiliki ragam bahasa tulis yang memiliki sendi-sendi yang ketat. Media massa, khususnya lagi media cetak, bahkan menjadi rujukan cara berbahasa pembacanya. Para pembaca akan mendapatkan sumber atau re-

ferensi yang memadai tatkala mereka mendapatkan ilmu yang benar soal berbahasa dari koran yang mereka baca.

Di titik inilah barangkali, sangat penting sebuah media massa benar-benar memperhatikan bagaimana cara berbahasa yang baik, baik lisan maupun tulisan. Sungguh, mendapati arti dari ketiga kata yang menjadi bahan utama tulisan ini—*adalah*, *ialah*, dan *merupakan*—membuat saya terpacu untuk menempatkan semua kata dalam kedudukannya yang mulia. Rasa-rasanya melanjutkan studi di bidang ilmu bahasa Indonesia bisa menjadi pilihan yang baik. Insha Allah.

ANOMALI

Agus Sri Danardana

Menurut KBBI (edisi ketiga) *anomali* berarti ketidaknormalan; penyimpangan dari normal; kelainan. *Anomali*, dengan demikian, dapat terjadi pada semua bidang kehidupan. Di bidang IPA, misalnya, kita mengenal *anomali air*: penyimpangan sifat air. Secara normal air memiliki beberapa sifat, seperti (1) mengalir dari tempat tinggi ke rendah, (2) menguap jika dipanaskan, dan (3) membeku jika didinginkan. Anehnya, jika pendinginan mencapai suhu empat derajat Celcius, air justru memuai. Konon, *anomali* itulah yang menyebabkan air sungai/danau/laut di kutub tidak membeku sampai dasarnya.

Anomali juga terjadi di bidang bahasa. Dalam bahasa Indonesia, penyimpangan dapat ditemukan pada bentukan-bentukan (kata) seperti *tinggal landas*, *mengejar ke(ter)inggalan*, dan *pengentasan kemiskinan*. Betulkah demikian? Mari kita coba menganalisisnya.

Bentukan *tinggal landas* mengingatkan kita pada *tinggal kelas* dan *tinggal rumah* yang artinya tidak naik kelas; tetap di kelas dan tidak ke mana-mana; tetap di rumah. Dengan demikian, *tinggal landas* berarti tidak beranjak; tetap di landas(an).

Bentukan *mengejar ke(ter)inggalan* mengingatkan kita pada hasil yang dikejar: tangkapan. Jika dalam *mengejar ayam* dan *mengejar prestasi*, kemungkinannya kita akan dapat menangkap ayam dan prestasi, berarti dalam *mengejar ke-*

(ter)tinggalan, kemungkinannya kita akan dapat menangkap ke(ter)tinggalan. Sementara itu, bentukan *pengentasan kemiskinan* mengingatkan kita pada kata *entas* (Jawa) yang berarti angkat; mengangkat.

Dengan demikian, *pengentasan kemiskinan* berarti ihwal mengangkat (memamerkan) kemiskinan, bukan pemberantasan (menghilangkan) kemiskinan seperti yang dikehendaki. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa ketiga bentukan: *tinggal landas*, *mengejar ke(ter)tinggalan*, dan *pengentasan kemiskinan* itu benar-benar telah menunjukkan suatu penyimpangan/keganjilan dalam pola berpikir seseorang.

Artinya, apa yang diinginkan bertentangan dengan apa yang dilakukan: ingin terbang seperti pesawat, tetapi tidak mau lepas dari landasan; ingin berperadaban maju, tetapi tidak mengejar kemajuan; dan ingin berkekayaan, tetapi tidak memberantas kemiskinan.

Keganjilan juga terjadi pada kata *merubah* menjadikan berubah/berbeda. Hampir semua orang tahu kata itu dibentuk dari awalan *me-* dan kata dasar yang berawal dengan vokal *u*: *ubah*. Anehnya, banyak di antara mereka tidak menjadikannya *mengubah* seperti bentukan lainnya: *mengukur*, *mengulas*, *mengusap*, *mengurai*, dan *mengumpat* (yang semua kata dasarnya juga berawal dengan vokal *u*). Kata *merubah* menjadikan berubah/berbeda, dengan demikian, merupakan anomali bahasa karena menyimpang dari makna yang seharusnya: menjadi rubah.

Pasti tidak semua orang bisa *merubah*. Hanya orang-orang tertentu (seperti Mbah Marijan [?]) yang dapat melakukannya. Orang biasa (yang tidak memiliki kesaktian) tidak mungkin dapat berubah wujud menjadi rubah.

Gejala lain yang mengarah keanomalian bahasa juga dapat ditemukan pada frasa *sumbangan wajib*. Bukankah yang namanya sumbangan itu bersifat suka-rela? Mengapa

harus diwajibkan? Kata *sumbangan* memang bersinonim dengan kata *iuran*. Akan tetapi, penggunaan kedua kata itu tidak serta-merta dapat saling menggantikan.

Begitulah, anomali air rupanya masih bermanfaat bagi kehidupan. Berkat anomali airlah binatang-binatang kutub (seperti penguin, beruang, dan singa laut) itu hidup. Bagaimana dengan anomali bahasa? Jawabnya, pasti bertentangan dengan anomali air: tidak bermanfaat. Anomali bahasa tidak berarti akan mematikan (hidup) manusia, tetapi akan mengganggu proses hidup manusia. Haruskah anomali bahasa dipertahankan? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.

MENINGKRITISI ATAU MENINGKRITIK?

Asarpin

Penulis cerita pendek, Sori Siregar, pernah menulis tentang orang-orang yang kebingungan membedakan antara kata *kritisi*, *kritik*, *kritikus*, *mengkritisi*, *mengkritik*, dan *mengkritiki*. Yang terakhir tentu hanya olok-olok karena hampir tak pernah kita temukan orang menggunakan kata "mengkritiki" dalam tulisan atau berita.

Selama ini, penulis cerita pendek tak jarang dianggap banyak menerabas kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dibanding, misalnya, seorang pegawai di Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang begitu taat asas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi Sori Siregar membuktikan sebaliknya. Ia jeli membedakan kata *kritisi* dengan *kritik*, *mengkritik* dengan *mengkritisi*. Kata *mengkritisi*, katanya, terdiri atas dua kata campuran Indonesia dan Inggris. Jadi, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata itu sama saja dengan orang yang menulis "setelah me-write sebuah artikel" atau "saya akan men-send nya ke *Lampung Post*."

Namun, segala yang hibrida dianggap memperkaya dan melahirkan bibit unggul. Contohnya ketika orang mulai gemar menggunakan kata "mengkritisi" karena akhiran "i" lebih memikat lantaran jelas bunyinya. Saya pernah membaca tulisan bagus di rubrik *Opini* harian ini dengan judul: "Mengkritisi Perda No. 4 Tahun 2004". Lema ini tampak ke-

ren dan tak mengandung masalah. Tapi segera mengundang pertanyaan cukup lama di benak saya.

Baru-baru ini saya menemukan kata “mengkritisi” dari tulisan salah satu pegawai teknis Kantor Bahasa Provinsi Lampung, di rubrik ini. Ia menulis: “Memang sah-sah saja bila sebagian orang beranggapan bahwa kata golput diciptakan untuk mengkritisi dan memprotes”. Kalimat ini tidak bunyi dan terasa kurang mementingkan diksi. Tapi terlepas dari itu, kata “mengkritisi” yang digunakan Meutia tampak agak mencolok di situ.

Kepada dia saya ingin bertanya: apakah akar kata *mengkritisi*? *Kritisi* atau *kritik*? Kalau *kritisi*, mengapa kata dasar ini tak pernah saya temukan dalam kamus bahasa Indonesia. Mungkin yang dimaksud “kritik”. Kalau ya, mengapa tidak ditulis mengkritik saja tanpa harus menambahkan akhiran *i* untuk menunjukkan kata sifat, padahal salah kaprah?

Kata *mengkritisi* sering kita dengar dalam berbagai wawancara, misalnya ada kalimat begini: “Kita harus tetap mau mengkritisi pemerintah agar kinerja bertambah baik”. Kata *mengkritisi* di sini jelas salah. Kata *kritik* (nomina) dan *critics* (Inggris) bisa diturunkan menjadi verba mengkritik, yang berarti “melakukan kritik” atau “memberikan kritik” (Inggris: *to criticize* atau *to give critical opinion*). Sementara kata *mengkritisi* merupakan bentuk yang salah karena seharusnya *mengkritik* (kata yang berasal dari *meng-* + *kritik*).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ditemukan kata *kritisi* dan *kritikus*, tetapi nomina itu tidak dibentuk menjadi verba. Jadi, bentuk yang benar adalah *meng-* + *kritik* (pangkal verba) *mengkritik*, bukan *mengkritisi*.

Kesalahan semacam itu sering terjadi. Bahkan, menurut pengamatan Sori Siregar (2008), kata *kritisi* dan *mengkritisi* justru banyak digunakan oleh orang yang mengerti ba-

hasa Indonesia, seperti cendekiawan, wartawan, dan kaum terpelajar lainnya.

Izinkan saya mengutip pendapat Sori Siregar lagi dalam salah satu kolom bahasanya. Banyak orang yang mulai lupa kepada bahasa Indonesia karena terlalu lama belajar di luar negeri. Atau, mereka memang tidak begitu peduli dengan bahasa Indonesia. Akibatnya, mereka tidak tahu lagi apa bedanya *kritik*, *kritikus*, dan *kritisi*.

Karena itu, dengan yakin mereka mengatakan *mengkritisi*, sedangkan yang mereka maksudkan *mengeritik*. Mengapa ini dapat terjadi? Tampaknya, mereka salah rujukan. Ketika mereka ingin menggunakan kata *kritik*, mereka merujuk pada kamus bahasa Inggris, bukan pada kamus bahasa Indonesia.

SYIRIK DAN FITNAH

Fikri Ariyanto

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, selain itu juga sebagai pembentuk pola pikir seseorang. Bahasa atau kata-kata yang kita gunakan sangat menentukan sejauh mana pola pikir kita.

Bahasa Indonesia memiliki banyak sekali kosakata serapan yang berasal dari bahasa asing. Salah satunya yang paling sering kita jumpai dan cukup mudah dikenali asal kata tersebut adalah bahasa Arab. Dalam penggunaan sehari-hari banyak sekali kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yang melenceng dari makna sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan pola pikir kita menjadi ikut melenceng dalam memahami kata serapan.

Kata serapan yang salah pemaknaannya yang sering kita jumpai dalam kehidupan berbahasa, di antaranya adalah *fitnah*.

Kata *fitnah* di Indonesia pada umumnya dimaknai sebagai kata yang merujuk pada orang yang menceritakan atau menyatakan tentang orang lain dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Semestinya kata yang lebih tepat untuk pernyataan atau penceritaan tentang orang lain dengan tidak benar, adalah *ghibah* atau *mengumpat*.

Makna kata *fitnah* sebetulnya lebih angker dan mengemparkan dari sekadar memberikan pernyataan terhadap orang lain secara tidak benar. *Fitnah* lebih tepat diartikan sebagai api yang membara yang tengah melepuhkan logam emas. Dapat juga diartikan sebagai, pesona, kekacauan, kemaksiatan yang merajalela atau sesuatu yang menakutkan. Oleh sebab itu, dalam kitab suci Alquran disebutkan bahwa harta dan keluarga adalah *fitnah* karena sangat berpotensi menguji dan melepuhkan keimanan.

Selain kata *fitnah*, ada juga kata yang lain dari bahasa arab yang sering salah penggunaannya serta pemaknaannya, yaitu *syirik* yang diartikan oleh masyarakat dengan sifat yang tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Terlepas dari apakah kata *syirik* telah diserap menjadi bahasa Indonesia atau belum, penggunaannya dalam kehidupan berbahasa di masyarakat sangatlah memprihatinkan. Kata yang begitu dianggap momok dalam ranah religius, kini disalahartikan begitu jauh.

Saya coba contohkan kesalahan pemaknaan kata *syirik* yang sering kita (saya) temui adalah dalam ragam lisan, seperti, "Fikri *syirik* kepada Rahmah Apriani, karena Rahmah Apriani sangat pandai". Dari contoh di atas, entah mengapa kita bisa sampai begitu jauhnya memelencengkan kata *syirik* menjadi pengertian lain. Mungkin untuk kaum muslimin yang mengerti bahasa Arab, akan sangat tersinggung bila dikatakan *syirik*, karena mengetahui betapa dahsyatnya makna kata tersebut terlebih berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan beragama.

Kata *syirik* sangatlah mengerikan, yaitu bermakna menyekutukan Allah swt. dengan sesuatu selain-Nya. Banyak sekali kata serapan dari berbagai bahasa, terutama bahasa Arab yang disalahartikan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbahasa dan salah pula penggunaannya pada

konteks komunikasi. Untuk itu, kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kata serapan (entah itu telah diserap atau belum), karena bisa mengakibatkan salah pola pikir kita terlebih orang lain.

SEKALI LAGI: MENGAJI DAN MENGKAJI

Danang Harry Wibowo

Memang benar kata *mengaji* dan *mengkaji* berasal dari kata dasar yang sama, yaitu *kaji*. Keduanya dipakai oleh para pakar bahasa, pencinta bahasa, akademisi, atau jurnalis meskipun jelas-jelas kata yang berfonem awal *k*, *p*, *t*, dan *s* akan luluh jika mendapat awalan *me-* seperti yang dikemukakan oleh Saudara Fikri Ariyanto (*Lampung Post*, 15 April 2009) memang perlu kita renungkan bersama.

Seperti kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa lain di dunia yang memiliki toleransi pada beberapa kata. Dengan kata lain, ada pengecualian sehingga kata-kata itu mendapat perlakuan yang berbeda dengan kata lainnya.

Bahasa Inggris, misalnya, memiliki *irregular verbs* yang mengalami perubahan bentuk verba untuk menyatakan perbedaan waktu. Kata *break*, *eat*, dan *wear* tidak pernah berubah menjadi *break(ed)*, *eat(ed)*, dan *wear(ed)* meskipun ketika diucapkan tidak membuat keseleo lidah apalagi sengau hidung pengucapnya. Para pengucapnya pun tetap *legowo*

meskipun kata-kata tersebut berubah menjadi *broke*, *ate*, dan *wore*.

Pengecualian dalam bahasa Inggris itu sama halnya dengan penggunaan kata *mengaji* dan *mengkaji* dalam bahasa Indonesia. Dengan pertimbangan ada kepentingan yang berbeda dalam pemakaiannya, kata *mengaji* tetap dipakai dalam urusan yang berkaitan dengan belajar Alquran dan kata *mengkaji* tetap dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan suatu penyelidikan.

Selain itu, persoalan yang serupa juga ditemui pada kata *mempunyai*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kata *empunya* yang mendapat imbuhan *me-* menjadi *mempunyai* meskipun dalam aturan seharusnya berubah menjadi *mengempunyai*. Pada umumnya, kata yang berfonem awal *a*, *i*, *u*, *e*, dan *o* jika mendapat imbuhan *me-* akan berubah menjadi *meng-*, seperti pada kata *asuh*, *incar*, *unduh*, *emban*, dan *olok* yang berubah menjadi *(meng)asuh*, *(meng)incar*, *(meng)unduh*, *(meng)emban*, dan *(meng)olok*. Perubahan dari kata *mengempunyai* menjadi *mempunyai* juga merupakan sebuah pengecualian.

Seseorang bisa saja memakai kata *memunyai* yang berasal dari kata dasar *punya* jika ingin berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Toh, kata *punya* pun menjadi lema (entri) dalam *KBBI* seperti kata *empunya*.

Dengan berbagai pertimbangan seperti itu, penggunaan kata *mempunyai* atau *memunyai* dapat dipakai oleh siapa saja. Berbeda dengan seseorang yang tidak mau *mempesona* karena *mempesona* lebih mewakili pesona yang dimilikinya atau seseorang enggan *memerkosa* karena dirasa kurang bertenaga dibanding *memperkosa*.

Kita pun tidak pernah mempertanyakan kekonsistenan orang yang *nyeleneh* itu ketika kegiatan *memperkosa* yang dilakukannya tidak menyalahi aturan sehingga ia tidak pernah

menjadi *peperkosa*, tetapi *pemerkosa*. Bukankah dalam aturan juga berlaku peluluhan apabila kata dasar yang diawali dengan huruf *k*, *p*, *t*, dan *s* mendapat awalan *pe*-?

Pengecualian seperti beberapa contoh di atas memang bukan hanya perkara malu tidaknya, kelu tidaknya, enak tidaknya seseorang memakainya, melainkan perkara yang harus dipikirkan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan politik, sosial, budaya, dan agama, demi kemaslahatan bersama.

Dengan persoalan yang tidak jauh berbeda dengan pengecualian *k*, *p*, *t*, dan *s* dalam bahasa Indonesia, apakah kita pernah mengeluh untuk menghapus meskipun *irregular verbs* itu tidak sedikit jumlahnya? Apakah kita pernah *ngotot* untuk tidak menyepakatinya karena kata-kata itu mendapat perlakuan yang berbeda? Bukankah pada kenyataannya kita pun harus *legowo* memakainya tanpa pernah tahu mengapa *irregular verbs* itu ada?

PENULIS

Adian Saputra

lahir di Tanjungkarang pada 27 Januari 1979. Sulung tiga bersaudara ini menempuh pendidikan di SDN 2 Rawalaut, SMPN 2 Tanjungkarang, SMAN 2 Tanjungkarang, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satu Nusa Bandarlampung. Senang menulis sejak SMP. Pernah menjadi redaktur pelaksana Pers Mahasiswa *Pilar Ekonomi* Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Sekitar 400 tulisan berupa *feature*, esai, opini, resensi buku, cerpen, dan cerita anak dimuat di beberapa media, antara lain *Lampung Post*, *Radar Lampung*, *Lampung Ekpres Plus*, *Khalifah*, *Insani*, dan *Jurnal Tropika Indonesia*. Pernah dikontrak Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti-Korupsi (LSM Koak) untuk menyunting tiga buah buku: *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi*, *Dari Lampung Melawan Korupsi*, dan *Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi*. Menjadi bagian dari tim penulis buku *Setengah Abad Alzier*. Menjadi editor untuk buku *Dan Allah pun Taubat* yang ditulis Muhammad Farid. Menikah dengan Sekar Sari Indah Cahyani dan memiliki seorang putra: Nuh Muzaffar Quthuz.

Kini sehari-hari bekerja di Harian Umum *Lampung Post* sebagai asisten redaktur bahasa. Juga aktif sebagai sekretaris di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung. Berkorespondensi di abahgundul@yahoo.com dan 0813 6959 1133.

Agus Sri Danardana

lahir di Sragen 23 Oktober 1959. Alumnus Universitas Gadjah Mada (S-1) dan Universitas Indonesia (S-2) ini bekerja di Pusat Bahasa, Jakarta, sejak tahun 1988. Mulai tahun 2004 hingga saat ini menjadi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Tulisan-tulisan lepasnya pernah dimuat di beberapa surat kabar ibukota, seperti *Suara Karya*, *Pelita*, *Terbit*, *Merdeka*, dan *Jayakarta*. Karya-karyanya, baik ditulis sendiri maupun bersama, yang sudah terbit berupa buku di antaranya adalah (1) *Drama Indonesia Modern dalam Majalah Indonesia, Siasat dan Zaman Baru (1945 – 1965)*, (2) *Pelanggengan Kekuasaan: Analisis Struktur Teks Dramatik Lakon Semar Gugat Karya N. Riantiarno*, (3) *Antologi Biografi Pengarang Sastra Indonesia 1920 – 1950*, dan (4) *Peran Majalah Hiburan Tahun 1970 – 1989 dalam Perkembangan Kesusastraan Indonesia*. Di samping itu, ia pun pernah menulis buku pelajaran SD dan SMP: *Tangkas Berbahasa Indonesia* dan *Apresiasi Sastra* serta menulis beberapa cerita anak dan cerita rakyat: *Asal-Usul Kota Pati*, *Damak dan Jalak*, *Asal-Usul Keluarga Pulosari*, *Rusak Sasak*, *Kepahlawanan Trunajaya*, *Cerita Si Bungsu Tujuh Bersaudara*, dan *Putri Kelabang*.

Agus Utomo

lahir di Tanjungkarang, 7 Juli 1985. Lelaki yang tinggal di daerah Kemiling, Bandarlampung, ini menamatkan pendidikan S-1-nya di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karya-karyanya pernah dimuat di *Lampung Post*, seperti "Relokasi PKL vs Pemkot" (*Lampung Post Edisi*, 13 April 2007) dan "Sekolah + Komite = Mutu Pelayanan" (*Lampung Post*, 27 Juli 2007).

Asarpin

lahir di Negeringarip, dekat hilir Teluk Semangka (Tanggamus), 8 Januari 1975. Pendidikan terakhir fakultas Ushuluddin jurusan Studi Perbandingan Agama, IAIN Raden Intan Bandarlampung. Selesai kuliah, bekerja pada *Urban Poor Consortium (UPC) Jakarta* (2002—2005), sebagai staf Litbang. Salah satu pendiri *Urban Poor Linkage (Uplink)*, sebuah jaringan NGO nasional tentang kemiskinan perkotaan. Kemudian kembali ke Lampung dan dipercaya sebagai koordinator *Urban Poor Linkage (UPLINK) Lampung* (2005—2007). Beberapa kali mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional. Pada 2009, mengikuti program penulisan Mastera untuk genre Esai di Wisma Arga Mulya, Agustus 2009. Selain sebagai aktivis yang sehari-hari bersama kaum miskin kota pesisir pantai Bandarlampung, aktif menulis esai sastra dan opini sosial keagamaan di *Lampung Post* dan *Radar Lampung*. Ia menikah dengan Nurmilati (guru Sekolah Alam Lampung) dan dikaruniai seorang putri, Kaila Estetika.

Kini tengah mempersiapkan buku analekta esai sastra bertajuk *Enigma Angka & Kata*.

Danang Harry Wibowo

lahir di Jakarta, 22 Juli 1980. Sulung tiga bersaudara ini menempuh pendidikan di TK Mekar Siwi, SDN 02 Pondokbahar, SMPN 10 Tangerang, SMAN 3 Tangerang, dan Fakultas Sastra Universitas Nasional, Jakarta. Lelaki yang bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini pernah turut serta dalam penyusunan buku *Ensiklopedia Sastra Lampung* dan *Laras Bahasa: Fobia Bahasa Indonesia, Rubrik Laras Bahasa Lampung Post*. Beberapa tulisannya pernah dimuat di *Kelasa, Lampung Post*, dan *Radar Lampung*.

Diah Meutia Harum

lahir di Bandung, 17 Maret 1975. Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini adalah alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia pernah membuat penelitian biografi sastrawan Lampung, diantaranya Iswady Pratama tahun 2006 dan Budi Hutasuhut tahun 2007, *Ensiklopedia Sastra Lampung* tahun 2009. Beberapa tulisannya pernah dimuat di *Jurnal Kelasa* Kantor Bahasa Provinsi Lampung, *Lampung Post*, dan *Radar Lampung*. Kini menjadi salah satu Tim Penyusunan Ensiklopedi Sastra dan Tim Pemetaan Bahasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung serta pemerhati dan penikmat bahasa dan sastra.

Dominggus M.U.D.

Adalah seorang kolumnis yang berdomisili di Pesawaran

F. Moses

lahir di Jakarta, 8 Februari 1978 lelaki yang bernama lengkapnya Ferdinandus Moses, lahir di Jakarta, 8 Februari 1979. Ia bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL) pada bagian Pembinaan Bahasa dan Sastra. Bersama KBPL, ia turut membidani lahirnya buku *Ensiklopedi Sastra Lampung* (2008), dan *Pemertahanan Bahasa-Bahasa di Daerah Lampung* (2008). Sebuah makalahnya dimuat dalam *jurnal Kelebat Masalah Bahasa dan Sastra* (Kelasa, 2007). Masih bersama KBPL, ia juga aktif mengulas cerpen maupun puisi di *Radar Lampung*, rubrik Sastra Milik Siswa (SMS). Selain itu, ia menulis puisi dan cerpen yang pernah dimuat di beberapa media, antara lain *Lampung Post*, *Sriwijaya Post*, *Batam Post*, *Suara Pembaruan*, *Sinar Harapan*, dan *Pontianak Post*. Alamat surat: moses_kbpl@yahoo.com.

Fikri Ariyanto

lahir di Kotabumi, 18 Juli 1989. Anak ke tiga dari lima bersaudara pasangan muslim Burhanudin dengan Ummu Habibah. Ia bermukim di Jalan Flamboyan II Kelurahan Labuhandalam, Kecamatan Tanjungseng, Bandarlampung. Ia menamatkan pendidikan di SDN 01 Labuhandalam, SMPN 19 Bandarlampung, dan SMAN 13 Bandarlampung. Mahasiswa FKIP Universitas Lampung, Jurusan Bahasa dan

Sastra Indonesia angkatan 2007 ini tertarik ambil bagian dalam gerilya renyah menggelitik para penulis di Laras Bahasa. Laras Bahasa memiliki keunikan, pepatah petiti, emosi, dan kejujuran dalam menghadapi problematika bahasa Indonesia. Narasi dan ide yang segar menjadi ciri Laras Bahasa.

Hasnawati Nasution

lahir di Pasirpengairan pada 28 Maret 1978. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang (IKIP Padang). Ia menjadi staf teknis di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya: Variasi Dialektal Bahasa Lampung, Persebaran Bahasa-Bahasa di Provinsi Lampung, Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas Kantor Lurah Se-Kota Pekanbaru.

Juwendra Asdiansyah

aktif menulis sejak bergabung di Surat Kabar Mahasiswa (SKM) *Teknokra* Universitas Lampung pada 1995. Juwe—begitu pria kelahiran Jakarta 18 Juli ini disapa—sempat menjadi pemimpin umum di lembaga pers mahasiswa tersebut pada 1998–1999, setelah sebelumnya memegang jabatan serupa di Majalah Mahasiswa *PILAR Ekonomi* Fakultas Ekonomi Unila. Ratusan artikel opini, esai, cerpen dan puisi karyanya dimuat di berbagai media massa dan jurnal ilmiah populer sejak 1997. Pria berdarah Minangkabau ini ikut menulis dalam sejumlah buku di antaranya *Menembus Arus*,

Perspektif Reformasi dari Lampung (Yayasan Bumi Lada), *Advokasi Anti Korupsi*, (CSSP dengan Komite Anti Korupsi), *Etos Kita: Moralitas Kaum Intelektual* (Gammamedia Yogyakarta), *Setengah Abad Alzier*, dan kini masih mengerjakan buku berjudul *Wawancara yang Benar oleh Wartawan yang Baik*. Karir jurnalistik dijalannya dengan menjadi Redaktur Senior Tabloid *Sumber Lampung* (1998), Pemimpin Redaksi dan pendiri majalah *Sapu Lidi Koak Lampung* (2001), Pemimpin Redaksi Majalah Berita *Indie* (2002–2004), wartawan Harian *Seputar Indonesia* (Koran *Sindo*, 2005–2009), dan sejak April 2009 menjadi Redaktur *Tribun Lampung* (Kompas Gramedia). Sejak 1997 aktif menjadi pemateri dan *trainer* di berbagai pelatihan jurnalistik, baik secara individu maupun mewakili lembaga di antaranya Yayasan Pantau, Lembaga Jurnalistik Saidatul Fitriah (LJSF), Bengkel Jurnalisme, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sempat aktif di sejumlah NGO seperti Majelis Kemandirian Lampung (2001), Komite Anti Korupsi (Koak) Lampung (2001), dan Pusat Pendidikan untuk Pencerahan dan Pembebasan Rakyat (P4R) Empu (2002). Pada 2005, pria yang hobi menyanyi ini bergabung dengan AJI Bandar Lampung, dan sejak 2007 dipercaya menakhodai lembaga tersebut hingga 2010.

Mukhammad Isnaeni

lahir di Tanggamus, 28 Maret 1979. Alumnus Universitas Lampung jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Oyos Saroso H.N.

lahir 16 Maret 1969. Alumnus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jakarta (kini UNJ), ini karya-karyanya terkumpul dalam berbagai antologi bersama, di antaranya *Batas Diam Matahari* (1996), *Rahasia Sebatang Lidi* (1996), *Titik Diam di Mata Karmin* (1996), dan *Penyair Ujung Pulau* (2002). Puisinya antara lain terkumpul dalam *Gender* (Sanggar Minum Kopi Bali, 1993), *Dari Bumi Lada* (1997), dan *Angkatan 2000 dalam Kesusasteraan Indonesia* (2001).

Ratih Rahayu

lahir di Bandung, 21 April 1976. Bungsu enam bersaudara ini menyelesaikan pendidikan di TK Pardamuan (1982), SD Pardamuan (1988), SMPN 7 Bandung (1991), dan SMAN 10 Bandung (1994). Pendidikan tinggi dilaluinya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2000) dan Program Pascasarjana UPI, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (2005). Pernah mengajar di STKIP Siliwangi dan AMIK Bandung. Saat ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan tergabung dalam tim pengasuh rubrik Laras Bahasa di Lampung Post (2007–sekarang).

Suheri

mengajar bidang studi bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur.

Udo Z. Karzi

lahir 12 Juni 1970 di Liwa, Lampung Barat. Menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (1996). Pernah menjadi Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mahasiswa *Teknokra* (1993–1994), Pemimpin Umum Majalah *Republica* (1994–1996), dan Pembimbing Majalah *Ijtihad* (1995–1998). Banyak menimba pengalaman dari kelompok/kegiatan diskusi: Kelompok Studi Merah Putih, Forum Dialog Mahasiswa (Fordima), *Forum for Information and Regional Development Studies* (FIRDES), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Terjun ke dunia jurnalistik sebagai wartawan lepas harian umum *Lampung Post*, Bandar Lampung (1995–1996) dan reporter Majalah Berita Mingguan *Sinar*, Jakarta (1997–1998). Sempat mengajar Ekonomi-Akuntansi di SMAN dan MAN di kota kelahirannya (1998) sebelum menjadi Redaktur Surat Kabar Umum *Sumatera Post*, Bandarlampung (1999–2000). Kini, jurnalis di *Lampung Post*, Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Lampung (Litbang DKL), bergiat di Sekolah Kebudayaan Lampung (SKL) dan Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (Pusaka) Lampung. Dianggap membawa pembaruan dalam tradisi perpuisian (berbahasa) Lampung sebagaimana terlihat dalam buku kumpulan sajak dwibahasa Lampung-Indonesianya, *Momentum* (2002), dia disebut “Bapak Puisi Modern (Berbahasa) Lampung”. Sajak-sajak lainnya termuat dalam antologi bersama: *Daun-Daun Jatuh, Tunas-Tunas Tumbuh* (SKM Teknokra, 1995), *Lampung Kenangan*, Krakatau Award 2002 (Dewan Ke-

senian Lampung, 2002), *Konser Ujung Pulau* (Dewan Kesenian Lampung, 2003), dan *Pertemuan Dua Arus* (Jung Foundation, 2004). Cerpen-cerpennya dimuat dalam Sapardi Djoko Damono dkk. (Ed.), *Graffiti Imaji* (Yayasan Multimedia Sastra-Damar Warga, 2002). Penyunting dan kontributor: *Etos Kita, Moralitas Kaum Intelektual* (Gama Media-Teknokra, 2002). Buku lainnya: *Mamak Kenut, Orang Lampung Punya Celoteh dan Mak Dawah Mak Dibingi, Tak Siang Tak Malam* (memenangi penghargaan Sastra Rancage 2008).

Yulfi Zawarnis

lahir di Bukittinggi, 7 Juli 1978. Menyelesaikan Sekolah Menengah di Bogor. Kuliah S-1 di UNJ jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lulus tahun 2003. Bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung sejak 2004. Menyelesaikan S-2 di Universitas Indonesia awal 2009.

Yuliadi M.R.

lahir di Kerinci, 8 Juli 1974. Alumnus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, jurusan Sastra Indonesia ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selain itu, ia juga mengabdikan diri di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan PGRI Metro dan Universitas Terbuka Lampung sejak tahun 2006 hingga sekarang. Penelitian yang pernah ia lakukan, di antaranya Biografi Sastrawan Ari Pahala Hutabarat (2005), Biografi Sastrawan Iwan Nurdya Jafar (2007), *Pemetaan Dialektal Bahasa Lampung* (2008), dan *Pemetaan Bahasa-Bahasa di Indonesia* (2008). Bang Je, begitu biasa teman-temannya me-

manggil, juga menjadi salah satu Tim Pemetaan Bahasa Pusat Bahasa dalam pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang. Saat ini, ia tergabung dalam Tim Pemetaan dan Ketua Redaksi Jurnal *Kelasa* dan *Penyusunan Ensiklopedi Sastra Lampung*, Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Beberapa tulisan pernah dimuat di *Kelasa*, *Lampung Post*, dan *Radar Lampung*.



Laras Bahasa: Saya Ulun Lampung

Rubrik Laras Bahasa di Lampung Post

Globalisasi dan reformasi itu, ternyata, tidak hanya telah membuat masyarakat menjadi semakin seragam (homogen), tetapi juga telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia (terhadap identitas, citra diri, hingga nilai-nilai hidup) berubah.

Agus Sri Dargardana

Memang, pada beberapa kasus hal itu menjadi kenyataan. Istilah-istilah lokal yang dahulu diseragamkan mulai diganti ke bentuk awal sehingga hidupkan kembali istilah *pekon* (Lampung) dan *nagari* (Sumatera Barat) yang selama Orde Baru disebut *desa*.

Oyos Saroso, H.N.

Dan, suatu hari kita boleh berimprovisasi, tak akan lagi menderai Mas Prapto, Kyay Herman, Kang Asep, atau Uda Azwir, berkata *weluh, yow* ini ada-ada saja, gini-gini I sudah sering lunch di Twenty One, lo! *Weleh... weleh....*

Juwendra Asdiansyah

Kata *ulun* sama kasarnya dengan sebutan kepada seseorang atau suku atau marga dengan menggunakan kata mereka: Mereka Jawa. Mereka Batak. Yang gaul akan menggunakan kata "dia orang" bukan mereka. Jadi, kata *ulun* Lampung sama dengan kata orang lain atau kata penunjuk untuk orang yang bukan suku Lampung.

Martin

Ya, saya memang sengaja memopulerkan *ulun* Lampung sebagai ganti istilah orang Lampung dan masyarakat Lampung. Ah, sebenarnya kalau mau bisa saja yang pakai kata *jelma* yang artinya sama, 'orang'. *Jelma* Lampung artinya 'orang Lampung'.

ISBN: 978-979-685-986-3

499
L